



# LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung (*PD DPPKBPM**D Kabupaten Belitung*) Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.



Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tanjungpandan, Februari 2025  
Kepala DPPKBPM



**Febriansyah, S.STP**  
NIP. 19870213 200602 1001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung (PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung) Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja DPPKBPMMD Kabupaten Belitung yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra DPPKBPMMD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja DPPKBPMMD Kabupaten Belitung yang dihasilkan di tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Sasaran Terwujudnya Program Bangga Kecana dengan indikator kinerja **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)** Capaian Indikator Kinerjanya pada tahun 2024 sebesar 164,90% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 65,32% dengan capaian kinerja 107,59%. iBangga dibentuk dari tiga dimensi yakni: Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Capaian iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: rentan (dibawah 40), berkembang (40-70) dan tangguh (diatas 70).
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana dengan Indikator **Total Fertility Rate (TFR)** pada tahun 2024 sebesar 2,12% dari target yang ditetapkan sebesar 2,41 % . *Total Fertility Rate (TFR)* adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu).
2. Sasaran Strtegis Meningkatnya Perkembangan desa Mandiri dan Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa dengan indikator kinerja **Jumlah Desa dengan IDM Desa Mandiri** dengan definisi operasional : Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155. Berdasarkan keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024 pada tahun 2024 ada 23 Desa yang berstatus Desa Mandiri di kabupaten Belitung, meningkat dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 20 Desa yang berstatus Desa Mandiri

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi DPPKBPMMD Kabupaten Belitung untuk peningkatan kinerja ke depan, sebagai berikut.

1. Masih tingginya angka ASFR (15-19 tahun)
2. Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kegiatan (Poktan) belum optimal
3. Kompetensi Kader Poktan masih rendah
4. Keterbatasan tenaga/SDM pada pengelola Ketahanan Keluarga
5. Belum maksimalnya advokasi dan KIE serta penguatan kelembagaan Program Bangga Kencana
6. Kualitas kader institusi masyarakat pedesaan masih rendah
7. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB di lapangan

8. Kualitas informasi data program Bangga Kencana yang belum optimal dan kurangnya kompetensi SDM bidang ekonomi desa dalam melakukan pembinaan terhadap penguatan ketahanan ekonomi desa.
9. Kapasitas SDM Pemerintahan Desa dalam mengembangkan potensi desa masih kurang
10. Belum optimalnya lembaga perekonomian desa (BUMDes/BUMDesma)

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024, total pagu anggaran DPPKBPMD Kabupaten Belitung adalah sebesar **Rp. 12.211.067.105,00** dengan total realisasi sebesar Rp. 11.182.618.436 ,00 atau sebesar **91,58 %** dari total pagu anggaran tahun 2024.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi DPPKBPMD Kabupaten Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	li
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I           PENDAHULUAN	1
1.1     Struktur Organisasi	1
1.2     Fungsi dan Tugas	4
1.3     Isu-Isu Strategis	6
1.4     Keadaan Pegawai	7
1.5     Keadaan Sarana Prasarana	9
1.6     Keuangan	13
1.7     Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	13
BAB II          PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1     Perencanaan Strategis	15
2.1.1 isi dan Misi Kepala Daerah	16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	18
2.1.3 Startegi, Program dan Kegiatan	20
2.2     Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
2.3     Rencana Anggaran Tahun 2024	24
2.3.1 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	24
BAB III         AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1     Capaian Kinerja PD Pada Tahun 2024	27
3.2     Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis	29
3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini	29
3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Renstra	30
3.2.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas	35
3.2.4 Review atas Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024-2026	39
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	42
3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	69
3.2.7 Inovasi Yang Mendukung Pencapaian Kinerja	90
3.3     Kinerja Lainnya Tahun 2024	93
3.4     Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi dan Implementasi SAKIP 2023	98
3.5     Akuntabilitas Keuangan	101
BAB IV         PENUTUP	106
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai Berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan Tahun 2024
Tabel 1.2	Pegawai DPPKBPMK Kabupaten Belitung Tahun 2023
Tabel 1.3	Pegawai DPPKBPMK Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024
Tabel 1.4	Jenis Diklat dan Penjurangan
Tabel 1.5	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana DPPKBPMK Kabupaten Belitung sampai dengan Tahun 2024
Tabel 1.6	Alokasi Anggaran Tahun 2024
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama PD DPPKBPMK Kab. Belitung 2024-2026
Tabel 2.2	Sasaran Strategi, Program dan Kegiatan Tahun 2024 pada DPPKBPMK Kabupaten Belitung
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Tabel 2.4	Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan (I) Tahun 2024
Tabel 2.6	Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan (I) Tahun 2024
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Perubahan (II) Tahun 2024
Tabel 3.1	Predikat Capaian Kinerja
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama DPPKBPMK Kabupaten Belitung Tahun 2024
Tabel 3.4	Capaian Kinerja DPPKBPMK Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun lalu
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra PD
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra PD Tahun 2024-2026
Tabel 3.9	Pencapaian Indikator Sasaran Strategis dan Sasaran Program BKKBN Tahun 2023
Tabel 3.10	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2024
Tabel 3.11	Targer dan Realiasi Jumlah Desa Dengan IDM Desa Maju 2024-2026 di Kab. Belitung
Tabel 3.12	Data Capaian IDM Tahun 2023-2024 Per Kecamatan di Kab. Belitung
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian IDM Status Desa Kab. Belitung Timur (2023-2024)
Tabel 3.14	Komponen Indeks Desa Membangun di Kab. Belitung Timur
Tabel 3.15	Review dan Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024-2026
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja DPPKBPMK Kabupaten Belitung Tahun 2024 Berdasarkan Persentase
Tabel 3.17	Capaian Indikator Kinerja DPPKBPMK Kabupaten Belitung Tahun 2024 Berdasarkan Kategori
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.20	Pencapaian Target Tujuan/Sasaran Strategis PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.21	Capaian Indikator Sasaran 1 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.22	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun lalu
Tabel 3.23	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun lalu
Tabel 3.25	Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024
Tabel 3.26	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.27	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun lalu
Tabel 3.28	Capaian Peningkatan Desa dengan IDM Desa Mandiri
Tabel 3.29	IDM Desa Mandiri Kabupaten Belitung 2024
Tabel 3.30	Perbandingan Data Capaian IDM Desa Perkecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024
Tabel 3.31	Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024
Tabel 3.32	Alokasi Dana Desa Tahun 2024
Tabel 3.33	Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024
Tabel 3.34	Penetapan Alokasi Bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024
Tabel 3.35	Penetapan Alokasi bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024
Tabel 3.36	Detail Nilai SKM Per Unsur
Tabel 3.37	Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.38	Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.39	Penghargaan Yang Diraih Perangkat Daerah Tahun 2024
Tabel 3.40	Kebijakan Strategi Pada Tahun 2024
Tabel 3.41	Anggaran dari Realisasi Belanja Pencapaian sasaran Tahun 2024
Tabel 3.42	Realisasi Anggaran Program Utama dan Pendukung Sasaran Tahun 2024
Tabel 3.43	Analisis Efisiensi
Tabel 3.44	Komposisi Belanja PD DPPKBPMMD Kab Belitung Anggaran 2024 dan Tahun sebelumnya

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Pohon Kinerja DPPKBPMMD Kabupaten Belitung Tahun 2024
- Gambar 1.2 Struktur Organisasi DPPKBPMMD Kabupaten Belitung
- Gambar 1.3 Rumusan Masalah Dan Isu Strategis Kabupaten Belitung 2024-2026
- Gambar 1.4 IBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Kab Belitung 2022-2024
- Gambar 1.5 Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024
- Gambar 1.6 Perbandingan Jumlah Desa Maju 2018-2023
- Gambar 1.7 Grafik Nilai SKM Per Unsur
- Gambar 1.8 Grafik Tren Tingkat Kepuasan Penerima Layanan OPD DPPKBPMMD Kab Belitung 2024
- Gambar 1.9 Rapat Pengurus Genre 2024 dan Kegiatan SK Non Formal di Balai Penyuluh Tanjungpandan
- Gambar 1.10 Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan di Balai Penyuluh KB Selat Nasik
- Gambar 1.11 Kegiatan KIE Bagi PUS ber KB
- Gambar 1.12 Kegiatan Monev Pendataan Kab Belitung Tahun 2024 Bersama Tim BKKBN Perwakilan Prov. Babel
- Gambar 1.13 Lomba IMP dan KB Lestari Tk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Gambar 1.14 Kegiatan dalam rangka kunjungan kunjungan Direktur Bina lini Lapangan BKKBN RI dan DPP IPKB sekaligus Distribusi GenRe kit bagi PIK remaja kec tanjungpandan terpilih
- Gambar 1.15 Pengiriman Duta Genre Tk Kab Belitung ke Tk Prov Babel meraih juara II Tk. Provinsi
- Gambar 1.16 Distribusi Genre Kit dan Sosialisasi Penggunaan di SPM 3 dan SPM 5 Tanjung Pandan Hasil Pengadaan dari DAK Non Fisik sub Bidang KB
- Gambar 1.17 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Desa dan Ketua BPD Tahun 2024
- Gambar 1.18 Kegiatan sosialisasi peraturan bupati belitung nomor 26 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan bupati belitung nomor 71 tahun 2023 tentang penetapan alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten belitung kepada desa tahun anggaran 2024, peraturan bupati belitung nomor 27 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan bupati belitung nomor 72 tahun 2023 tentang penetapan alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten belitung kepada desa tahun anggaran 2024, peraturan bupati belitung nomor 28 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan transaksi non tunai pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.se-kecamatan membalong dan sijek
- Gambar 1.19 Kegiatan Pelatihan Keuangan bumdes Tahun 2024
- Gambar 1.20 Pembinaan Kelembagaan pkk untuk Desa se-Kec Membalong dan Selat Nasik
- Gambar 1.21 Penggunaan Aplikasi Siskeudes di Desa yang ada di kab Belitung
- Gambar 1.22 Penggunaan Aplikasi Supades di Desa yang ada di kab Belitung
- Gambar 1.23 Pelaksanaan Bimbingan bagi calon pengantin pada kelas catin yang bekerja sama dengan KUA dan DEPARTEMEN Agama Tanjung pandan
- Gambar 1.24 Campak Belitung di acara Semoial

# **BAB I**

## **PENDALUHUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Belitung nomor 34 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, Keputusan Bupati Belitung nomor 100.3.4/491/KEP/VIII/2023 tentang Penetapan Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung nomor 38 th 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2023 diharapkan dapat:

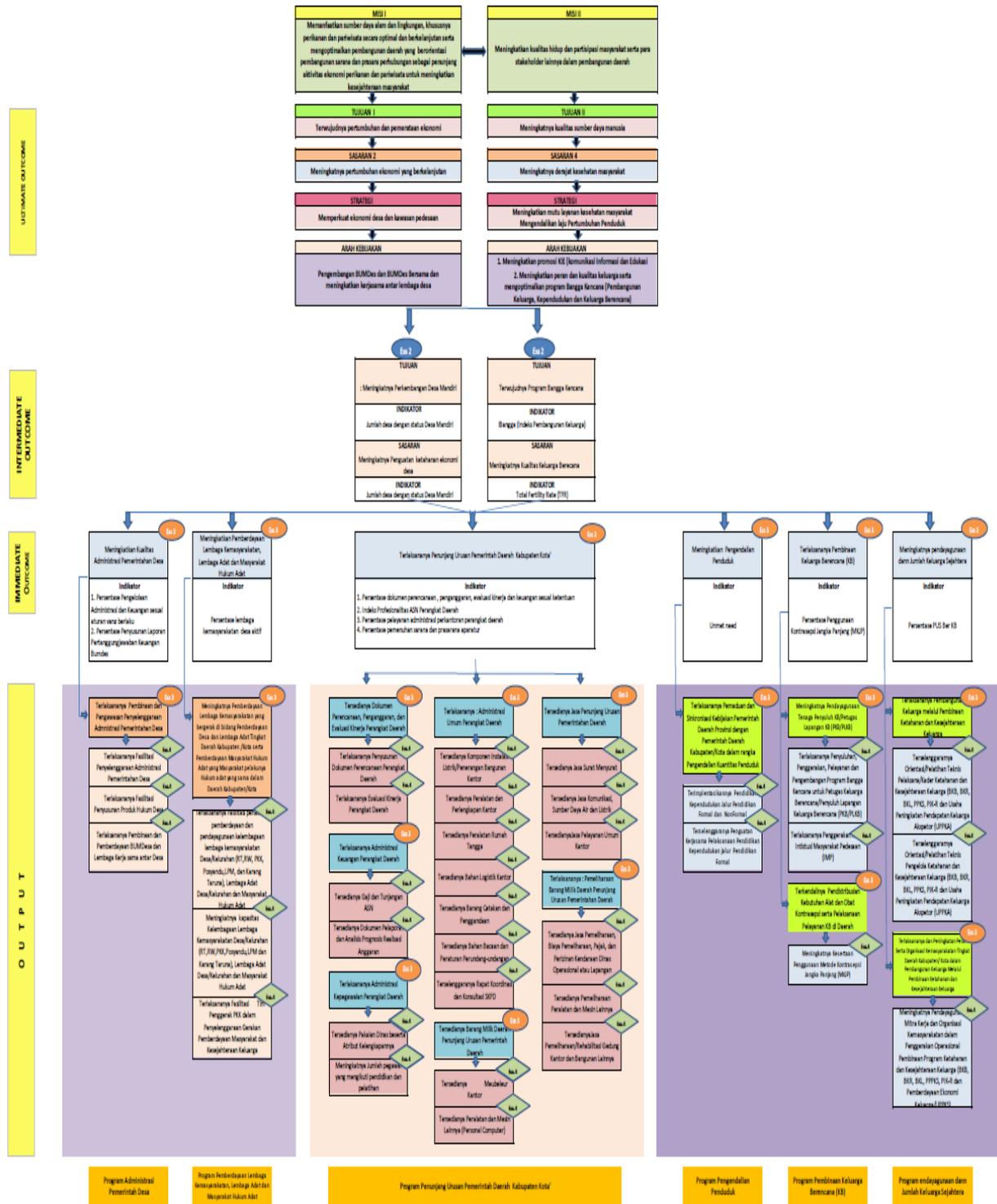
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh DPPKBPM Kabupaten Belitung.
2. Mendorong DPPKBPM Kabupaten Belitung di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPPKBPM Kabupaten Belitung untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap DPPKBPM Kabupaten Belitung di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **1.1. STRUKTUR ORGANISASI**

DPPKBPM Kabupaten Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung harus memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Untuk pencapaian visi misi Kepala Daerah dalam Rencana Daerah (RPD) Kabupaten Belitung, DPPKBPM Kabupaten Belitung mendukung untuk **Misi Kesatu**: Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi Kedua: Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah

DPPKBPM Kabupaten Belitung dibentuk dengan peta proses bisnis sebagai berikut:

Gambar 1.1 POHON KINERJA DPPKBPMD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024

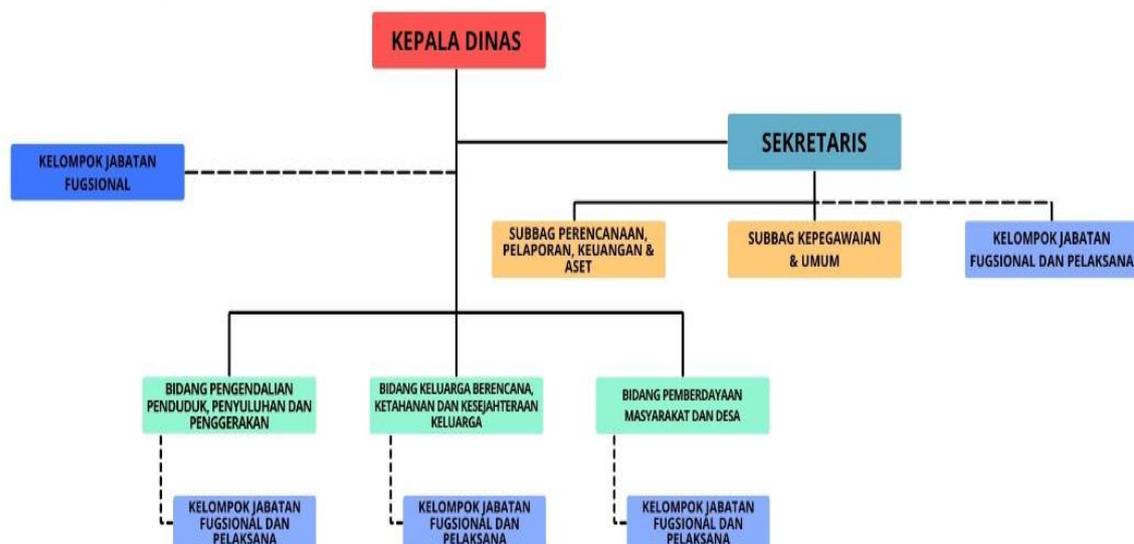


DPPKBPMMD Kabupaten Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. DPPKBPMMD Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - 2.1. Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Keuangan dan Aset;
  - 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. Bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, terdiri atas:
  - 3.1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas:
  - 4.1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tersediri dari:
  - 5.1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk struktur organisasi DPPKBPMMD Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Orgaisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung, dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar berikut dibawah ini :

Gambar 1.2 STRUKTUR ORGANISASI DPPKBPMMD KABUPATEN BELITUNG



Sumber: Peraturan Bupati Belitung Nomor 82 Tahun 2022

## 1.2. FUNGSI DAN TUGAS

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 82 Tahun 2022 Tanggal 26 Desember 2022 menetapkan bahwa DPPKBPMMD Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud DPPKBPMMD Kabupaten Belitung mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis pada semua unsur di lingkungan PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan pengelolaan, perencanaan, pelaporan, keuangan dan aset;
- d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan urusan Aparatur Sipil Negara;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan daerah.:

- a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
- b. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan-penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- f. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah;

- g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam perumusan kebijakan teknis bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
- b. perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi daerah;
- f. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pembinaan ketahanan remaja;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- j. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB daerah;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk menjalankan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
- b. perumusan pelaksanaan fasilitasi swadaya gotong royong masyarakat;
- c. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa serentak dan pemberhentian kepala desa;
- d. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa;
- e. fasilitasi kerja sama desa dan penyelesaian perselisihan Desa dan batas desa.
- f. pelaksanaan pembinaan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. pelaksanaan pembinaan aparatur desa;
- h. pelaksanaan fasilitasi bantuan kepada masyarakat;
- a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- i. pelaksanaan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
- j. pelaksanaan penataan desa/kelurahan;
- k. pembinaan administrasi pemerintahan desa;
- l. pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **1.3 ISU ISU STRATEGIS**

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

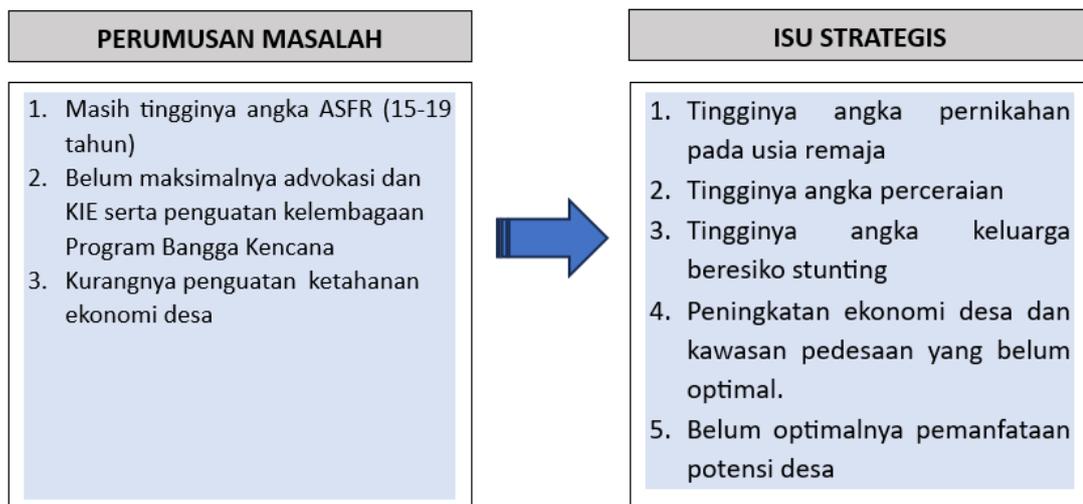
Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis

didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bappeda menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2024, isu strategis DPPKBPMMD dapat dirumuskan dalam gambar dibawah berikut ini :

**Gambar 1.3 Rumusan Masalah dan Isu Strategis DPPKBPMMD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026**



## 1.4 KEADAAN PEGAWAI

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksana tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai DPPKBPMMD Kab. Belitung belum berada pada keadaan yang ideal sehingga masih terdapat kekurangan pegawai

Jumlah personil yang ada per 31 Desember 2023 berdasarkan keterisian hasil analisa jabatan PNS jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 29 pegawai, yang terdiri dari 9 pegawai laki-laki (31,03%) dan 20 pegawai perempuan (68,96%). Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Bappeda didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1, D4 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 27 orang (94%), lulusan SMA sebanyak 2 orang (6%). Selain pegawai yang serstatus ASN juga terdapat 12 Pegawai yang berstatus Non ASN yang terdiri dari 6 pegawai Non ASN laki-laki dan 6 pegawai Non ASN Perempuan. Dengan jenjang pendidikan lulusan S1 sebanyak 4 orang, D3 sebanyak 3 orang dan SMA sederajat sebanyak 5 orang. Adapun komposisi pegawai sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pegawai Berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan Tahun 2024

Kepala Dinas	Pembina / IV.a	1 Orang
Sekretaris	Pembina / IV.a	1 Orang
Kepala Sub Bagian	Penata Tk.I / III.d	2 Orang
Kepala Bidang	Pembina / IV.a	1 Orang
Kelompok Jabatan Fungsional	Penata Tk.I / III.d	2 Orang
	Pembina / IV.a	1 Orang
	Penata Tk.I / III.d	7 Orang
	Penata / III.c	2 Orang
	Penata Muda Tk.I / III.b	2 Orang
	Penata Muda/III.a	2 Orang
	Pengatur Tk.I / II.d	2 Orang
	Pengatur II /c	1 Orang
Bendahara Pengeluaran	Golongan VII	1 Orang
	Penata Muda Tk.I /III.b	1 Orang

Data Pegawai pada DPPKBPMMD Kabupaten Belitung berdasarkan pendidikan, pangkat dan eselon sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pegawai DPPKBPMMD Kab. Belitung Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah		Ket
		Lk	Pr	
1.	Kepala DPPKBPMMD	1	-	
2.	Sekretaris	-	1	
	1. Kasubbag Kepegawaian dan Umum	-	1	
	2. Kasubbag Koordinator Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset	-	1	
	3. Penelaah Teknis Kebijakan	-	1	
	4. Pengolah Data dan Informasi	-	1	
	5. Pengadministrasi Perkantoran	-	1	
	6. Operator Layanan Operasional	1	-	
	7. Arsiparis Terampil	1	-	
	8. Non ASN	4	1	
3.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	1	-	
	1. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	1	1	
	2. Penelaah Teknis Kebijakan	-	1	
4.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	1	
	1. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	-	1	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	-	
	1. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	-	5	
	2. Penggerak Swadaya Masyarakat Mahir	-	1	
	3. Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	-	1	
	4. Penggerak Swadaya Masyarakat Terampil	-	1	
	5. Penelaah Teknis Kebijakan	-	2	
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>21</b>	

TABEL 1.3 PEGAWAI DPPKBPMO BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGANTAHUN 2024

Rincian	Jumlah ASN		Jumlah Non ASN		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Gol. IV	3	1	-	-	4
Gol. III	1	17	-	-	18
Gol. II	1	2	-	-	3
Gol. I	-	-	-	-	-
-Gol VII (PPPK)	1	-	-	-	1
NON ASN			4	1	5

Tabel 1.4 Jenis Diklat dan Penjurangan

No.	Jenis Diklat	Telah mengikuti		Belum mengikuti	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Diklat Pim I	-	-	-	-
2	Diklat Pim II	-	-	1	-
3	Diklat Pim III	-	1	2	-
4	Diklat Pim IV	4	3	1	4
5	Diklat Fungsional	-	5	-	2
6	Diklat Teknis	5	8	4	11

## 1.5. KEADAAN SARANA PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, selain dukungan sumber daya manusia, DPPKBPMO Kab. Belitung juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran DPPKBPMO Kab. Belitung. Untuk kondisi sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran DPPKBPMO Kab. Belitung dirasa belum memadai dengan jumlah pegawai 41 orang dan PKB 15 orang. Di samping itu, juga fasilitas ruang rapat yang dimiliki DPPKBPMO Kab. Belitung juga belum memadai mengingat frekuensi koordinasi yang dilaksanakan oleh sekretariat maupun bidang-bidang sesuai dengan tata kelola perencanaan sering bersamaan. Data sarana dan prasarana DPPKBPMO Kab. Belitung dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana DPPKBPMO Kabupaten Belitung Sampai dengan Tahun 2024

Jenis Barang	Satuan	Jumlah yang ada	Jumlah Ideal	Kurang/Cukup	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Unit	1	1	cukup			
Kendaraan Dinas Bermotor - Mobil	Unit	5	6	1			
Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Sepeda Motor	Unit	7	17	10			
Alat Ukur Universal - Global Positioning System	Unit	2	1	cukup			
Universal Tester - Scanner	Unit	0	1	cukup			

Jenis Barang	Satuan	Jumlah yang ada	Jumlah Ideal	Kurang/Cukup	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat
Alat Ukur Lainnya - lain-lain	Unit	5	5	cukup			
MesinTik - MesinKetik	Unit	2	2	cukup			2
Mesin Hitung/Jumlah - Mesin Calculator	Unit	5	6	1			4
Mesin Fotocopy Folio	Unit	0	1	1			
Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Rak Kayu	Unit	10	12	2	8		2
Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Filling Besi/Metal	Unit	25	25	cukup	19		6
Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Filling Kayu	Unit	1	5	4			
Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Lemari Kaca	Unit	3	7	4			
Alat Kantor Lainnya - Alat Penghancur Kertas	Unit	0	5	5			
Mesin Absensi	Unit	1	2	1			
Alat Kantor Lainnya - Papan Pengumuman	Unit	2	2	cukup			
Alat Kantor Lainnya (Mesin Faxmili)	Unit	1	1	cukup			
CCTV -Camera Control Television System	Unit	1	2	1	1		
Alat Kantor Lainnya - White Board	Unit	4	2	cukup			
Alat Kantor Lainnya - Peta	Unit	1	1	cukup			
Alat Kantor Lainnya - Overhead Projector	Unit	1	2	1			
Papan Gambar	Unit	0	0				
Alat Kantor Lainnya - Lain-lain	Unit	1	1	cukup			
Lemari Besi / Metal	Unit	20	1	cukup	16		4
Meubelair - Lemari Kayu	Unit	8	10	2	6		2
Rak Besi	Unit	3	5	2			
Meubelair - Meja Kayu/Rotan	Unit	0	7	cukup			
Meubelair - Meja Rapat	Unit	48	40	cukup			
Meubelair - Meja Resepsionis	Unit	1	1	cukup			
Meubelair - Meja Tambahan	Unit	3	7	3			
Meubelair - Meja Panjang	Unit	7	6	cukup			
Meubelair - Meja Bundar	Unit	1	1	cukup			
Meubelair - Kursi Rapat	Unit	175	200	25			
Meubelair - Kursi Tamu	Unit	9	12	3	6	3	
Meubelair - Kursi Putar	Unit	28	40		20	3	5
Meubelair - Kursi Biasa	Unit	149	150	1	106	17	26
Meubelair - Bangku Tunggu	Unit	2	3	1			
Meubelair - Kursi Lipat	Unit	1	21	20			
Meubelair - Meja Komputer	Unit	7	7	cukup			
Meubelair - Tikar	Unit	0	6	6			
Meubelair - Meja 1/2 Biro	Unit	31	40	9	26	4	1
Meubelair - Sofa	Unit	1	2	1			
Alat Pengukur Waktu - Jam Elektronik	Unit	2	7	5	1		1
Alat Pembersih - Mesin Penghisap Debu	Unit	2	3	1			
Alat Pembersih - Mesin Potong Rumput	Unit	1	2	1			1
Alat Pendingin - AC Window	Unit	4	4	cukup			
Alat Pendingin - AC Split	Unit	33	30	cukup	32		1

Jenis Barang	Satuan	Jumlah yang ada	Jumlah Ideal	Kurang/Cukup	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat
Alat Pendingin – Kipas Angin	Unit	8	10	2	7		1
Alat Pendingin - Exhaust Fan	Unit	24	10	cukup			
Rak Piring Aluminium	Unit	0	0				
Alat Dapur lainnya	Unit	2	3	cukup	1		1
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Televisi	Unit	6	6	cukup	4		2
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Loudspeaker	Unit	3	4	1	2		1
AlatRumahTanggaLainnya (Home Use) - Sound System	Unit	2	2	cukup	2		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Wireless	Unit	3	2	cukup	2		1
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Microphone	Unit	5	4	cukup	5		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Unit Power Supply	Unit	10	10	cukup	10		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Camera Video	Unit	3	1	cukup	3		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Camera Film	Unit	0	0				
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Lambang Garuda Pancasila	Unit	0	1	1			
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Tiang Bendera	Unit	2	2	cukup			
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Kaca Hias	Unit	1	1	cukup			
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Dispenser	Unit	4	5	1	4		
AlatRumahTanggalainnya (Home Use) - Mimbar/Podium	Unit	1	1	cukup			1
AlatRumahTanggaLainnya (Home Use) - Handy Cam	Unit	0	1	1			
AlatRumahTanggaLainnya (Home Use) - Handy Cam	Unit	1	1				1
Vertikal Blind	Unit	27	25	cukup			
AlatRumahTanggaLainnya (Home Use) - Lain-lain - LukisanKaligrafi	Unit	0	6	6			
Personal Komputer - P.C.Unit	Unit	23	30		13		10
Personal Komputer - Laptop	Unit	12	15	3	12		
Personal Komputer - Note Book	Unit	2	5	3	2		
Peralatan Mini Komputer - Printer	Unit	0	2	2			
Peralatan Personal Komputer - Printer	Unit	21	30		13		9
Peralatan Personal Komputer - Scanner	Unit	0	4	4			
Peralatan Personal Komputer - Lain-lain	Unit	0	6	6			
PeralatanJaringan - Server	Unit	0	1	1			
Router	Unit	0	4	4			
PeralatanJaringan - Lain-lain (D-Link)	Unit	1	1	cukup			
Meja Kerja Pejabat – Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1	1	cukup	1		
Kursi Kerja Pejabat	Unit	10	8	cukup	10		
Peralatan Studio Visual - Unintemuptible Power Supply (UPS)	Unit	2	5	3	2		
PeralatanStudioAudioLainnya (360VRT set)	Unit	0	5	5			
Layar Film / Proyektor	Unit	5	6	6			6
Camera Conference	Unit	0	2	2			
Alat Studio Vidio Lainnya (Drone)	Unit	0	1	1			

Jenis Barang	Satuan	Jumlah yang ada	Jumlah Ideal	Kurang/Cukup	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat
Alat Komunikasi Telephone - Telephone (PABX)	Unit	2	1	cukup			
Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	1	cukup			
Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	0	0				
Bangunan Gedung Instalasi - Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Unit	2	1	cukup			
Bangunan Gedung Tempat Ibadah - Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	1	cukup			
Bangunan Gedung Garasi/Pool - Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	5	4	cukup			
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	1	1	cukup			
Rumah Negara Golongan II - Rumah Negara Golongan II Type B Permanen	Unit	0	0				
Tugu/Tanda Batas - Batas Administrasi Kepemilikan	Unit	3	3	cukup			
Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air - Sumur Artetis	Unit	1	1	cukup			
Air Tanah Dalam - Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang	Unit	1	1	cukup			
Jaringan Air Minum - Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	Unit	1	1	cukup			
Jaringan Tranmisi - Jaringan Tranmisi Tegangan dibawah 1 KVA	Unit	1	1	cukup			
Jaringan Listrik - Penambahan Daya	Unit	1	1	cukup			
Umum - Ilmu Pengetahuan Umum	Buku	33	33	cukup			
Umum - Ilmu Perpustakaan	Buku	12	34	cukup			
Umum - Lain-lain	Buku	15	15	cukup			
Agama - Agama Islam	Buku	1	1	cukup			
Ilmu Sosial - Ekonomi	Buku	1	1	cukup			
Ilmu Sosial - Hukum	Buku	3	3	cukup			
Ilmu Bahasa - Pengetahuan Bahasa Inggris	Buku	3	3	cukup			
Geografi, Biografi, Sejarah - Bigrafi	Buku	3	3	cukup			
Geografi, Biografi, Sejarah - Sejarah	Buku	1	1	cukup			
Tablet P.C	Unit	7		cukup			
Peta - Peta Citra Satelit	Unit	0	1				
Tanda Penghargaan - Piala	Buah	4	4				
Maket / Miniatur / Replikas	Unit	1	1				
Mesin Photocopy	Unit	0	1				
Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan (DED Gedung Kantor)	Unit	0	0				

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPPKBPMK Kab. Belitung didukung dengan sarana dan prasarana, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Hanya saja kondisi di beberapa bagian dari bangunan kantor sudah tidak layak lagi, seperti bagian atap yang sudah tidak dalam kondisi baik. Untuk mendukung mobilitas kinerja, DPPKBPMK Kab. Belitung mempunyai kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 27 unit dan roda 4 (empat) sebanyak 5 unit, dan dengan menempati gedung perkantoran yang dapat menampung 41 orang pegawai dan 15

tenaga PKB, akan tetapi jumlah dan kapasitas ruang rapat dirasa belum cukup memadai mengingat frekuensi koordinasi yang cukup tinggi dari setiap bidang.

## 1.6 KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPPKBPMMD Kab. Belitung pada tahun 2024 berasal dari APBD Kab. Belitung dan DAK Reguler Non Fisik BOKB. Pada anggaran induk bulan Januari tahun 2024 DPPKBPMMD Kab. Belitung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **10.744.579.905,-** dengan rincian Belanja Operasi Rp. 10.682.579.865,- yang didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar Rp. 5.142.483.465; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 5.540.096.400; dan Belanja Modal Rp 62.000.000 -

Pada Pergeseran Anggaran bulan Mei tahun 2024 sebesar Rp. 11.744.579.905,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp 11.682.579.905 - terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.142.483.465,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.310.096.440,- Belanja Hibah sebesar Rp. 230.000.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp 62.000.000.-

Pada Pergeseran Anggaran bulan September tahun 2024 sebesar Rp. 12.211.067.105,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp 12.059.507.105 - terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.078.623.465,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.750.883.640,- Belanja Hibah sebesar Rp. 230.000.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp 151.560.000 -.

Anggaran tahun 2024 diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja yang berasal dari APBD untuk mendukung 6 (empat) program, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

Tabel 1.6 Alokasi Anggaran Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Induk 2024		Anggaran Pergeseran 2024		Anggaran Perubahan 2024	
		Anggaran (Rp)	Persentase	Anggaran (Rp)	Persentase	Anggaran (Rp)	Persentase
1	Belanja Operasi	10.682.579.865	99,42	11.682.579.905	99,47	12.059.507.105	98,76
	- Belanja Pegawai	5.142.483.465	47,86	5.142.483.465	43,79	5.078.623.465	41,59
	- Belanja Barang dan Jasa	5.540.096.400	51,56	6.310.096.440	53,73	6.750.883.640	55,28
	- Belanja Hibah	-	-	230.000.000	1,96	230.000.000	
2	Belanja Modal	62.000.000	0,58	62.000.000	0,53	151.560.000	1,24
	Jumlah Anggaran	10.744.579.865	100,00	11.744.579.905	100,00	12.211.067.105	100,00

Sumber: DPPA DPPKBPMMD 2024

## 1.7. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKBPMMD Kab. Belitung tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendalakendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi DPPKBPM Kab. Belitung, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

## BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## LAMPIRAN

## **BAB III**

### **PERENCANAAN DAN PERJANNJIAN KINERJA**

#### **2.1 PERENCANAAN STRATEGIS**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Belitung merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Belitung bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kabupaten Belitung yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 dan pencapaian RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Kabupaten Belitung salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilu kepala daerah serentak di Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Sehingga di Tahun 2023 akan ada kekosongan pimpinan kepala daerah di Kabupaten Belitung.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD 2005-2025 dan/ atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan/ atau isu strategis aktual. Keterkaitan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 khususnya pada tahap pembangunan lima tahun keempat yang merupakan tahap penguatan sektor industri dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pemasaran hasil produksi perikanan dan kelautan, kontinuitas pengembangan potensi kepariwisataan, optimalisasi pengelolaan pelabuhan laut Tanjung Batu, dan pengembangan sumber daya manusia berbasis potensi daerah.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di DPPKBPMK Kab. Belitung yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Perangkat Daerah DPPKBPMK Kab. Belitung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung nomor 20 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

Renstra DPPKBPMK Kab. Belitung merupakan manifestasi komitmen DPPKBPMK Kab. Belitung dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belitung yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra DPPKBPMK Kab. Belitung Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2024-2026). Pada Tahun 2024, DPPKBPMK Kab. Belitung melaksanakan Review Rencana Strategis (Review Renstra) DPPKBPMK Kab. Belitung Tahun 2024-2025 terkait dengan penyesuaian Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

### **2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Belitung serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka visi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”**

Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut :

1. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah;
3. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan

Dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dengan 3 (tiga) sasaran :
  - a) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
  - b) Menurunnya Kemiskinan Penduduk
  - c) Meningkatnya infrastruktur kewilayahan
2. Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia, dengan 2 (dua) sasaran :
  - a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  - b) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
3. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, dengan 2 (dua) sasaran :
  - a) Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel
  - b) Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan 1 (satu) sasaran :
  - a) Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

Pernyataan visi dan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh diwaktu-waktu yang akan datang. Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana cara melakukannya. Secara ringkas, dengan mempertimbangkan aspek relevan lainnya, seperti tugas pokok dan fungsi pemerintahan, serta karakteristik kelembagaan yang melekat pada lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Belitung, telah ditetapkan tiga misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

1. **Misi Kesatu:** Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Misi Kedua: Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah.
3. Misi Ketiga: Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana berikut:

1. **Misi I:** “Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berketanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan presara perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. **Tujuan 1 RPD** yaitu “Terwujudnya pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi” dengan **sasaran 2 RPD** yaitu “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan” melalui **strategi** “Memperkuat ekonomi desa dan kawasan pedesaan” dengan **arah kebijakan** pengembangan BUMDes dan BUMDes Bersama dan mpeningkatkan kerjasama antar lembaga desa

2. **Misi II** : “Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah” **Tujuan 2 RPD** yaitu “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” dengan **sasaran 4 RPD** yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” melalui **strategi** “Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat” dengan **arah kebijakan** meningkatkan promosi KIE (komunikasi Informasi dan Edukasi dan **strategi** Mengendalikan laju Pertumbuhan Penduduk dengan **arah kebijakan** meningkatkan peran dan kualitas keluarga serta mengoptimalkan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang berlaku efektif pada 31 Maret 2023 melakukan penetapan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Belitung tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 11 April 2023. Indikator Kinerja Utama DPPKBPM Kab. Belitung periode 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama PD DPPKBPM Kab. Belitung 2024-2026

NO. 1	SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA 3	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN 4	SUMBER DATA 5
1.	Terwujudnya Program Bangga Kencana	iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	iBangga dibentuk dari tiga dimensi yakni: Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Capaian iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: rentan (dibawah 40), berkembang (40-70) dan tangguh (diatas 70)	Pendataan Keluarga
1.1.	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	<p>Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu).</p> $TFR = 5 \sum_{i=1}^{15} ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times K$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total  ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur</p> <p><math>b_i</math> = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur <math>i</math> pada tahun tertentu  <math>p_i</math> = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur <math>i</math> pada pertengahan tahun yang sama  <math>i</math> = kelompok umur (<math>i=1</math> untuk kelompok umur 15-19, <math>i=2</math> untuk kelompok umur 20-24, ..., <math>i=7</math> untuk kelompok umur 45-49)  <math>K</math> = bilangan konstanta biasanya 1000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan pengendalian lapangan bulanan dan Pendataan Keluarga</li> <li>Data SIGA</li> </ul>
2	Meningkatnya Perkembangan Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155	Data Kemendes
2.1	Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155	Data Kemendes

Sumber: Perbup Belitung nomor: 22 Tahun 2023

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat

Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya DPPKBPMMD Kab. Belitung dalam kegiatan operasional DPPKBPMMD Kab. Belitung tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve (SMART-C).

### Tujuan dan Sasaran Strategis

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran DPPKBPMMD Kab. Belitung dalam kurun waktu 2024-2026 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rentrsa OPD adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi awal (2022)	Target Kineja pada Tahun Ke		
				2024	2025	2026
1	2	4		6	7	8
1.	Terwujudnya program Bangga Kencana	<b>iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)</b> Ket: sumber data Pendataan Keluarga	n/a	60,32	60,50	60,68
2.	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	<b>Total Fertility Rate (TFR)</b> Ket: sumber data SIGA	2,42	2,41	2,40	2,39
3..	Meningkatnya Perkembangan Desa Mandiri	<b>Jumlah desa dengan status Desa Mandiri</b> Ket: sumber data Kemendes Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155	9 Desa	11 Desa	12 Desa	13 Desa
4.	Meningkatnya Penguatan ketahanan ekonomi desa	<b>Jumlah desa dengan status Desa Mandiri</b> Ket: sumber data Kemendes Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155	9 Desa	11 Desa	12 Desa	13 Desa

Adapun penjelasan atau formula pengukuran dari Indikator Sasaran Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

#### 1. iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)

iBangga dibentuk dari tiga dimensi yakni: Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Capaian iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: rentan (dibawah 40), berkembang (40-70) dan tangguh (diatas 70).

#### 2. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu).

$$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$$

$$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i f} \times K$$

TFR = Angka Kelahiran Total

ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur

$b_i$  = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur  $i$  pada tahun tertentu

$p_i$  = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur  $i$  pada pertengahan tahun yang sama

$i$  = kelompok umur ( $i=1$  untuk kelompok umur 15-19,  $i=2$  untuk kelompok umur 20-24,.....,  $i=7$  untuk kelompok umur 45-49)

$K$  = bilangan kontanta biasanya 1000

### 3. Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri

Melalui keterangan sumber data Kemendes bahwa Jumlah desa dengan Status Desa Mandiri adalah Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155

#### 2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di DPPKBPMMD Kab. Belitung yang tertuang dalam RPJMD menyesuaikan dengan aturan/pedoman sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategi, Program dan Kegiatan Tahun 2024 pada DPPKBPMMD Kab. Belitung

Sasaran Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Terwujudnya program Bangga Kencana	Program Pengendalian Penduduk	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan NonFormal Sub Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal</li> <li>Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal</li> </ol>
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Pelaksanaan, Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)</li> <li>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</li> </ol>
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</li> </ol>
	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>Orientasi/Pelatihan Teknis Pelakasana/kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)</li> <li>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)</li> </ol>
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</li> </ol>

Meningkatnya Perkembangan Desa Mandiri	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</li> <li>2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</li> <li>3. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa</li> </ol>
Meningkatnya Penguatan ketahanan ekonomi desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat hukum Adat yang Masyarakat Pelaku Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</li> <li>2. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</li> <li>3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</li> </ol>
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</li> </ol>	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</li> <li>2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> </ol>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</li> <li>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ol>	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Mebel</li> <li>2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ol>	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ol>	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ol>		

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran

strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah berdasarkan Peraturan Bupati Belitung No 34 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada RPJMD, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja DPPKBPM Kab. Belitung Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2024 target kinerjanya telah disesuaikan kondisi capaian indikator kinerja terutama untuk target indikator kinerja Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri menjadi 20 Desa pada tahun 2024 dikarenakan penyesuaian atas kondisi Status Desa Mandiri Tahun 2023 di Kabupaten Belitung telah mencapai 17 Desa sesuai Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 14 Juli 2023.

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kineja 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Program Bangga kencana	iBangga (Indeks pembangunan Keluarga)	%	60,32
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,41
3	Meningkatkan Perkembangan Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Desa	20
4	Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Desa	20

Sumber: DPPKBPM Kab. Belitung 2024

**Tabel 2.4 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.254.132.105	APBD
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	739.630.400	APBD
3	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	381.318.300	APBD
4	Program Pengendalian Penduduk	104.732.500	APBD
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	689.020.600	APBD
6	Program pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	2.575.746.000	APBD/Non FISIK
	<b>Jumlah</b>	<b>10.744.579.905</b>	

Sumber: DPPKBPM Kab. Belitung 2024

Pada tanggal 20 Mei 2024, DPPKBPM Kab. Belitung menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan:

1. Penyesuaian target indikator kinerja iBangga (Indeks pembangunan Keluarga) pada tahun 2024 yang semula 60,32% menjadi 65,32%. Perubahan target ini dilakukan untuk penyesuaian dengan pemutakhiran data dari Direktorat Pelaporan dan Statistik BKKBN yang dikeluarkan pada bulan february 2024 atas capaian Ibangga di Kabupaten Belitung Tahun 2023 adalah 64,64%. Data capaian iBangga tersebut termuat dalam jurnal Info Grafik Kinerja Utama Bangga Kencana: Hasil Pemuktahiran Pendataan Keluarga Tahun 2023.
2. Pergeseran/perubahan anggaran dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah pusat atas harus dilaksanakannya kegiatan yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal

Kinerja Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2023 dan telah ditetapkan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan (I) Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kineja 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Program Bangga kencana	iBangga (Indeks pembangunan Keluarga)	%	65,32
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berecana	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,41
3	Meningkatkan Perkembangan Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Desa	20
4	Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Desa	20

Sumber: DPPKBPM Kab. Belitung 2024

**Tabel 2.6 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan (I) Tahun 2024**

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.254.132.105	APBD
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	739.630.400	APBD
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	784.801.850	APBD
4	Program Pengendalian Penduduk	104.732.500	APBD
5.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	985.567.050	APBD
6.	Program pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	2.875.716.000	APBD/Non FISIK
	<b>Jumlah</b>	<b>11.744.579.905</b>	

Pada dokumen perubahan ke I Perjanjian Kinerja tahun 2024, untuk Target Kinerja ada penyesuaian iBangga (Indeks pembangunan Keluarga) pada tahun 2024 yang semula 60,32% menjadi 65,32% dan secara keseluruhan anggaran bertambah sebesar Rp100.000.000 atau sebesar 9,31%. dari total anggaran

Tanggal 14 Oktober 2024, DPPKBPM Kab. Belitung kembali menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan anggaran tahun 2024, sebagai berikut:

**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan (II) Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kineja 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Program Bangga kencana	iBangga (Indeks pembangunan Keluarga)	%	65,32
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berecana	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,41
3	Meningkatkan Perkembangan Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Desa	20
4	Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Desa	20

Sumber: DPPKBPM Kab. Belitung 2024

**Tabel 2.8 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan (II) Tahun 2024**

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.379.832.105	APBD
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	953.617.600	APBD

3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	911.601.850	APBD
4	Program Pengendalian Penduduk	104.732.500	APBD
5.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	985.567.050	APBD
6.	Program pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	2.875.716.000	APBD/Non FISIK
	<b>Jumlah</b>	<b>12.211.067.105</b>	

Pada dokumen perubahan ke II Perjanjian Kinerja tahun 2024, Indikator Kinerja dan Target Kinerja tidak berubah, tetapi volume dan anggaran bertambah sebesar Rp466.487.200 atau sebesar 3,97% dari total anggaran.

## 2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

### 2.3.1 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Pemerintah Kab. Belitung menggunakan struktur komposisi Belanja berupa Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi merupakan anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Inspektorat dimana didalam komponen tersebut termasuk belanja gaji pegawai, sedangkan Belanja Modal merupakan belanja untuk keperluan perolehan aset tetap dan aset lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2024 DPPKBPMK Kab. Belitung melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 10.734.366.502,-. Pada bulan Oktober tahun 2024 anggaran DPPKBPMK Kab. Belitung melalui mekanisme perubahan APBD 2024 mengalami perubahan menjadi Rp10.968.471.140,- dan pada pergeseran anggaran setelah perubahan bulan November 2024 menjadi Rp. 11.968.471.140,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.11.673.974.640,- dan Belanja Modal Rp 294.496.500,-. Total Anggaran Perubahan tersebut digunakan untuk mendukung 6 Program, 15 Kegiatan, dan 39 Sub Kegiatan.

**Tabel 2.9 Target Belanja DPPKBPMD Kab. Belitung APBD pada Perubahan Tahun 2024**

No	Uraian	Target Belanja (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Operasi	12.059.507.105	98,76
2	Belanja Modal	151.560.000	1,24
	Jumlah	12.211.067.105	100

Tahun 2024 Belanja Operasi DPPKBPMD Kab. Belitung terserap sebesar Rp 11.155.411.220- atau sebesar 92,50% sedangkan Belanja Modal terserap sebesar Rp 149.900.000,- atau sebesar 98,90%. Rrealisasi dan persentase target belanja DPPKBPMD Kab. Belitung tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.10 Realisasi Target Belanja DPPKBPMD Kab. Belitung APBD Perubahan Tahun 2024**

No	Uraian	Target Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Operasi	12.059.507.105	11.032.718.436,00	91,49
2	Belanja Modal	151.560.000	149.900.000	98,90
	Jumlah	12.211.067.105	11.182.618.436,00	91,58

Anggaran Setelah Perubahan pada Tahun Anggaran 2024 DPPKBPMD Kab. Belitung dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.11 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis**

Sasaran Perangkat Daerah	Program	Indikator Program	Anggaran	%
Terwujudnya Program Bangga kencana	Program Pengendalian Penduduk	Unmet need	104.732.500	0,86
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	985.567.050	8,07
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase PUS Ber KB	2.875.716.000	23,55
Meningkatkan Perkembangan Desa Mandiri	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Persentase Pengelolaan Administrasi dan Keuangan desa Sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDesa	953.617.600	7,81
Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Desa Aktif	911.601.850	7,47
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah 4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	6.379.832.105	52,25
JUMLAH			12.211.067.105	100

Alokasi anggaran strategis digunakan untuk membiayai 5 program yang ada di DPPKBPMMD Kab. Belitung oleh 3 bidang/sektoral, yaitu: Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) diampu oleh 2 bidang, yaitu Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan dan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diampu oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diampu oleh Sekretariat.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja PD Pada Tahun 2024

DPPKBPM Kab. Belitung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja DPPKBPM Kab. Belitung tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Predikat Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Terdapat dua jenis polarisasi indikator (ekspektasi nilai realisasi indikator terhadap nilai target) yaitu:

- a. *Maximize* – nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target.
- b. *Minimize* – nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target

Adapun kerangka pengukuran kinerja yang berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2023 adalah dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kode
1	Sangat baik	91% ≤ 100%	
2	Baik	76% ≤ 90%	
3	Cukup	66% ≤ 75%	
4	Kurang	51% ≤ 65%	
5	Sangat kurang	≤ 50%	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Seluruh indikator kinerja telah dilengkapi dengan definisi operasional yang memuat penjelasan definisi umum, rumus perhitungan, periode waktu pengukuran dan sumber data pengukuran indikator kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh DPPKBPM Kab. Belitung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis DPPKBPM Kab. Belitung beserta target dan capaian realisasinya dirinci pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 **Capaian Indikator Kinerja Utama DPPKBPM Kabupaten Belitung sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Polarisasi Capaian	Status Capaian
Terwujudnya Program Bangga kencana	iBangga (Indeks Pembangunan keluarga)	65,32%	64,90%	99,36% %	Maximize	
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2,41	2,12	112,03%	Minimize	
Meningkatkan Perkembangan Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	20 Desa	23 Desa	115%.	Maximize	
Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	20 Desa	23 Desa	115%.	Maximize	

Perbandingan capaiannya dalam kurun waktu tahun 2018-2023 dapat terlihat dari tabel 3.4 di bawah ini

Tabel 3.4 **Capaian Target Kinerja DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	
		2023	2024
Terwujudnya Program Bangga kencana	iBangga (Indeks Pembangunan keluarga)	n.a	99,36%
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	106,25	112,03%
Meningkatkan Perkembangan Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	n.a	115%.
Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	n.a	115%.

Berdasarkan tabel di atas terdapat 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran (dua sasaran strategis memiliki 1 indikator yang sama) yang tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024. **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)** Pada tahun 2023, tidak ada data capaian yang tercatat (**n.a**) dan pada tahun 2024 persentase capaian iBangga mencapai **99,36%** dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan hampir seluruh target telah tercapai. **Total Fertility Rate (TFR)** pada tahun 2023, capaian kinerja TFR mencapai **106,25%**, yang berarti realisasi target lebih baik dari yang ditetapkan dan pada tahun 2024, capaian TFR meningkat lebih jauh menjadi **112,03%**, menunjukkan peningkatan tren positif, sesuai dengan konsep bahwa angka TFR semakin rendah dianggap semakin baik. **Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri** pada tahun 2023, data capaian tidak tercatat (**n.a**) dan pada tahun 2024, jumlah desa dengan status desa mandiri mencapai **115%** dari target. Capaian ini mencerminkan langkah awal dalam peningkatan desa mandiri.

Sehingga dibandingkan tahun 2023, data capaian tahun 2024 lebih lengkap dan menunjukkan progres yang positif pada indikator yang diukur, terutama pada **iBangga** dan **TFR**. Meski indikator terkait Desa Mandiri baru mulai dicatat pada tahun 2024, capaiannya masih memerlukan perhatian untuk peningkatan di masa depan. Perlu ada evaluasi terhadap indikator yang belum memiliki data tahun 2023 untuk melihat tren keberlanjutan secara komprehensif.

## 3.2 EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut.

### 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 **Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			Data 2023	2024		
1	iBangga (Indeks Pembangunan keluarga)	%	64,64	64,90	0,26%.	
2	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,08	2,12	0,04.	
3	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Desa	17	23	6 desa.	

Data iBangga Tahun 2023 diperoleh atau bersumber dari pemutakhiran data Direktorat Pelaporan dan Statistik BKKBN yang dikeluarkan pada bulan februari 2024 atas capaian iBangga di Kabupaten Belitung Tahun 2023 adalah 64,64% dan data capaian iBangga tersebut termuat dalam jurnal Info Grafik Kinerja Utama Bangga Kencana: Hasil Pemuktahiran Pendataan Keluarga Tahun 2023.

Total Fertility Rate (TFR) pada Tahun 2023 adalah termasuk salah satu indikator utama kinerja sasaran strategis OPD DPPKBPMK Kab. Belitung periode tahun 2018-2023 bersumber dari data capaian indikator kinerja tahun 2023.

Sedangkan data desa dengan status Desa Mandiri pada Tahun 2023 sebanyak 17 Desa bersumber dari Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 14 Juli 2023.

Capaian realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 menunjukkan variasi hasil:

1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga): Terdapat peningkatan sebesar 0,26% dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pembangunan keluarga secara umum.
2. Total Fertility Rate (TFR): Terjadi kenaikan sebesar 0,04 dari 2,08 pada tahun 2023 menjadi 2,12 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan tren yang kurang baik, karena idealnya TFR menurun untuk mendukung target pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Diperlukan evaluasi terhadap program yang memengaruhi penurunan angka kelahiran.

3. Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri: Peningkatan sebanyak 6 desa yang kini berstatus Desa Mandiri merupakan pencapaian yang signifikan. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pembangunan desa dalam meningkatkan kemandirian.

Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan adanya kemajuan pada sebagian besar aspek, namun diperlukan perhatian lebih pada tren angka TFR agar tetap berada dalam target yang diinginkan.

### Analisis Perbandingan

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya realisasi capaian kinerja baik, mengalami peningkatan dan mencapai target, bahkan mampu melampaui dan melebihi target yang telah ditetapkan.

#### 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Renstra

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka berikutnya adalah melakukan perbandingan antara realisasi kinerja dibandingkan dengan RPD yang terdapat dalam target akhir dokumen Renstra PD DPPKBPMD Kabupaten Belitung sebagaimana tabel berikut:

Tabel.3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Target Renstra 2024
		Target	Realisasi	Capaian dalam %	
1	iBangga (Indeks Pembangunan keluarga)	65,32%	64,90%	99,36%.	60,32%
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,41	2,12	112,03%	2,41
6	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	20 Desa	23 Desa	115%.	11 Desa

Capaian indikator kinerja tahun 2024 menunjukkan hasil yang menggembirakan di beberapa sektor:

1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga): Realisasi mencapai 99,36% dari target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pembangunan keluarga hampir memenuhi target Renstra. Hal ini mengindikasikan program berjalan efektif dengan ruang kecil untuk perbaikan lebih lanjut.
2. Total Fertility Rate (TFR): Dengan capaian 112,03% maka 112,03% lebih baik dari target, tren TFR menunjukkan arah positif dengan angka yang semakin menurun. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan dalam upaya menekan angka kelahiran sesuai target pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.
3. Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri: Jumlah desa mandiri melampaui target sebesar 115%, dengan penambahan 3 desa di atas target Renstra. Hal ini mengindikasikan percepatan program pemberdayaan desa yang signifikan dan efektif.

Secara keseluruhan, capaian kinerja menunjukkan tren positif, terutama pada angka TFR dan jumlah desa mandiri, yang telah melampaui target. Namun, peningkatan kecil pada iBangga masih memerlukan perhatian agar target 100% dapat tercapai sepenuhnya di tahun mendatang.

## Analisis Perbandingan

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra PD DPPKBPM Kab. Belitung Tahun 2024-2026, dari 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) PD DPPKBPM Kab. Belitung pada Tahun 2024, 2 diantara indikator kinerja terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang ditetapkan dan 1 indikator pencapaian kerjanya di bawah target, namun masih dalam kriteria sangat baik. Perbandingan antara realisasi kinerja dibandingkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra PD

No.	Indikator Kinerja	Realiasi/Data 2023	Target dan realisasi Tahun 2024 Sesuai Perjanjian Kinerja			Target Renstra Tahun 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
			Target	Realisasi	Capaian dalam %	%	%	%
1	iBangga (Indeks Pembangunan keluarga)	64,64%	65,32%	64,90%	99,36%	60,32%	60,68%	106,955
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,08	2,41	2,12	112,03%	2,41	2,39	112,74
3	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	0,40%	20 Desa	23 Desa	115%	11 Desa	13 Desa	153,85

Untuk perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun Ini dengan target jangka menengah perencanaan strategis perangkat daerah serta perkembangan capaian kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target yang telah disepakati dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra PD Tahun 2024-2026

Tujuan/Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Data Awal Renstra Th 20232	Data Tahun 2023	2024		
				Target Sasaran di Renstra	Target Sasaran di Perjanjian Kinerja	Realisasi
Terwujudnya Program Bangga kencana	iBangga (Indeks Pembangunan keluarga)	n.a	64,64%	60,32%	65,32%	64,90%
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2,42	2,08	2,41	2,41	2,12
Meningkatkan Perkembangan Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	9 desa	17 desa	11 desa	20 desa	23 desa
Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	9 desa	9 desa	11 desa	20 desa	23 desa

Dari data di atas untuk target kinerja Indikator Kinerja Perangkat Daerah berupa Total Fertility Rate (TFR) tahun 2023 dan Tahun 2024 terdapat peningkatan penetapan angka target TFR. Kondisi ini disebabkan karena kurun waktu penyusunan Renstra OPD 2024-2026 adalah pada pertengahan Tahun 2023 sehingga penetapan target indikator kinerja berdasarkan data awal realisasi TFR Tahun 2022 pada angka 2,42.

Hal lain yang berhubungan dengan tingginya penetapan target TFR karena adanya perubahan asumsi demografi dengan maksud untuk penyesuaian target TFR

berdasarkan proyeksi penduduk yang lebih akurat. Hal yang melatarbelakanginya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Adanya perubahan pola keluarga berupa peningkatan kesadaran tentang keluarga berencana, perubahan nilai-nilai sosial, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan reproduksi.
- Adanya peningkatan usia menikah karena perubahan tren usia menikah yang lebih tinggi dapat mempengaruhi angka TFR.
- Adanya perubahan struktur penduduk juga jadi faktor internal dalam penetapan target indikator terkait perubahan proporsi penduduk usia produktif dan tidak produktif.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah: iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) tahun 2024 sebesar 164,90% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 65,32% dengan capaian kinerja 107,59%. iBangga dibentuk dari tiga dimensi yakni: Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Capaian iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: rentan (dibawah 40), berkembang (40-70) dan tangguh (diatas 70).

Pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah 64,64% sedangkan tahun 2024 tercapai 64,90% sehingga ada kenaikan iBangga sebesar 0,26%. Persentase capaian dibandingkan dengan target 2024 didapatkan hasil 99,36% artinya belum mencapai target tahun 2024 yaitu sebesar 65,32 %.

Faktor pendorong pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis (iBangga) adalah :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat: Kampanye kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
2. Penggunaan teknologi: Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat proses pengumpulan data, pemantauan kemajuan, dan evaluasi program.
3. Faktor internal berupa pengawasan dan evaluasi, dimana proses pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memantau kemajuan Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi metode jangka panjang oleh masyarakat dan diibentuknya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS/Satya Gatra) di setiap kecamatan
4. Faktor eksternal seperti adanya dukungan pemerintah pusat berupa Kebijakan dan dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk alokasi DAK Fisik dan DAK Reguler Non Fisik pada Tahun Anggaran 2024

Faktor penghambat pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis (iBangga) adalah

1. Faktor ekonomi, keluarga dengan kondisi ekonomi lemah mungkin lebih sulit mengakses program-program pembangunan keluarga dibandingkan kelompok yang lebih mampu.
2. Ketergantungan Bantuan, dalam beberapa kasus, capaian mungkin disebabkan oleh intervensi bantuan jangka pendek, bukan perubahan sistemik dalam kualitas hidup keluarga.

3. Rendahnya Edukasi Mengenai Indikator iBangga: Masyarakat mungkin kurang memahami aspek-aspek yang menentukan pembangunan keluarga, seperti pola asuh, kesehatan, dan ekonomi keluarga.
4. Keterbatasan Literasi Digital: Jika program iBangga melibatkan teknologi digital, tidak semua keluarga dapat mengakses informasi atau layanan karena keterbatasan literasi teknologi.
5. Masalah gizi buruk atau kesehatan ibu dan anak di tingkat akar rumput tetap dapat menjadi kendala dalam pembangunan keluarga
6. Faktor demografi, mobilitas penduduk yinggi: Perpindahan penduduk (migrasi) bisa memengaruhi capaian indikator di wilayah tertentu.
7. Pemahaman Kader IMP terhadap program pembangunan keluarga masih rendah.

Solusi yang bisa diterapkan dalam menghadapi hambatan pencapaian indikator kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Pendalaman Analisis Data: Lakukan evaluasi mendalam untuk memahami kesenjangan antara angka capaian dan kondisi di lapangan.
  2. Pemerataan Layanan: Tingkatkan distribusi program ke daerah yang capaian kinerjanya masih rendah meskipun angka nasional tinggi.
  3. Peningkatan Kolaborasi: Perkuat sinergi antar instansi untuk memastikan setiap program pembangunan keluarga saling mendukung.
  4. Penguatan Edukasi: Sosialisasikan indikator iBangga dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat di semua lapisan.
  5. Monitoring Berkelanjutan: Lakukan monitoring berbasis data secara berkala untuk memastikan program tidak hanya menghasilkan angka capaian, tetapi juga dampak nyata di masyarakat.
  6. Melaksanakan Pembinaan Kader IMP dan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK R) di desa/kelurahan.
  7. Melakukan Pembinaan Kepada PKB dan PLKB untuk mengembangkan Satya Gatra di wilayah kerjanya.
  8. Melakukan Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dan Rumah Data Kependudukan.
2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Stategis Perangkat Daerah: Total Fertility Rate (TFR) tahun 2024 sebesar 2,12% dari target yang ditetapkan sebesar 2,41 % . *Total Fertility Rate (TFR)* adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu). Tahun 2023 Total Fertility Rate (TFR) berada di angka 2,08 sedangkan tahun 2024 di angka 2,12 sehingga ada kenaikan Total Fertility Rate (TFR) sebesar 0,04. Akan tetapi kenaikan tersebut bukanlah menjadi hal yang buruk dikarenakan target Nasional untuk angka Total Fertility Rate (TFR) dijaga tetap di angka 2,1 sebagai upaya untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan menghindari *population stagnation*. Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja indikator Sasaran Strategis (TFR) adalah:
1. Meningkatnya pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap pentingnya perencanaan dalam berkeluarga;

2. Meningkatnya peran serta tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan Insitusi Masyarakat Pedesaan) dalam melaksanakan promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana);
3. Berfungsinya Balai Penyuluhan KB di setiap kecamatan sebagai tempat promosi dan KIE program Bangga Kencana secara maksimal;

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja indikator adalah

1. Masih tingginya jumlah angka pernikahan dan kelahiran pada usia remaja (15-19 tahun) di Kabupaten Belitung.
2. Rendahnya Kesadaran atau kurangnya edukasi masyarakat mengenai manfaat keluarga berencana dapat memengaruhi tingkat adopsi program pengendalian fertilitas

Solusi yang bisa diterapkan dalam menghadapi hambatan pencapaian indikator kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Melalui kampanye dan penyuluhan terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
2. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan: Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ke daerah terpencil.
3. Program Inovatif: Menggunakan teknologi seperti aplikasi kesehatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
4. Pendekatan Kultural: Melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk mendukung program pengendalian fertilitas.
5. Evaluasi dan Pemantauan Program: Melakukan evaluasi rutin untuk mengetahui efektivitas program yang sudah berjalan.

3. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah: Jumlah Desa dengan IDM Desa Mandiri dengan definisi operasional : Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155. Berdasarkan keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024 pada tahun 2024 ada 23 Desa yang berstatus Desa Mandiri di kabupaten Belitung, meningkat dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 20 Desa yang berstatus Desa Mandiri

Faktor Pendorong pencapaian Indikator Kinerja adalah :

3. Komitmen Pemerintah Daerah: Keseriusan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya, dana, dan tenaga untuk mendorong desa mencapai status mandiri.
4. Pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi desa
5. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): BUMDes menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan menciptakan sumber pendapatan dan membuka lapangan kerja
6. Pemanfaatan data dan evaluasi yang berbasis bukti dalam hal ini IDM Sebagai Panduan, Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan sebagai alat ukur dan panduan untuk merancang program yang relevan dengan kebutuhan desa. Dan monitoring evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Faktor Penghambat Capaian indicator kinerja adalah:

1. Faktor Infrastruktur, seperti Infrastruktur Dasar yang Belum Memadai karena Beberapa desa masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Akses Digital yang Terbatas karena Kurangnya akses terhadap teknologi dan internet menghambat digitalisasi administrasi dan inovasi desa. Jarak Geografis: Desa terpencil atau sulit dijangkau menghadapi hambatan logistik yang menghambat pembangunan dan implementasi program.
2. Pemahaman Pemerintah Desa dalam pengisian kuesioner IDM
3. Kuesioner IDM yang berubah - ubah setiap tahun
4. Ketersediaan sarana dan prasarana social dasar seperti Fasilitas Pendidikan wajib 9 tahun, Kesehatan , Pasar Desa dan lembaga perbankan di desa serta kesadaran terhadap mitigasi bencana (penganggaran mitigasi Bencana di desa) yang belum merata di setiap desa

Solusi yang bisa diterapkan dalam menghadapi hambatan pencapaian indikator kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM: Mengadakan pelatihan dan pendampingan intensif bagi perangkat desa dan masyarakat untuk memahami dan mengelola program pembangunan.
2. Optimalisasi Penggunaan Dana Desa: Mengarahkan anggaran ke program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
3. Peningkatan Infrastruktur: Memastikan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh desa, termasuk akses internet dan transportasi.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator dan memberikan intervensi tepat waktu.
5. Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program.
6. Penguatan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan: Memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, desa, dan mitra pembangunan lainnya.

### **3.2.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/ RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas**

Ada beberapa capaian kinerja pada DPPKBPM Kab. Belitung apabila dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas tidak bisa diperbandingkan untuk capaiannya karena tidak ada standar nasional pada beberapa indikator dan dalam menentukan rumusan indikator dan formula perhitungannya berbeda-beda. Sebagai perbandingan realisasi kinerja sasaran 1 dan 2 dengan pencapaian indikator sasaran strategis dan sasaran program BKKBN Tahun 2023 seperti berikut:

Tabel 3.9 Pencapaian Indikator Sasaran Strategis dan Sasaran Program BKKBN Tahun 2023

Sasaran Strategis/Program	Indikator Sasaran Strategis/Program	Satuan	Target	Realisasi	Rasio Capaian (%)	Polarisasi Capaian	Status Capaian		
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per wanita	2,19	2,14	102,3	Minimize	 Sangat baik
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	2	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i> )	Persen	62,92	60,4	96,0	Maximize	 Sangat baik
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>Unmetneed</i> )	Persen	7,70	11,5	50,6	Minimize	 Kurang
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i> )	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	20	19,7	101,5	Minimize	 Sangat baik
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (skala 1-100)	59	61,43	104,1	Maximize	 Sangat baik
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	22,1	22,3	100,9	Maximize	 Sangat baik
7	Terwujudnya SDM Aparatur dan Tenaga Program Bangsa Bangga Kencana, Penelitian dan	7	Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten	Persen	75	82	109,3	Maximize	 Sangat baik
		8	Persentase Kerjasama Internasional Bangsa Kencana yang diimplementasikan	Persen	85	100	118	Maximize	 Sangat baik

Sumber : LKIP BKKBN 2023

Sedangkan untuk target indikator kinerja sasaran strategis BKKBN Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Realisasi untuk capaian indikator kinerja sasaran strategis BKKBN Tahun 2024 belum dirilis karena masih dalam tahap penyusunan laporan. Sedangkan untuk Pencapaian Indikator Sasaran Strategis dan Sasaran Program Perwakilan BKKBN Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Sasaran Strategis dan Sasaran Program Perwakilan BKKBN Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2023	Persentase	Sumber Data
1	Menurunnya angka kelahiran total	Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) per WUS usia 15-49 Tahun	2,29 Rata-rata anak per Wanita	2,18 Rata-rata anak per Wanita	105%	PK 2023
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i> )	69,3%	67,5%	97,40 %	PK 2023
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	10,65%	9,1%	117,03 %	PK 2023
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i> )	23 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	35,6 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	64,61 %	PK 2023
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62,44 (Skala 0-100)	60,36 (Skala 0-100)	96,67 %	PK 2023
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	21 Tahun	20,4 tahun	97,14 %	PK 2023

Sumber : LAKIP Perwakilan BKKBN Prov. Kep. Babel 2023

Untuk perbandingan capaian sasaran strategis 3 dan 4 dengan standar nasional serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas seperti berikut ini:

**Tabel 3.11 Target dan Realisasi Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju (2024-2026) di Kab. Belitung**

	2024	2025	2026
Target RPJMD	11 Desa		
Target Renstra	11 Desa		
Realisasi	23 Desa		
Capaian	209,09		
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20 Desa		
Realisasi	23 Desa		
Capaian	115%		

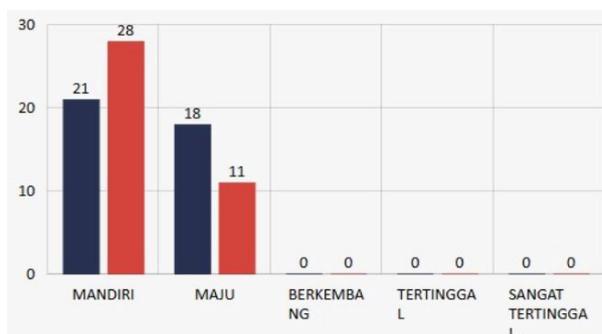
**Tabel 3.12 Data Capaian IDM Tahun 2023-2024 Per Kecamatan di Kab. Belitung**

NO	KECAMATAN	IDM TAHUN 2023			IDM TAHUN 2024		
		DESA MANDIRI	DESA MAJU	DESA BERKEMBANG	DESA MANDIRI	DESA MAJU	DESA BERKEMBANG
1	TANJUNGPANDAN	2	7	0	2	7	0
2	MEMBALONG	8	3	1	10	1	1
3	SIJUK	2	8	0	4	6	0
4	SELAT NASIK	2	1	1	3	1	0
5	BADAU	3	4	0	4	3	0
<b>JUMLAH</b>		17	23	2	23	18	1
<b>JUMLAH DESA</b>		42			42		

Sumber: Kepmendes Nomor 80 Tahun 2022 dan Kepmendes Nomor 175 Tahun 2023

Dalam rangka melakukan evaluasi dan sebagai pembandingan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa perlu melakukan pembandingan terhadap kabupaten lain yang letak geografis dan kemiripan dalam hal ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan, yaitu Kabupaten Belitung Timur tahun 2024-2026 adalah :

**Tabel 3.13 Perbandingan Capaian IDM Status Desa Kab. Belitung Timur (2023-2024)**



	2023		2024	
MANDIRI	21	53.85%	28	71.79%
MAJU	18	46.15%	11	28.21%
BERKEMBANG	0	0.00%	0	0.00%
TERTINGGAL	0	0.00%	0	0.00%
SANGAT TERTINGGAL	0	0.00%	0	0.00%

Sumber: Dinas KB dan PMD Kab. Belitung Timur 2024

Sedangkan gambarkan untuk komponen Indeks Desa Membangun di Kab. Belitung Timur sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14 Komponen Indeks Desa Membangun di Kab. Belitung Timur

NO	ID KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	INPUTAN BELUM SELESAI	BELUM VERIFIKASI	SUDAH DIVERIFIKASI	PERSENTASE	APBDES	DANA DESA	PENDUDUK	KK MISKIN	LUAS WIL (Ha)
1	190601	MANGGAR	9	0	0	9	 100%	22.869.317.846	9.291.263.000	40.779	958	22.900,00
2	190602	GANTUNG	7	0	0	7	 100%	26.261.463.254	7.725.234.000	28.325	935	54.630,00
3	190603	DENDANG	4	0	0	4	 100%	15.047.403.111	3.844.854.000	10.850	644	40.920,17
4	190604	KELAPA KAMPIT	6	0	0	6	 100%	15.111.335.921	6.156.579.000	18.014	1.210	49.755,00
5	190605	DAMAR	5	0	0	5	 100%	16.856.503.449	4.522.261.000	13.659	842	26.868,00

Sumber: Dinas KB dan PMD Kab. Belitung Timur 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat secara umum dapat dilihat bahwa pencapaian Status Indeks Desa Membangun (IDM) Desa sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat seperti berikut:

1. Faktor pendukung dalam peningkatan status IDM di Desa antara lain:

- a. Letak Geografis Desa Secara geografis jika lokasi Desa terletak di jalur yang mudah diakses, tidak jauh dari ibukota Kecamatan dapat menjadi salah satu pendukung dalam percepatan perubahan status Desa. Dengan demikian, sama sekali tidak ada kesulitan untuk akses jalan menuju desa, baik untuk pengangkutan bahan atau material maupun untuk akses perekonomian masyarakat.
- b. Adanya Pendampingan Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan Dana Desa, Pendampingan baik dari pihak pemerintah kabupaten, kecamatan maupun dari tenaga pendamping profesional yang terdiri dari Pendamping Desa dan Pendamping Loka Desa yang selalu aktif mendampingi dan membantu pemerintah desa.
- c. Keuangan Desa, Untuk mendukung pembangunan di desa, Semakin baik pengelolaan Dana Desa akan berdampak pada IDM Desa meningkat, karena Dana Desa yang merupakan dana yang sumbernya berasal dari APBN, yang kemudian ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang nantinya bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan-kegiatan Desa seperti program pembangunan, pemberdayaan serta pemerintahan desa. Dana Desa dapat meningkatkan status desa menjadi desa yang mandiri dalam bidang ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan. Kemampuan dan keberhasilan desa dalam meningkatkan kemandiriannya dapat diukur melalui IDM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Kejelasan status Indeks Desa Membangun akan mempermudah para pemangku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan terutama pemerintah dan masyarakat Desa itu sendiri serta untuk pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi dan kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

2. Faktor Penghambat Upaya meningkatkan status IDM,

- a. Faktor Prioritas Penggunaan Dana Desa Indikator untuk meningkatkan IDM sangat banyak. Namun terkadang dengan jumlah dana desa yang digulirkan pemerintah Pusat ke Desa ditambah aturan atas Prioritas Penggunaan Dana Desa sangat tidak

memungkinkan Pemerintah desa dalam menganggarkan kegiatan yang merupakan kelemahan desa dalam Indikator dalam IDM.

- b. Faktor Sumber Daya Manusia. Program pembangunan yang di rencanakan oleh Desa bersama masyarakat belum semua menyentuh indikator-indikator IDM. Pada saat musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan, masyarakat masih mengutamakan pembangunan fisik saja, sementara pembangunan non fisik terkadang kurang diprioritaskan. Padahal pengukuran IDM yang dilakukan setiap tahun bukan hanya berbicara fisik saja, tapi pembangunan non fisik seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan lainnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya SDM yang ada baik di masyarakat maupun di internal penyelenggara pemerintah desa yang terkadang tidak begitu menghiraukan hal tersebut, yang penting bagi mereka adalah ada kegiatan pembangunan yang masuk di wilayah dan lingkungannya.

### 3.2.4 Review atas Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024-2026

Tahun 2024 adalah tahun pertama dalam periode RPD Kabupaten Belitung 2024-2026, maupun Periode Renstra PD Tahu 2024-2026. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi adalah dengan melakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja DPPKBPMK Kabupaten Belitung Tahun 2024 dengan realisasi dan capaian kinerja pada tahun periode Rencana Strategis DPPKBPMK Kab. Belitung tahun 2024-2026. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja DPPKBPMK Kabupaten Belitung Tahun 2024 akan disandingkan dengan data awal 2022 sesuai data pada saat penyusunan Renstra 2024-2026 dan data tahun 2023 yang berasal dari berbagai sumber, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 15 **Review dan Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024-2026**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2022	Data 2023	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
Terwujudnya Program Bangga Kencana	iBangga (Indeks Pembangunan keluarga)	n.a	64,64%	64,90%			99,36%		
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2,42	2,08	2,12			112,03%		
Meningkatkan Perkembangan Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	9 desa	17 desa	23 desa			115%		
Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	9 desa	17 desa	23 desa			115%		

Data iBangga (Indeks Pembangunan keluarga) Tahun 2023 bersumber dari Direktorat Pelaporan dan Statistik BKKBN termuat dalam Jurnal Info Grafik Kinerja Utama Bangga Kencana: Hasil Pemuktahiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 yang dikeluarkan bulan Februari 2024

Data Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 14 Juli 2023

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja DPPKBPM Kab. Belitung Tahun 2024 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3. 16 **Capaian Indikator Kinerja DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2024 Berdasarkan Persentase**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	-
>100	Melebihi target	2

Dengan demikian terdapat 1(satu) indikator kinerja sasaran strategis (Terwujudnya Program Bangga kencana) yang tidak memenuhi capaian target kinerja yakni:

- **iBangga (Indeks Pembangunan keluarga)** dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 65,32% hanya tercapai sebesar 64,90% atau setara dengan capaian 99,36% dari target yang ditetapkan, tapi masih dalam kategori pencapaian yang sangat baik.

Ada 2 (dua) indikator kinerja yang pencapaian kerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu:

1. **Total Fertility Rate (TFR)** yang merupakan indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Keluarga Berencana dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 2,41% dengan realisasi capaian sebesar 2,12% melebihi 12,03% dari target capaian atau setara dengan capaian 112,03% dari target yang ditetapkan dan masuk kategori pencapaian sangat baik.
2. **Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri** merupakan indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Perkembangan Desa Mandiri dan Meningkatkan Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa pada tahun 2024 adalah sebanyak 23 desa melebihi target yang ditetapkan sebanyak 20 desa. Persentase capaiannya melebihi 15% atau setara 115% dari target yang ditetapkan dan masuk kategori pencapaian sangat baik.

Jika dilihat berdasarkan katagori maka capaian kinerja utama DPPKBPM Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.17 **Capaian Indikator Kinerja DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2024 Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	91% ≤ 100%	3
2	Baik	76% ≤ 90%	0
3	Cukup	66% ≤ 75%	0
4	Kurang	51% ≤ 65%	0
5	Sangat kurang	≤ 50%	0

Dari Table 3.13 diperoleh gambaran bahwa secara umum seluruh indikator kinerja DPPKBPM Kabupaten Belitung pada Tahun 2024 berada pada katagori "*Sangat Baik*" (nilai capaian 91% ≤ 100%)

Dengan 4 tujuan/sasaran strategis dan 3 indikator kinerja yang ditargetkan PD DPPKBPM Kabupaten Belitung dapat merealisasikan capaian untuk masing-masing sasaran strategis sebanyak 2 indikator tercapai melebihi target dan 1 indikator masih

berada di bawah target yang ditetapkan manun masuk pada kategori *sangat baik*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini:

**Tabel 3.18 Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran PD DPPKBPM Kabupatn Belitung Berdasarakan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran %	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	99,36%.	Sangat Baik
2	Sasaran Strategis 2	1	112,03%	Sangat Baik
3	Sasaran Strategis 3	1	115%.	Sangat Baik
4	Sasaran Strategis 4	1	115%.	Sangat Baik

\*Keterangan : Indikator kinerja Sasaran Strategis 3 dan 4 adalah sama yaitu: Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri

Berdasarkan nilai skor yang diperoleh secara keseluruhan capaian kinerja PD DPPKBPM Kabupatn Belitung berada dalam kategori *sangat baik* untuk semua indikator dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.19 berikut:

**Tabel 3.19 Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran PD DPPKBPM Kabupatn Belitung Berdasarakan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	≤ 50% Sangat kurang	51% ≤ 65% Kurang	66% ≤ 75% Cukup	76% ≤ 90% Baik	91% ≤ 100% sangat baik
1.	Sasaran Strategis 1	1	99,36%.					√
2.	Sasaran Strategis 2	1	112,03%					√
3.	Sasaran Strategis 3	1	115%.					√
4.	Sasaran Strategis 4	1	115%.					√

Pencapaian target tujuan/sasaran strategis PD DPPKBPM Kabupatn Belitung Tahun 2024 masing-masing sasaran strategis sebagai berikut: 1 indikator tujuan/sasaran strategis satu dan 1 indikator kinerja tujuan/sasaran strategis dua serta 2 indikator tujuan/sasaran strategis 3 dan 4 mencapai kategori sangat baik ( $91\% \leq 100\%$ ), sedangkan Untuk pencapaian target tujuan/sasaran strategis pada DP DPPKBPM Kabupatn Belitung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.22 berikut:

**Tabel 3.20 Pencapaian Target Tujuan/Sasaran Strategis PD DPPKBPM Kabupatn Belitung Berdasarakan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Sasaran Strategis 1	1	99,36%.	-	-	-	-	1	99,36%.
2.	Sasaran Strategis 2	1	112,03%	1	112,03%	-	-	-	-
3.	Sasaran Strategis 3	1	115%.	1	115%.	-	-	-	-
4.	Sasaran Strategis 4	1	115%.	1	115%.	-	-	-	-

Secara keseluruhan, dari empat sasaran strategis yang ditetapkan, tiga di antaranya berhasil melampaui target (>100%), sedangkan satu sasaran hampir mencapai target (99,36%). Dengan demikian, kinerja PD DPPKBPM Kabupatn Belitung tahun 2024 dapat dikategorikan sangat baik, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.

**Sasaran Strategis 1** memiliki satu indikator pencapaian dengan realisasi sebesar 99,36%, yang berarti pencapaian ini berada sedikit di bawah target yang ditetapkan (100%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sasaran hampir terpenuhi, masih terdapat sedikit kekurangan yang perlu diperhatikan untuk optimalisasi kinerja di masa mendatang.

**Sasaran Strategis 2** menunjukkan pencapaian **112,03%**, yang berarti melebihi target yang telah ditetapkan, keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program yang dijalankan serta kinerja yang melampaui ekspektasi.

**Sasaran Strategis 3**, pencapaian kinerja pada sasaran ini mencapai **115%**, menunjukkan bahwa target telah terlampaui dengan cukup signifikan, Keberhasilan ini dapat menjadi referensi dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan serta strategi yang telah diterapkan.

**Sasaran Strategis 4**, sama seperti sasaran strategis sebelumnya, pencapaian kinerja mencapai **115%**, yang berarti melebihi target, ini menandakan bahwa strategi dan program kerja yang diterapkan telah berjalan dengan sangat baik dan melebihi ekspektasi.

Keberhasilan ini perlu terus dijaga dengan melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mendukung pencapaian target, serta mengidentifikasi kendala yang menyebabkan sasaran strategis pertama belum mencapai target sepenuhnya. Langkah-langkah strategis yang telah terbukti efektif dapat diperkuat untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.

### 3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis DPPKBPM Kab. Belitung dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

#### Sasaran 1 : Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang

Rata-rata hasil capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
iBangga (indeks Pembangunan Keluarga)	%	65,32	64,90	99,36%.
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran				99,36%.

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.22 **Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2023	2024		
1	iBangga (indeks Pembangunan Keluarga)	%	64,64	64,90	0,26	iBangga meningkat 0,26 % pada th 2024 di banding tahun 2023

iBangga dibentuk dari tiga dimensi yakni: Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Capaian iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: rentan (dibawah 40), berkembang (40-70) dan tangguh (diatas 70). Berdasarkan data perbandingan capaian kinerja antara tahun 2023 dan 2024, Persentase capaian dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 didapatkan hasil 99,36% artinya belum mencapai target tahun 2024 yaitu sebesar 65,32 % dan pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah 64,64% sedangkan tahun 2024 tercapai 64,90% sehingga ada kenaikan iBangga sebesar 0,26%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan dalam indeks pembangunan keluarga (**iBangga**) menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek pembangunan keluarga, yang dapat disebabkan oleh implementasi program-program strategis yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Belitung. Meskipun peningkatannya masih tergolong kecil, tren positif ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam mencapai target pembangunan keluarga. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan ini serta langkah-langkah optimalisasi guna mempercepat peningkatan capaian di tahun-tahun mendatang

Gambar 1.4 **iBangga (indeks Pembangunan Keluarga di Kab. Belitung tahun 2022-2024**



Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan aspek ketahanan dan kualitas keluarga. iBangga menjadi salah satu alat evaluasi dalam mengukur keberhasilan Program **Bangga Kencana** (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang dicanangkan oleh BKKBN. iBangga memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Bangga Kencana karena iBangga sangat membantu menilai sejauh mana keluarga telah memenuhi indikator ketahanan dan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketahanan sosial. Data dari iBangga digunakan

sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan keluarga yang lebih efektif dan berbasis bukti. Pemerintah dapat merancang program intervensi yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga di berbagai wilayah.

Dengan adanya iBangga, pemerintah dapat melihat dampak dari program Bangga Kencana dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan evaluasi ini membantu dalam melakukan perbaikan atau penyesuaian strategi agar lebih optimal. Data iBangga dapat dijadikan indikator bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Keluarga karena program Bangga Kencana bertujuan untuk membangun keluarga yang berkualitas dan berketahanan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga dengan meningkatnya iBangga, berarti ada peningkatan ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Selain dari itu iBangga berkontribusi terhadap pencapaian **Sustainable Development Goals (SDGs)**, terutama dalam aspek kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.

Kegunaan lain data iBangga dalam Implementasi Program Bangga Kencana antara lain adalah:

- Identifikasi Wilayah Prioritas → iBangga membantu menentukan daerah yang membutuhkan intervensi lebih intensif dalam program Bangga Kencana.
- Pemantauan Tren Perkembangan Kesejahteraan Keluarga → Dengan membandingkan capaian iBangga dari tahun ke tahun, pemerintah dapat menilai efektivitas program yang dijalankan.
- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat → iBangga dapat digunakan sebagai alat sosialisasi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pembangunan keluarga yang berkualitas.

### **Kesimpulan**

iBangga berfungsi sebagai alat ukur yang sangat bermanfaat dalam mendukung keberhasilan Program Bangga Kencana. Dengan memanfaatkan iBangga, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam menciptakan keluarga yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkualitas di masa depan.

Faktor pendorong pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis (iBangga) adalah :

- Peningkatan kesadaran masyarakat: Kampanye kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
- Penggunaan teknologi: Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat proses pengumpulan data, pemantauan kemajuan, dan evaluasi program.
- Faktor internal berupa pengawasan dan evaluasi, dimana proses pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memantau kemajuan Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi metode jangka panjang oleh masyarakat dan diibentuknya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS/Satya Gatra) di setiap kecamatan
- Faktor eksternal seperti adanya dukungan pemerintah pusat berupa Kebijakan dan dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk alokasi DAK Fisik dan DAK Reguler Non Fisik pada Tahun Anggaran 2024

Faktor penghambat pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis (iBangga) adalah

- Faktor ekonomi, keluarga dengan kondisi ekonomi lemah mungkin lebih sulit mengakses program-program pembangunan keluarga dibandingkan kelompok yang lebih mampu.

- Ketergantungan Bantuan, dalam beberapa kasus, capaian mungkin disebabkan oleh intervensi bantuan jangka pendek, bukan perubahan sistemik dalam kualitas hidup keluarga.
- Rendahnya Edukasi Mengenai Indikator iBangga: Masyarakat mungkin kurang memahami aspek-aspek yang menentukan pembangunan keluarga, seperti pola asuh, kesehatan, dan ekonomi keluarga.
- Keterbatasan Literasi Digital: Jika program iBangga melibatkan teknologi digital, tidak semua keluarga dapat mengakses informasi atau layanan karena keterbatasan literasi teknologi.
- Masalah gizi buruk atau kesehatan ibu dan anak di tingkat akar rumput tetap dapat menjadi kendala dalam pembangunan keluarga
- Faktor demografi, mobilitas penduduk yinggi: Perpindahan penduduk (migrasi) bisa memengaruhi capaian indikator di wilayah tertentu.
- Pemahaman Kader IMP terhadap program pembangunan keluarga masih rendah.

Solusi yang bisa diterapkan dalam menghadapi hambatan pencapaian indikator kinerja, antara lain sebagai berikut:

- Pendalaman Analisis Data: Lakukan evaluasi mendalam untuk memahami kesenjangan antara angka capaian dan kondisi di lapangan.
- Pemerataan Layanan: Tingkatkan distribusi program ke daerah yang capaian kinerjanya masih rendah meskipun angka nasional tinggi.
- Peningkatan Kolaborasi: Perkuat sinergi antar instansi untuk memastikan setiap program pembangunan keluarga saling mendukung.
- Penguatan Edukasi: Sosialisasikan indikator iBangga dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat di semua lapisan.
- Monitoring Berkelanjutan: Lakukan monitoring berbasis data secara berkala untuk memastikan program tidak hanya menghasilkan angka capaian, tetapi juga dampak nyata di masyarakat.
- Melaksanakan Pembinaan Kader IMP dan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK R) di desa/kelurahan.
- Melakukan Pembinaan Kepada PKB dan PLKB untuk mengembangkan Satya Gatra di wilayah kerjanya.
- Melakukan Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dan Rumah Data Kependudukan.

## Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas keluarga Berencana

Rata-rata hasil capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,41	2,12	112,03%
<b>Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran</b>				<b>112,03%</b>

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.24 **Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2023	2024		
1	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,08	2,12	-0,4	TFR pada tahun 2024 menurun 0,4 dari angka pada tahun sebelumnya

**Total Fertility Rate (TFR)** adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun), dengan asumsi bahwa ibu mengalami tingkat kelahiran spesifik usia (Age-Specific Fertility Rate/ASFR) yang berlaku pada suatu periode tertentu.

Dari kedua data di atas untuk target kinerja Indikator Kinerja Perangkat Daerah berupa Total Fertility Rate (TFR) tahun 2023 dan Tahun 2024 terdapat peningkatan penetapan angka target TFR. Kondisi ini disebabkan karena kurun waktu penyusunan Renstra OPD 2024-2026 adalah pada pertengahan Tahun 2023 sehingga penetapan target indikator kinerja berdasarkan data awal realisasi TFR Tahun 2021 pada angka 2,42.

Hal lain yang berhubungan dengan tingginya penetapan TFR karena adanya perubahan asumsi demografi dengan maksud untuk penyesuaian target TFR berdasarkan proyeksi penduduk yang lebih akurat. Hal yang melatarbelakanginya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

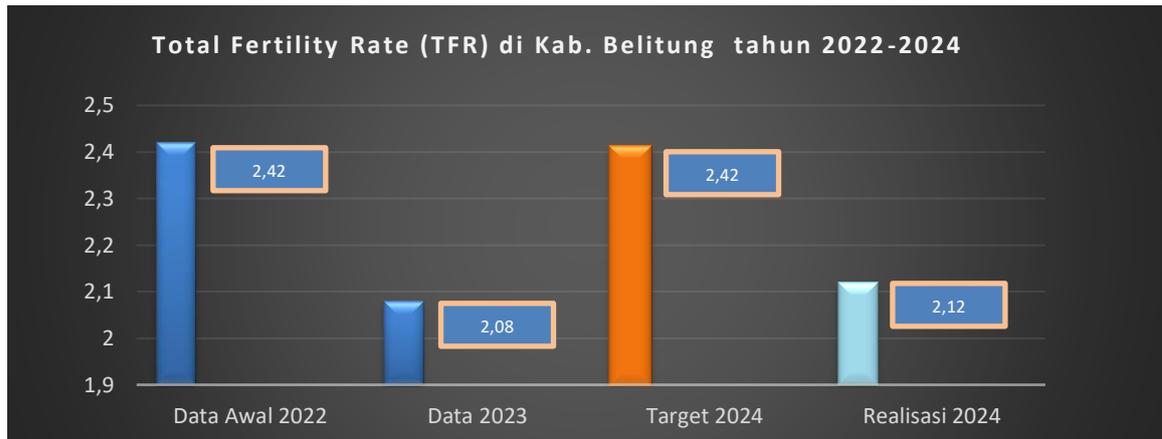
- Adanya perubahan pola keluarga berupa peningkatan kesadaran tentang keluarga berencana, perubahan nilai-nilai sosial, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan reproduksi.
- Adanya peningkatan usia menikah karena perubahan tren usia menikah yang lebih tinggi dapat mempengaruhi angka TFR.
- Adanya perubahan struktur penduduk juga jadi faktor internal dalam penetapan target indikator terkait perubahan proporsi penduduk usia produktif dan tidak produktif.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah: Total Fertility Rate (TFR) tahun 2024 sebesar 2,12 dalam angka, dari target yang ditetapkan sebesar 2,41 dalam angka. *Total Fertility Rate (TFR)* adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu).

Tahun 2023 Total Fertility Rate (TFR) berada di angka 2,08 sedangkan tahun 2024 di angka 2,12 sehingga ada kenaikan Total Fertility Rate (TFR) sebesar 0,04. Akan tetapi kenaikan tersebut bukanlah menjadi hal yang buruk dikarenakan target Nasional untuk angka Total Fertility Rate (TFR) dijaga tetap di angka 2,1 sebagai upaya untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan menghindari *population stagnation*.

Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 2,12 telah melebihi target Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2024 dan Target TRF pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 2,41 sehingga dapat dilihat perkembangannya sebagai berikut

Gambar 1.5 Total Fertility Rate (TFR) di Kab. Belitung tahun 2022-2024



Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja indikator Sasaran Strategis (TFR) adalah:

- Meningkatnya pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap pentingnya perencanaan dalam berkeluarga;
- Meningkatnya peran serta tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan Insitusi Masyarakat Pedesaan) dalam melaksanakan promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana);
- Berfungsinya Balai Penyuluhan KB di setiap kecamatan sebagai tempat promosi dan KIE program Bangga Kencana secara maksimal;

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja indikator adalah

- Masih tingginya jumlah angka pernikahan dan kelahiran pada usia remaja (15-19 tahun) di Kabupaten Belitung.
- Rendahnya Kesadaran atau kurangnya edukasi masyarakat mengenai manfaat keluarga berencana dapat memengaruhi tingkat adopsi program pengendalian fertilitas

Solusi yang bisa diterapkan dalam menghadapi hambatan pencapaian indikator kinerja, antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Melalui kampanye dan penyuluhan terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- Peningkatan Akses Layanan Kesehatan: Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ke daerah terpencil.
- Program Inovatif: Menggunakan teknologi seperti aplikasi kesehatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
- Pendekatan Kultural: Melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk mendukung program pengendalian fertilitas.
- Evaluasi dan Pemantauan Program: Melakukan evaluasi rutin untuk mengetahui efektivitas program yang sudah berjalan.

Untuk mengupayakan pencapaian tujuan/sasaran strategis 1 dan 2 PD DPPKBPMD Kab. Belitung melaksanakan program-program, yaitu:

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pencapaian indikator kinerja program-program tersebut pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Program Pengendalian Penduduk	Unmet need	11,95%	7,10%	140,59%	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,50%	16,87%	116,34%	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase PUS Ber KB	75,05%	77,85%	103,03%	

1. Program Pengendalian Penduduk, indikator kinerjanya adalah **Unmet Neet** 2024 adalah sebesar 7,10% atau sebesar 140,59% dari target yang ditetapkan sebesar 11,95% persen dengan menggunakan Definisi Operasional : Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani /Jumlah PUS x 100%. Unmet need di tahun 2024 mengalami penurunan kembli jika di dibandingkan dengan relaisasi tahun 2023 sebesar 7.40%, akan tetapi hal tersebut berarti baik karena PUS yg tidak ingin anak lagi & ingin anak ditunda yang sebelumnya belum ber-KB, di tahun 2024 mengikuti program KB

Faktor Pendorong Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja adalah:

- Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi: Kampanye yang lebih masif dan efektif mengenai pentingnya KB, baik melalui media digital maupun pendekatan langsung di komunitas, berhasil meningkatkan kesadaran PUS akan manfaat KB.
- Akses Pelayanan KB yang Lebih Baik: Penyediaan layanan KB yang lebih terjangkau, baik dari segi lokasi maupun biaya, serta peningkatan jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil, turut mendorong peningkatan cakupan pelayanan.
- Dukungan Kebijakan Pemerintah: Adanya kebijakan dan anggaran pemerintah yang mendukung program KB, seperti subsidi alat kontrasepsi dan pelatihan kader kesehatan, memperkuat implementasi program KB di tingkat masyarakat.

Faktor Penghambat Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja adalah

- Ketimpangan Akses di Daerah Tertentu: Meskipun akses pelayanan KB membaik, beberapa daerah terpencil masih menghadapi kendala infrastruktur, sehingga menyulitkan distribusi alat kontrasepsi dan tenaga kesehatan.
- Hambatan Sosial dan Budaya: Adanya stigma atau keyakinan tertentu yang masih melekat di masyarakat menjadi penghalang bagi sebagian PUS untuk menggunakan KB.
- Keterbatasan Informasi: Masih ada PUS yang kurang memahami opsi dan manfaat KB akibat minimnya informasi atau edukasi di wilayah tertentu.

Jika akses pelayanan dan edukasi ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah, jumlah PUS yang tidak terlayani dapat berkurang lebih cepat. Jumlah Petugas Lapangan Penyuluh KB dengan rasio ideal terhadap jumlah wilayah binaan terpenuhi dan peningkatan akses di wilayah terpencil dapat menurunkan unmet need sebesar 1% dari total populasi PUS di wilayah tersebut, maka secara keseluruhan tingkat unmet need nasional dapat turun hingga di bawah 7% di tahun berikutnya. Sebaliknya, jika hambatan sosial budaya tidak ditangani secara efektif,

penurunan unmet need akan berjalan lebih lambat meskipun layanan telah ditingkatkan.

Dengan demikian, capaian tahun 2024 menunjukkan tren yang positif, tetapi keberlanjutan pencapaian ini membutuhkan upaya terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi berbagai hambatan yang masih ada.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), indikator kinerjanya adalah **Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)** capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 16,87% melampaui target yang ditetapkan yaitu 14,50% dan meningkat 2,44% dari realisasi capaian tahun 2023 adalah sebesar 14,43% . Adapun persentase capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 116,34% dari target yang ditetapkan sebesar 14,50% persen dan Definisi Operasional : Peserta KB Aktif MKJP/Peserta KB Aktif x 100%

Keberhasilan capaian kinerja indikator Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan hasil dari berbagai upaya strategis yang telah dilakukan. Adapun faktor-faktor pendorong keberhasilan ini meliputi:

1. **Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat**

Program edukasi tentang manfaat dan keunggulan MKJP dilakukan secara intensif melalui penyuluhan oleh petugas keluarga berencana (PKB), kader, dan tenaga kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk melalui media sosial. Hal ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga.

2. **Akses Pelayanan yang Mudah dan Terjangkau**

Tersedianya layanan kontrasepsi di berbagai fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas, dan klinik swasta, dengan biaya yang terjangkau atau gratis, mempermudah masyarakat untuk mengakses MKJP. Selain itu, pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh petugas kesehatan menjangkau wilayah terpencil sehingga partisipasi masyarakat semakin meningkat.

3. **Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan**

Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat turut memperkuat implementasi program KB. Sinergi ini menciptakan dukungan yang kuat dalam pelaksanaan dan promosi MKJP.

4. **Adanya Program Inovasi**

Pemerintah Kabupaten Belitung meluncurkan berbagai inovasi, seperti kampanye kampanye tentang MKJP melalui KIE Tradisional seperti pada pertunjukan kesenian Belitung pada acara-acara besar juga melalui Kelas Catin yang bekerjasama dengan yang melibatkan instansi atau stake holder lain (Departemen Agama( dan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok ibu-ibu untuk mendorong perubahan perilaku dalam memilih metode kontrasepsi.

5. **Dukungan Kebijakan dan Anggaran**

Dukungan dari pemerintah daerah berupa alokasi anggaran yang memadai untuk program KB, khususnya MKJP (DAK Non Fisik Sub Bidang KB), memungkinkan pelaksanaan program berjalan secara optimal. Hal ini mencakup penyediaan alat kontrasepsi, pelatihan tenaga kesehatan, dan kegiatan advokasi.

## 6. **Monitoring dan Evaluasi yang Konsisten**

Upaya monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan terhadap program KB memastikan bahwa kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diatasi. Mekanisme ini memungkinkan program berjalan lebih efektif dan efisien.

Dengan kombinasi faktor-faktor pendorong tersebut, Kabupaten Belitung berhasil mencapai kinerja yang sangat baik, bahkan melampaui target dengan **persentase capaian kinerja sebesar 116,34%**. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut.

Meskipun berhasil melampaui target penggunaan **Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)** pada tahun 2024 dengan capaian sebesar **16,87%**, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian tersebut. Kendala-kendala ini, jika tidak diatasi, berpotensi memengaruhi keberlanjutan program di masa depan. Beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

### 1. **Adanya Mitos dan Mispersepsi tentang MKJP**

Mitos dan informasi yang salah mengenai efek samping MKJP, seperti ketakutan terhadap alat kontrasepsi implan atau IUD, membuat sebagian masyarakat enggan memilih metode ini.

### 2. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Jumlah petugas keluarga berencana (PKB) dan tenaga kesehatan yang terbatas, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan yang merata dan berkualitas kepada masyarakat.

### 3. **Aksesibilitas Wilayah Terpencil**

Sulitnya akses menuju wilayah-wilayah terpencil akibat kondisi geografis atau infrastruktur yang kurang memadai menjadi hambatan dalam memberikan layanan KB, khususnya MKJP. Misalnya di wilayah Pulau Sumedang. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat di daerah-daerah tersebut.

### 4. **Kurangnya Dukungan dari Pasangan atau Keluarga**

Pengambilan keputusan untuk menggunakan MKJP sering kali dipengaruhi oleh dukungan dari pasangan atau keluarga. Dalam beberapa kasus, kurangnya persetujuan dari pasangan menjadi salah satu penghambat utama.

### 5. **Tingkat Mobilitas Penduduk yang Tinggi**

Tingginya mobilitas penduduk, khususnya pada kelompok usia produktif, menyebabkan sulitnya melakukan monitoring secara konsisten terhadap pengguna MKJP.

Meskipun berbagai kendala tersebut telah diupayakan untuk diatasi melalui strategi dan inovasi, identifikasi dan penanganan yang lebih terfokus akan sangat diperlukan guna memastikan program MKJP dapat terus meningkat di masa mendatang, serta mencapai keberlanjutan dan pemerataan yang lebih baik di seluruh wilayah Kabupaten Belitung.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), indikator kinerjanya adalah **Persentase PUS Ber KB** dengan Definisi Operasional: Peserta KB Aktif/Pasangan Usia Subur x 100%, pada tahun 2024 persentasenya adalah 77,85% diatas target yang ditetapkan 75,05% dengan rasio capaian 103,73%. Namun capaian tersebut menurun 1,86% jika dibandingkan dengan capaian dengan tahun 2023 (79,54%). Hal ini sebabkan karena penetapan sample Pendataan Keluarga pada

tahun 2024 hanya pada 12 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung sehingga data PUS yang peroleh tidak mencerminkan kondisi 100% keseluruhan desa/kelurahan yang ada (42 desa/kelurahan)

Meskipun terdapat penurunan sebesar 1,86% dibandingkan dengan capaian tahun 2023, indikator kinerja "Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Ber-KB" di Kabupaten Belitung pada tahun 2024 tetap berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 75,05% dengan capaian sebesar 77,85%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong yang telah mendukung pelaksanaan program KB secara optimal, di antaranya:

**1. Pelaksanaan Program KB yang Terintegrasi**

Upaya integrasi program KB dengan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, menjadi salah satu kunci keberhasilan. Kolaborasi ini memperkuat promosi KB, khususnya di wilayah yang menjadi sampel Pendataan Keluarga tahun 2024.

**2. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat**

Program edukasi dan kampanye kesadaran tentang pentingnya perencanaan keluarga terus dilakukan secara intensif. Kesadaran masyarakat terhadap manfaat penggunaan alat kontrasepsi yang berdampak pada kesejahteraan keluarga telah mendorong partisipasi aktif PUS dalam program KB.

**3. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan KB yang Memadai**

Penyediaan layanan KB yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, dan klinik, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan kontrasepsi. Selain itu, penyediaan alat kontrasepsi secara gratis turut mendukung keberhasilan capaian ini.

**4. Dukungan dari Petugas Lapangan**

Peran aktif petugas keluarga berencana (PKB) dan tenaga kesehatan dalam melakukan sosialisasi, pelayanan, dan pemantauan langsung terhadap pasangan usia subur sangat berkontribusi dalam meningkatkan keberhasilan program KB di desa/kelurahan yang menjadi sampel pendataan.

**5. Dukungan Kebijakan dari Pemerintah Daerah**

Komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan berupa anggaran, kebijakan, dan program yang terarah telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan program KB. Hal ini termasuk dalam pengelolaan data dan pemetaan wilayah prioritas program KB.

**6. Fokus pada Wilayah Prioritas**

Pemilihan 12 desa/kelurahan sebagai sampel Pendataan Keluarga 2024 memberikan kesempatan untuk melakukan intervensi program KB secara lebih fokus dan intensif di wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan tercapainya hasil yang lebih optimal meskipun data belum mencakup seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Belitung.

Dengan kombinasi dari berbagai faktor pendorong tersebut, Kabupaten Belitung tetap berhasil mencapai target indikator kinerja "Persentase PUS Ber-KB" pada tahun 2024, meskipun terdapat tantangan dalam pengumpulan data yang hanya mencakup sebagian desa/kelurahan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari komitmen dan kerja keras seluruh pihak terkait dalam mendukung program Keluarga Berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun capaian "Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Ber-KB" pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 75,05%, dengan capaian sebesar 77,85%, terdapat penurunan 1,86% dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 79,54%. Beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat dalam upaya peningkatan keberhasilan indikator kinerja ini meliputi:

**1. Keterbatasan Cakupan Pendataan Keluarga**

Pendataan Keluarga tahun 2024 hanya mencakup 12 desa/kelurahan dari total 42 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung. Hal ini menyebabkan data PUS yang diperoleh tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi seluruh wilayah, sehingga potensi capaian kinerja yang sebenarnya mungkin tidak terukur secara optimal.

**2. Aksesibilitas Wilayah Terpencil**

Beberapa desa/kelurahan yang tidak termasuk dalam sampel pendataan, terutama di wilayah terpencil, mungkin menghadapi kendala akses terhadap layanan KB. Kondisi geografis dan infrastruktur yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan program secara merata.

**3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Keterbatasan jumlah petugas lapangan, seperti Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan kader di lapangan, mengurangi kemampuan untuk memberikan edukasi, pelayanan, dan pemantauan secara menyeluruh di semua desa/kelurahan.

**4. Kurangnya Keberlanjutan Sosialisasi**

Sosialisasi dan edukasi tentang manfaat ber-KB yang belum dilaksanakan secara konsisten di seluruh wilayah dapat menyebabkan menurunnya kesadaran PUS, terutama di wilayah yang tidak menjadi prioritas dalam Pendataan Keluarga.

Kendala-kendala ini menunjukkan pentingnya upaya strategis dan terkoordinasi untuk meningkatkan capaian indikator kinerja di masa mendatang. Dengan perluasan cakupan pendataan, peningkatan akses layanan KB, dan penguatan sosialisasi, Kabupaten Belitung dapat terus meningkatkan keberhasilan program KB secara lebih merata dan berkelanjutan.

**Sasaran 3 : Meningkatkan Perkembangan Desa Mandiri**

**Sasaran 4 : Meningkatkan Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa**

Indikator kinerja sasaran 3 (**Meningkatkan Perkembangan Desa Mandiri**) sama dengan indikator kinerja sasaran 4 (**Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa**) yaitu *Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri* (Jumlah Desa dengan IDM range >0,8155)

Rata-rata hasil capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 3 dan 4 ini seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Rasio Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Desa	20	23	115%
<b>Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran</b>				<b>115%</b>

Sumber: Keptendes Nomor 175 Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah: Jumlah Desa dengan IDM Desa Mandiri dengan definisi operasional : Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155. Berdasarkan keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024 pada tahun 2024 ada 23 Desa yang berstatus Desa Mandiri di kabupaten Belitung, meningkat dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 20 Desa yang berstatus Desa Mandiri

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.27 **Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2023	2024		
1	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Desa	17	23	3 Desa	Ada peningkatan Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri pada tahun 2024 sejumlah 3 Desa dengan Status Desa Mandiri di Kabupaten Belitung

Sumber: Kepmendes Nomor 175 Tahun 2023

Sasaran 3 (**Meningkatkan Perkembangan Desa Mandiri**) dan sasaran 4 (**Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa**) dibuat dalam rangka mewujudkan Misi I - Tujuan I RPD Tahun 2024-2026 *Terwujudnya pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi* dengan sasaran 2 RPD yaitu *Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan* melalui strategi *Memperkuat ekonomi desa dan kawasan pedesaan dengan arah kebijakan pembenangan BUMDes Bersama dan meningkatkan kerjasama antar lembaga desa*

Hal-hal tersebut oleh PD DPPKBPM Kab. Belitung diupayakan pencapaiannya melalui indikator kinerja: Jumlah desa dengan status Desa Mandiri yang targetnya pada tahun 2024 adalah berjumlah 20 Desa dengan IDM Desa Mandiri dengan dengan rasio capaian kinerja sebesar 115% Jika dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerja selama tahun Renstra berjalan seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.6 **Perbandingan Jumlah Desa Mandiri Tahun 2023-2024**



Sumber: Kepmendes Nomor 80 Tahun 2022 dan Kepmendes Nomor 175 Tahun 2023

Desa Mandiri adalah status tertinggi dalam klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia. Status ini merujuk pada desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang kuat, serta mampu menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal. Berdasarkan regulasi yang berlaku, penetapan status Desa Mandiri didasarkan pada tiga indikator utama dalam IDM, yaitu indeks ketahanan sosial (pendidikan, kesehatan, modal sosial), indeks ketahanan ekonomi (keragaman ekonomi, akses keuangan, dan keterampilan masyarakat), serta indeks ketahanan lingkungan (ketersediaan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan risiko bencana). Desa dengan status Mandiri diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal, memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, serta menjadi contoh dalam pembangunan pedesaan yang berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan nasional. Pada tahun 2024, Kabupaten Belitung menunjukkan perkembangan signifikan dalam peningkatan jumlah desa berstatus Desa Mandiri. Sebelumnya, pada tahun 2023, terdapat 17 desa yang telah mencapai status tersebut, yaitu Desa Aik Rayak, Desa Perawas, Desa Bantan, Desa Gunung Riting, Desa Membalong, Desa Mentigi, Desa Padang Kandis, Desa Perpat, Desa Pulau Seliu, Desa Tanjung Rusa, Desa Air Batu Buding, Desa Badau, Desa Sungai Samak, Desa Aik Seruk, Desa Sijuk, Desa Selat Nasik dan Desa Selat Gual. Memasuki tahun 2024, jumlah ini meningkat menjadi 23 Desa dengan tambahan beberapa desa yang berhasil mencapai status mandiri. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan pedesaan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, termasuk optimalisasi pemanfaatan Dana Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta peningkatan infrastruktur dan layanan dasar di tingkat desa. Dengan bertambahnya jumlah Desa Mandiri, diharapkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Belitung terus meningkat, serta mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pembangunan desa yang berkelanjutan.

Tabel 3.28 Capaian Peningkatan Desa dengan IDM Desa Mandiri Kabupaten Belitung Tahun 2022-2023

No.	Kecamatan	Desa	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023	
			Nilai IDM	Status Perkembangan Desa	Nilai IDM	Status Perkembangan Desa
1	2	3	12	13	12	13
1.	Tanjung Pandan	Aik Ketekok	0.7770	Maju	0,7786	MAJU
		Aik Pelempang Jaya	0.7141	Maju	0,7329	MAJU
		Aik Rayak	0.8217	Mandiri	0,9237	MANDIRI
		Air Merbau	0.7713	Maju	0,7751	MAJU
		Air Saga	0.7527	Maju	0,7546	MAJU
		Buluh Tumbang	0.7335	Maju	0,7602	MAJU
		Dukong	0.7022	Berkembang	0,7079	MAJU
		Juru Seberang	0.6789	Berkembang	0,7410	MAJU
		Perawas	0.7921	Maju	0,9216	MANDIRI
2	Membalong	Bantan	0,7262	Maju	0,8487	MANDIRI
		Gunung Riting	0.8116	Maju	0,8300	MANDIRI
		Kembiri	0.7851	Maju	0,8130	MAJU
		Lassar	0.7427	Maju	0,8037	MAJU
		Membalong	0.8356	Mandiri	0,8379	MANDIRI
		Mentigi	0.7222	Maju	0,8657	MANDIRI
		Padang kandis	0.8356	Mandiri	0,8429	MANDIRI
Perpat	0.7465	Maju	0,8171	MANDIRI		

		Pulau Seliu	0.8186	Mandiri	0,8592	MANDIRI
		Pulau Sumedang	0.6829	Berkembang	0,6960	BERKEMBANG
		Simpang Rusa	0.7321	Maju	0,7841	MAJU
		Tanjung Rusa	0.8340	Mandiri	0,8378	MANDIRI
3	Badau	Air Batu Buding	0.7748	Maju	0,8156	MANDIRI
		Badau	0.8252	Mandiri	0,8271	MANDIRI
		Cerucuk	0.7176	Maju	0,7508	MAJU
		Ibul	0.7210	Maju	0,7267	MAJU
		Kacang Butor	0.7263	Maju	0,7599	MAJU
		Pegantungan	0.6706	Berkembang	0,7633	MAJU
		Sungai Samak	0.8516	Mandiri	0,8664	MANDIRI
4	Sijuk	Air Selumar	0.7340	Maju	0,7543	MAJU
		Air Seruk	0.8024	Maju	0,8194	MANDIRI
		Batu Itam	0.7805	Maju	0,7846	MAJU
		Keciput	0.7600	Maju	0,7935	MAJU
		Pelepak Pute	0.7317	Maju	0,7465	MAJU
		Sijuk	0.8802	Mandiri	0,8951	MANDIRI
		Sungai Padang	0.7627	Maju	0,7703	MAJU
		Tanjong Tinggi	0.7183	Maju	0,7278	MAJU
		Tanjong Binga	0.7654	Maju	0,8137	MAJU
		Terong	0.7610	Maju	0,8029	MAJU
5	Selat Nasik	Petaling	0.7902	Maju	0,8049	MAJU
		Pulau Gersik	0.6352	Maju	0,6410	BERKEMBANG
		Selat Nasik	0.8049	Maju	0,8233	MANDIRI
		Suak Gual	0.8206	Mandiri	0,8557	MANDIRI

Tabel 3.29 IDM Desa Mandiri Kabupaten Belitung 2024

KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
1902	BELITUNG	190201	TANJUNG PANDAN	1902012003	BULUH TUMBANG	0,863	0,717	0,667	0,7487	MAJU
1902	BELITUNG	190201	TANJUNG PANDAN	1902012004	PERAWAS	0,949	0,833	1	0,9273	MANDIRI
1902	BELITUNG	190201	TANJUNG PANDAN	1902012007	DUKONG	0,88	0,6	0,667	0,7156	MAJU
1902	BELITUNG	190201	TANJUNG PANDAN	1902012008	JURU SEBERANG	0,823	0,733	0,733	0,7632	MAJU
1902	BELITUNG	190201	TANJUNG PANDAN	1902012010	AIR SAGA	0,897	0,7	0,667	0,7546	MAJU
1902	BELITUNG	190201	TANJUNG PANDAN	1902012012	AIR MERBAU	0,909	0,75	0,667	0,7751	MAJU
1902	BELITUNG	190201	TANJUNG PANDAN	1902012013	AIK PELEMPANG JAYA	0,954	0,7	0,733	0,7959	MAJU
1902	BELITUNG	190201	TANJUNG PANDAN	1902012014	AIK KETEKOK	0,84	0,65	0,867	0,7856	MAJU
1902	BELITUNG	190201	TANJUNG PANDAN	1902012015	AIK RAYAK	0,954	0,883	0,867	0,9014	MANDIRI
1902	BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022001	MEMBALONG	0,914	0,967	0,867	0,9159	MANDIRI
1902	BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022002	PERPAT	0,851	0,733	0,867	0,8171	MANDIRI
1902	BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022003	LASSAR	0,794	0,75	0,867	0,8037	MAJU
1902	BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022004	SIMPANG RUSA	0,886	0,867	0,8	0,8508	MANDIRI
1902	BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022005	KEMBIRI	0,806	0,733	0,933	0,8241	MANDIRI
1902	BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022006	BANTAN	0,863	0,817	1	0,8932	MANDIRI
1902	BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022007	TANJUNGRUSA	0,863	0,983	0,867	0,9043	MANDIRI
1902	BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022008	MENTIGI	0,857	0,65	1	0,8357	MANDIRI
1902	BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022009	PULAU SELIU	0,811	0,867	0,933	0,8705	MANDIRI
1902	BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022010	PULAU SUMEDANG	0,777	0,45	0,867	0,6979	BERKEMBANG
1902	BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022011	GUNUNG RITING	0,84	0,717	0,933	0,83	MANDIRI
1902	BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022012	PADANG KANDIS	0,806	0,833	0,867	0,8352	MANDIRI
1902	BELITUNG	190203	SELAT NASIK	1902032001	SELAT NASIK	0,914	0,767	0,933	0,8714	MANDIRI
1902	BELITUNG	190203	SELAT NASIK	1902032002	PETALING	0,926	0,783	0,933	0,8808	MANDIRI

1902	BELITUNG	190203	SELAT NASIK	1902032003	SUAK GUAL	0,817	0,75	1	0,8557	MANDIRI
1902	BELITUNG	190203	SELAT NASIK	1902032004	PULAU GERSIK	0,846	0,433	0,933	0,7375	MAJU
1902	BELITUNG	190204	SIJUK	1902042001	SIJUK	0,869	0,95	0,933	0,9173	MANDIRI
1902	BELITUNG	190204	SIJUK	1902042002	BATU ITAM	0,943	0,767	0,667	0,7921	MAJU
1902	BELITUNG	190204	SIJUK	1902042003	TERONG	0,909	0,883	0,667	0,8195	MANDIRI
1902	BELITUNG	190204	SIJUK	1902042004	AIR SERUK	0,891	0,7	0,867	0,8194	MANDIRI
1902	BELITUNG	190204	SIJUK	1902042005	TANJUNG BINGA	0,92	0,85	0,867	0,8789	MANDIRI
1902	BELITUNG	190204	SIJUK	1902042006	AIR SELUMAR	0,886	0,733	0,667	0,7619	MAJU
1902	BELITUNG	190204	SIJUK	1902042007	SUNGAI PADANG	0,794	0,65	0,867	0,7703	MAJU
1902	BELITUNG	190204	SIJUK	1902042008	KECIPUT	0,909	0,817	0,667	0,7973	MAJU
1902	BELITUNG	190204	SIJUK	1902042009	PELEPAK PUTE	0,834	0,717	0,667	0,7392	MAJU
1902	BELITUNG	190204	SIJUK	1902042010	TANJONG TINGGI	0,789	0,717	0,667	0,724	MAJU
1902	BELITUNG	190205	BADAU	1902052001	BADAU	0,954	0,967	0,867	0,9292	MANDIRI
1902	BELITUNG	190205	BADAU	1902052002	AIR BATU BUDING	0,891	0,9	0,667	0,8194	MANDIRI
1902	BELITUNG	190205	BADAU	1902052003	SUNGAI SAMAK	0,966	0,767	0,933	0,8886	MANDIRI
1902	BELITUNG	190205	BADAU	1902052004	KACANG BUTOR	0,863	0,783	0,667	0,771	MAJU
1902	BELITUNG	190205	BADAU	1902052005	CERUCUK	0,88	0,767	0,8	0,8156	MANDIRI
1902	BELITUNG	190205	BADAU	1902052006	PEGANTUN GAN	0,846	0,583	0,867	0,7652	MAJU
1902	BELITUNG	190205	BADAU	1902052007	IBUL	0,88	0,717	0,667	0,7544	MAJU

**Tabel 3.30 Perbandingan Data Capaian IDM Desa Per Kecamatan Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024**

NO	KECAMATAN	CAPAIAN TAHUN 2023			CAPAIAN TAHUN 2024		
		DESA MANDIRI	DESA MAJU	DESA BERKEMBANG	DESA MANDIRI	DESA MAJU	DESA BERKEMBANG
1	TANJUNGPANDAN	2	7	0	2	7	0
2	MEMBALONG	8	3	1	10	1	1
3	SIJUK	2	8	0	4	6	0
4	SELAT NASIK	2	1	1	3	1	0
5	BADAU	3	4	0	4	3	0
<b>JUMLAH</b>		<b>17</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>1</b>
<b>JUMLAH DESA</b>		<b>42</b>			<b>42</b>		

Sumber: Kepmendes Nomor 80 Tahun 2022 dan Kepmendes Nomor 175 Tahun 2023

Data capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 yaitu desa dengan Status Desa Mandiri secara target sudah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 23 Desa. Untuk Desa Status Desa Maju yang merupakan akumulasi dari desa Maju dan desa Mandiri dengan definisi operasional untuk Persentase peningkatan jumlah Desa Maju diri seperti yang terlihat pada tabel diatas maka peningkatan jumlah desa maju tahun 2023 dan 2024 tidak terlalu signifikan yaitu 40 Desa untuk Tahun 2023 dan 41 Desa untuk tahun 2024 dari 42 jumlah seluruh desa di kabupaten Belitung dan kenaikan status desa berjumlah 1 desa. Faktor Pendorong pencapaian Indikator Kinerja adalah :

- Komitmen Pemerintah Daerah: Keseriusan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya, dana, dan tenaga untuk mendorong desa mencapai status mandiri.
- Pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi desa

- Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): BUMDes menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan menciptakan sumber pendapatan dan membuka lapangan kerja
- Pemanfaatan data dan evaluasi yang berbasis bukti dalam hal ini IDM Sebagai Panduan, Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan sebagai alat ukur dan panduan untuk merancang program yang relevan dengan kebutuhan desa. Dan monitoring evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Faktor Penghambat Capaian indicator kinerja adalah:

- Faktor Infrastruktur, seperti infrastruktur dasar yang belum memadai karena beberapa desa masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Akses Digital yang Terbatas karena Kurangnya akses terhadap teknologi dan internet menghambat digitalisasi administrasi dan inovasi desa. Jarak geografis: desa terpencil atau sulit dijangkau menghadapi hambatan logistik yang menghambat pembangunan dan implementasi program.
- Pemahaman Pemerintah Desa dalam pengisian kuesioner IDM
- Kuesioner IDM yang berubah – ubah setiap tahun
- Ketersediaan sarana dan prasarana social dasar seperti Fasilitas Pendidikan wajib 9 tahun, Kesehatan , Pasar Desa dan lembaga perbankan di desa serta kesadaran terhadap mitigasi bencana (penganggaran mitigasi Bencana di desa) yang belum merata di setiap desa

Solusi yang bisa diterapkan dalam menghadapi hambatan pencapaian indikator kinerja, antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan Kapasitas SDM: Mengadakan pelatihan dan pendampingan intensif bagi perangkat desa dan masyarakat untuk memahami dan mengelola program pembangunan.
- Optimalisasi Penggunaan Dana Desa: Mengarahkan anggaran ke program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
- Peningkatan Infrastruktur: Memastikan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh desa, termasuk akses internet dan transportasi.
- Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator dan memberikan intervensi tepat waktu.
- Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program.
- Penguatan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan: Memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, desa, dan mitra pembangunan lainnya.

Indikator Keberhasilan untuk memastikan desa bergerak menuju Desa Maju atau Desa Mandiri, evaluasi dapat dilakukan berdasarkan:

- **Indeks Desa Membangun (IDM)**, yang meliputi dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi.
- Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat desa.
- Ketersediaan fasilitas dasar dan aksesibilitas.

Untuk mengupayakan pencapaian tujuan/sasaran strategis 3 dan 4 PD DPPKBPMK Kab. Belitung melaksanakan program-program, yaitu:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

2. Program ProgramPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pencapaian indikator kinerja program-program tersebut pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31 **Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024**

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Rasio Capaian	Ket
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku	100	100%	100,%	
	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa	30%	33,3%	111%	
ProgramPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	85%	96,94%	114,05%	

**Program Administrasi Pemerintahan Desa**, indikator kinerja programnya adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Peraturan yang Berlaku dengan Definisi Operasional adalah: *Jumlah Desa yang melaksanakan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sesuai dengan Peraturan yang berlaku / Jumlah Desa x 100%*

Pada tahun 2024, persentase pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku mencapai 100%, tepat sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh desa berhasil mematuhi standar pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku, mencerminkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memberikan bimbingan teknis, pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara efektif. Dengan capaian ini, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa diharapkan semakin meningkat, sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk mendorong program pembangunan desa yang lebih optimal di masa mendatang.

Hal yang menjadi faktor pendorong tercapai indikator kinerja program ini adalah:

- Tersedianya regulasi baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan di desa.
- Ketersediaan Anggaran untuk melakukan Pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala
- Kerja sama yang baik dengan stakeholder terkait (Inspektorat, Kecamatan, BPKAD, Bagian Hukum Setda) dalam melakukan pendampingan dan pengawasan
- Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa

Faktor penghambat pencapaian indikator kinerja adalah:

- Kurang memadai sumber daya manusia dan kapasitas aparatur yang membidangi masalah keuangan di desa (sering terjadi mutasi perangkat desa yang membidangi keuangan dan perencanaan desa)
- keterlambatan penetapan regulasi dari pusat (terutama regulasi yang menyangkut perencanaan di desa)

- Regulasi dari pusat yang berubah-ubah
  - Kurangnya fasilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan
2. Indikator kinerja Persentase Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa dengan Definisi Operasional *Jumlah BUMDesa yang Melaporkan laporan Pertanggungjawaban Keuangan/Jumlah BUMDesa X100%* pada tahun 2024 di Kabupaten Belitung mencapai 33,33%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 30% dengan rasio capaian 111%. Adapun Definisi Operasional untuk indikator ini adalah Capaian ini menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesadaran pengelola BUMDesa terhadap pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan intensif kepada pengelola BUMDesa, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Meskipun demikian, pencapaian ini juga mengindikasikan adanya peluang untuk terus meningkatkan kinerja penyusunan laporan keuangan di masa mendatang, guna memastikan tata kelola BUMDesa yang semakin transparan, akuntabel, dan mendukung pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.
- Faktor pendorongnya antara lain:
- Peningkatan kesadaran dan kapabilitas pengelola BUMDesa.
  - Perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi.
  - Dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait.
  - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan.
- Pencapaian ini membuka peluang untuk:
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.
  - Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.
  - Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kinerja ini antara lain:
- Evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan.
  - Peningkatan kapabilitas pengelola BUMDesa.
  - Pemantauan dan evaluasi berkala.

**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** dengan indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif pada tahun 2024 mencapai 96,94%, menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan sebesar 85%, dengan rasio capaian 114,05%. Adapun Definisi Operasional untuk indikator ini adalah *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif/ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada X100%*

Hal ini mencerminkan keberhasilan program-program penguatan kelembagaan masyarakat desa yang telah dilaksanakan, baik melalui dukungan kebijakan, pendampingan, maupun partisipasi aktif masyarakat desa. Capaian ini juga menjadi indikasi positif terhadap peningkatan efektivitas dan kemandirian kelembagaan desa dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator kinerja program ini antara lain:

Faktor Internal

- Kepemimpinan efektif dan partisipatif.

- Kesadaran dan kapabilitas masyarakat.
- Kerjasama antar lembaga desa.
- Banyaknya jenis lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, Posyandu), belum lagi adanya kelompok masyarakat lain seperti pokdarwis, gapoktan, satlinmas, kelompok nelayan, dan lain lain sesuai dengan kepentingannya, dimana secara keseluruhan lembaga2 tersebut membutuhkan fasilitasi dan perhatian dari Pemerintah Desa.

#### Faktor Eksternal

- Dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait.
- Pelatihan dan pendampingan.
- Kebijakan yang mendukung.

#### Dampak positif keberhasilan capaian indikator kinerja program

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- Mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rekomendasi akan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kinerja ini antara lain:

- Pertahankan dan tingkatkan kapabilitas Kelembagaan Masyarakat Desa
- Perluasan jaringan kerjasama.
- Evaluasi dan perbaiki kebijakan.

Selain hal tersebut di atas pada Program Administrasi Pemerintahan juga melaksanakan pengawalan dalam penyaluran Desa Alokasi Dana Desa. Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Desa TA 2024 (Berita Daerah Kab. Belitung Tahun 2024 Nomor 26) penetapan tgl 25 September 2024, untuk Tahun 2024 Pagu Alokasi Dana Desa adalah sebesar Rp.56.618.570.900 (Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang di bagi dengan perhitungan 80% Alokasi dasar yang di bagi secara merata kepada 42 desa dan 20% alokasi formula dibagi secara proposional berdasarkan bobot desa dari kriteria/variable dengan bobot jumlah penduduk 30%, jumlah penduduk miskin 50% dan luas wilayah 20% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.32 Alokasi Dana Desa Tahun 2024**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa Per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa Per-Desa (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	1.078.448.970	318.639.930	1.397.088.900	1.397.089.000
2	Perawas	1.078.448.970	353.620.257	1.432.069.227	1.432.069.000
3	Dukong	1.078.448.970	449.517.428	1.527.966.398	1.527.966.000
4	Juru Seberang	1.078.448.970	241.410.641	1.319.859.611	1.319.860.000
5	Air Saga	1.078.448.950	699.912.513	1.778.361.463	1.778.361.000
6	Air Merbau	1.078.448.970	464.468.976	1.542.917.946	1.542.918.000
7	Aik Pelempang Jaya	1.078.448.970	367.987.759	1.446.436.729	1.446.437.000
8	Aik Ketekok	1.078.448.970	287.824.027	1.366.272.997	1.366.273.000
9	Aik Rayak	1.078.448.970	545.175.493	1.623.624.463	1.623.624.000

10	<i>Membalong</i>	1.078.448.970	425.105.019	1.503.553.989	1.503.554.000
11	<i>Perpat</i>	1.078.448.970	215.264.921	1.293.713.891	1.293.714.000
12	<i>Lassar</i>	1.078.448.970	326.903.353	1.405.352.323	1.405.352.000
13	<i>Sim pang Rusa</i>	1.078.448.970	316.751.044	1.395.200.014	1.395.200.000
14	<i>Kembiri</i>	1.078.448.970	289.274.510	1.367.723.480	1.367.723.000
15	<i>Bantan</i>	1.078.448.970	341.450.957	1.419.899.927	1.419.900.000
16	<i>Tanjungrusa</i>	1.078.448.970	196.223.824	1.274.672.794	1.274.673.000
17	<i>Mentigi</i>	1.078.448.970	140.582.843	1.219.031.813	1.219.032.000
18	<i>Pulau Seliu</i>	1.078.448.970	76.178.212	1.154.627.182	1.154.627.000
19	<i>Pulau Sumedang</i>	1.078.448.970	46.361.366	1.124.810.336	1.124.810.900
20	<i>Gunung Riting</i>	1.078.448.970	115.933.221	1.194.382.191	1.194.382.000
21	<i>Padang Kandis</i>	1.078.448.970	129.202.070	1.207.651.040	1.207.651.000
22	<i>Selat Nasik</i>	1.078.448.970	267.453.085	1.345.902.055	1.345.902.000
23	<i>Petaling</i>	1.078.448.970	94.222.171	1.172.671.141	1.172.671.000
24	<i>Suak Gual</i>	1.078.448.970	93.494.803	1.171.943.773	1.171.944.000
25	<i>Pulau Gersik</i>	1.078.448.970	215.197.905	1.293.646.875	1.293.647.000
26	<i>Sijuk</i>	1.078.448.970	237.012.854	1.315.461.824	1.315.462.000
27	<i>Batu Itam</i>	1.078.448.970	192.762.251	1.271.211.221	1.271.211.000
28	<i>Terong</i>	1.078.448.970	314.737.744	1.393.186.714	1.393.187.000
29	<i>Air Seruk</i>	1.078.448.970	430.678.719	1.509.127.689	1.509.128.000
30	<i>Tanjung Binga</i>	1.078.448.970	485.915.428	1.564.364.398	1.564.364.000
31	<i>Air Selumar</i>	1.078.448.970	312.480.648	1.390.929.618	1.390.930.000
32	<i>Sungai Padang</i>	1.078.448.970	253.542.650	1.331.991.620	1.331.992.000
33	<i>Keciput</i>	1.078.448.970	235.091.439	1.313.540.409	1.313.540.000
34	<i>Pelepak Pute</i>	1.078.448.970	183.918.377	1.262.367.347	1.262.367.000
35	<i>Tanjong Tinggi</i>	1.078.448.970	132.158.799	1.210.607.769	1.210.608.000
36	<i>Badau</i>	1.078.448.970	287.400.743	1.365.849.713	1.365.850.000
37	<i>Air Batu Buding</i>	1.078.448.970	183.141.201	1.261.590.171	1.261.590.000
38	<i>Sungai Samak</i>	1.078.448.970	196.894.718	1.275.343.688	1.275.344.000
39	<i>Kacang Butor</i>	1.078.448.970	263.708.999	1.342.157.969	1.342.158.000
40	<i>Cerucuk</i>	1.078.448.970	212.973.169	1.291.422.139	1.291.422.000
41	<i>Pegantungan</i>	1.078.448.970	222.782.707	1.301.231.677	1.301.232.000
42	<i>Ibul</i>	1.078.448.970	160.357.406	1.238.806.376	1.238.806.000
<b>TOTAL</b>		<b>45.294.856.720</b>	<b>11.323.714.180</b>	<b>56.618.570.900</b>	<b>56.618.570.900</b>

Adapun Peraturan Bupati Belitung tentang Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2024 tidak menjadi syarat penyaluran sehingga Rincian perhitungan dan desa masing-masing Desa mengacu kepada PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, akan tetapi hal tersebut tidak menghambat komitmen pemerintah Kabupaten Belitung dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Untuk Alokasi Dana Desa tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Desa TA 2024 (Berita Daerah Kab. Belitung Tahun 2024 Nomor 26) penetapan tgl 25 September 2024. Pagu alokasi Dana Desa tahun 2024 adalah Rp. 56.618.570.900 (lima puluh enam milyar enam ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus rupiah) Sedangkan untuk Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung untuk Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 72 Tahun 2023

tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung kepada Desa TA 2024 (Berita Daerah Kab. Belitung Tahun 2024 Nomor 27) penetapan tgl 25 September 2024

Pagu Alokasi besaran bagi hasil pajak adalah Rp. 8.774.242.924,00 (*delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah*). Dan Alokasi Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa adalah sebesar Rp. 978.814.876,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*). Presentase dan besarnya pembagian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 adalah 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa, dan 40% (empat per seratus) dibagi secara proposional berdasarkan capaian target dan realisasi dibagi total Pajak Bumi dan Bangunan diwilayah masing-masing desa dan jumlah penduduk Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.33 Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Bagi Hasil Pajak Per-Desa	Pagu Bagi Hasil Pajak Per-Desa (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	125.346.327	78.601.207	203.947.534	203.947.000
2	Perawas	125.346.327	92.570.383	217.916.710	217.917.000
3	Dukong	125.346.327	101.526.492	226.872.819	226.873.000
4	Juru Seberang	125.346.327	59.329.524	184.675.851	184.676.000
5	Air Saga	125.346.327	158.306.854	283.653.181	283.652.000
6	Air Merbau	125.346.327	122.941.198	248.287.525	248.287.000
7	Aik Pelempang Jaya	125.346.327	114.345.648	239.691.975	239.692.000
8	Aik Ketekok	125.346.327	103.119.264	228.465.591	228.465.000
9	Aik Rayak	125.346.327	145.792.943	271.139.270	271.139.000
10	Membalong	125.346.327	115.913.145	241.259.472	241.259.000
11	Perpat	125.346.327	88.725.868	214.072.195	214.072.000
12	Lassar	125.346.327	90.171.634	215.517.961	215.518.000
13	Simpang Rusa	125.346.327	95.900.207	221.246.534	221.247.000
14	Kembiri	125.346.327	102.024.373	227.370.700	227.371.000
15	Bantan	125.346.327	87.800.052	213.146.379	213.146.000
16	Tanjungrusa	125.346.327	55.863.430	181.209.757	181.210.000
17	Mentigi	125.346.327	65.706.767	191.053.094	191.053.000
18	Pulau Seliu	125.346.327	38.247.405	163.593.732	163.594.000
19	Pulau Sumedang	125.346.327	62.924.691	188.271.018	188.271.000
20	Gunung Riting	125.346.327	75.512.709	200.859.036	200.859.000
21	Padang Kandis	125.346.327	57.920.820	183.267.147	183.267.000
22	Selat Nasik	125.346.327	60.636.176	185.982.503	185.982.000
23	Petaling	125.346.327	69.272.222	194.618.549	194.619.000
24	Suak Gual	125.346.327	60.807.763	186.154.090	186.154.000
25	Pulau Gersik	125.346.327	84.768.635	210.114.963	210.115.000
26	Sijuk	125.346.327	80.956.010	206.302.337	206.302.000
27	Batu Itam	125.346.327	60.931.495	186.277.822	186.278.000
28	Terong	125.346.327	67.907.269	193.253.596	193.254.000
29	Air Seruk	125.346.327	103.378.321	228.724.648	228.725.000
30	Tanjung Binga	125.346.327	120.026.490	245.372.817	245.373.000
31	Air Selumar	125.346.327	89.512.731	214.859.058	214.859.000

32	Sungai Padang	125.346.327	68.253.370	193.599.697	193.600.000
33	Keciput	125.346.327	67.803.345	193.149.672	193.150.000
34	Pelepak Pute	125.346.327	85.411.259	210.757.586	210.758.000
35	Tanjong Tinggi	125.346.347	24.684.983	150.031.330	150.031.924
36	Badau	125.346.327	88.194.928	213.541.255	213.541.000
37	Air Batu Buding	125.346.327	84.214.230	209.560.557	209.561.000
38	Sungai Samak	125.346.327	68.646.275	193.992.602	193.993.000
39	Kacang Butor	125.346.327	79.083.905	204.430.232	204.430.000
40	Cerucuk	125.346.327	79.194.562	204.540.889	204.541.000
41	Pegantungan	125.346.327	71.187.525	196.533.852	196.534.000
42	Ibul	125.346.327	81.581.061	206.927.388	206.927.000
<b>TOTAL</b>		<b>5.264.545.754</b>	<b>3.509.697.169</b>	<b>8.774.242.924</b>	<b>8.774.242.924</b>

**Tabel 3.34: Penetapan Alokasi Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Bagi Hasil Retribusi Per-Desa	Pagu Bagi Hasil Retribusi Per-Desa (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	13.983.070	11.444.855	25.427.925	25.428.000
2	Perawas	13.983.070	14.171.632	28.154.702	28.155.000
3	Dukong	13.983.070	17.308.511	31.291.581	31.292.000
4	Juru Seberang	13.983.070	7.330.248	21.313.318	21.313.000
5	Air Saga	13.983.055	33.180.302	47.163.357	47.163.000
6	Air Merbau	13.983.070	22.539.358	36.522.428	36.522.000
7	Aik Palembang Jaya	13.983.070	19.489.388	33.472.458	33.472.000
8	Aik Ketekok	13.983.070	14.961.962	28.945.032	28.945.000
9	Aik Rayak	13.983.070	27.675.149	41.658.219	41.658.000
10	Membalong	13.983.070	13.601.290	27.584.360	27.584.000
11	Perpat	13.983.070	5.252.575	19.235.645	19.236.000
12	Lassar	13.983.070	9.356.319	23.339.389	23.339.000
13	Simpang Rusa	13.983.070	8.424.761	22.407.831	22.408.000
14	Kembiri	13.983.070	8.087.988	22.071.058	22.071.000
15	Bantan	13.983.070	7.791.953	21.775.023	21.775.000
16	Tanjungrusa	13.983.070	5.860.939	19.844.009	19.844.000
17	Mentigi	13.983.070	3.943.505	17.926.575	17.927.000
18	Pulau Seliu	13.983.070	2.935.901	16.918.971	16.919.000
19	Pulau Sumedang	13.983.070	1.520.911	15.503.982	15.505.876
20	Gunung Riting	13.983.070	3.766.971	17.750.041	17.750.000
21	Padang Kandis	13.983.070	3.527.970	17.511.040	17.511.000
22	Selat Nasik	13.983.070	6.493.747	20.476.817	20.477.000
23	Petaling	13.983.070	1.833.241	15.816.311	15.816.000
24	Suak Gual	13.983.070	2.520.367	16.503.437	16.503.000
25	Pulau Gersik	13.983.070	5.725.144	19.708.214	19.708.000
26	Sijuk	13.983.070	8.712.647	22.695.717	22.696.000
27	Batu Itam	13.983.070	7.224.327	21.207.397	21.207.000
28	Terong	13.983.070	7.705.044	21.688.114	21.688.000
29	Air Seruk	13.983.070	17.001.612	30.984.682	30.985.000
30	Tanjung Binga	13.983.070	17.846.261	31.829.331	31.829.000
31	Air Selumar	13.983.070	9.261.262	23.244.332	23.244.000
32	Sungai Padang	13.983.070	6.675.713	20.658.783	20.659.000
33	Keciput	13.983.070	7.218.896	21.201.966	21.202.000
34	Pelepak Pute	13.983.070	5.358.495	19.341.565	19.342.000

35	Tanjong Tinggi	13.983.070	3.117.868	17.100.938	17.101.000
36	Badau	13.983.070	9.714.819	23.697.889	23.698.000
37	Air Batu Buding	13.983.070	4.060.289	18.043.359	18.043.000
38	Sungai Samak	13.983.070	6.594.236	20.577.306	20.577.000
39	Kacang Butor	13.983.070	7.403.578	21.386.648	21.387.000
40	Cerucuk	13.983.070	5.578.484	19.561.554	19.562.000
41	Pegantungan	13.983.070	5.581.200	19.564.270	19.564.000
42	Ibul	13.983.070	3.726.232	17.709.302	17.709.000
<b>TOTAL</b>		<b>587.288.925</b>	<b>391.525.950</b>	<b>978.814.876</b>	<b>978.814.876</b>

Rincian perhitungan masing-masing Desa mengacu kepada PMK Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah Kabupaten Belitung dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

OPD DPPKBPMD Kab. Belitung juga melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja sebagaimana berikut:

Tabel 3.35 **Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024**

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %	Ket
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	100	100	
	Indeks Profesionalitas ASN	80	73,50	91,88	
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur	100	100	100	
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	100	100	

7. **Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan** dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan tersedianya dokumen hasil perencanaan perencanaan, penganggaran, laporan keuangan dan evaluasi kinerja sesuai peraturan yang berlaku yang mencerminkan mencerminkan efektivitas dalam tata kelola perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

Beberapa faktor utama yang mendukung pencapaian target ini antara lain karena adanya Kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku karena seluruh proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja dan keuangan telah mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan tersedianya pedoman teknis yang jelas dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Adanya koordinasi yang efektif antara unit perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja dalam menyusun serta menyelaraskan dokumen yang diperlukan dan sinkronisasi yang baik antara dokumen perencanaan strategis, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja meningkatkan konsistensi dan akurasi pelaporan.

Adanya pemanfaatan sistem digitalisasi dan teknologi informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi mempermudah penyusunan dan validasi dokumen

sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pengarsipan, meminimalkan kesalahan administrasi.

Meskipun target telah tercapai 100%, terdapat beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi proses di masa mendatang, antara lain karena adanya kompleksitas dalam **proses** penyusunan dokumen yang membutuhkan koordinasi lintas unit kerja sering kali memakan waktu dan memerlukan ketelitian tinggi serta adanya Perubahan regulasi yang dinamis memerlukan adaptasi cepat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Keterbatasan sumber daya dalam penyusunan dokumen sehingga Beban kerja yang tinggi terhadap tim penyusun dokumen dapat menjadi tantangan dalam menjaga ketepatan waktu penyusunan laporan. Tantangan dalam implementasi Eevaluasi kinerja menjadi penghambat karena proses evaluasi kinerja yang membutuhkan data akurat dari berbagai sumber terkadang menghadapi kendala dalam pengumpulan informasi yang tepat waktu.

8. **Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah** dengan target pada tahun 2024 adalah 80% dan terealisasi 73,50%. Capaian ini menunjukkan adanya kesenjangan sebesar 6,50%, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor penghambat dalam upaya peningkatan profesionalisme ASN di perangkat daerah. Beberapa faktor yang berkontribusi dalam peningkatan Indeks Profesionalitas ASN, antara lain: Peningkatan Kompetensi ASN dalam hal ini Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan kedinasan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi pegawai, terutama dalam aspek teknis dan manajerial sehingga ASN yang telah mengikuti program diklat atau pelatihan menunjukkan peningkatan dalam keterampilan dan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Kinerja Pegawai, adanya kebijakan dan sistem evaluasi kinerja yang berbasis meritokrasi turut mendorong ASN untuk bekerja lebih efektif dan efisien dan penerapan sistem reward dan punishment menjadi motivasi bagi ASN untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Disiplin Pegawai, peningkatan pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan disiplin ASN, seperti absensi, kepatuhan terhadap jam kerja, serta kode etik pegawai, menjadi faktor yang mendukung profesionalisme ASN.

Meskipun terdapat beberapa faktor pendorong, terdapat pula kendala yang menyebabkan pencapaian indeks belum sesuai dengan target, di antaranya: terbatasnya peluang diklat dan pelatihan karena tidak semua ASN memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi akibat keterbatasan anggaran dan kuota peserta.

Kurangnya program pelatihan yang berbasis kebutuhan spesifik perangkat daerah menghambat optimalisasi peningkatan kompetensi, masih terdapat ASN dengan tingkat kinerja yang belum optimal, baik karena kurangnya motivasi kerja maupun keterbatasan keterampilan teknis yang dimiliki dan Evaluasi kinerja yang belum sepenuhnya berbasis hasil kerja dan pencapaian target individu maupun unit kerja serta masih terdapat kendala dalam penerapan budaya kerja yang disiplin dan profesional, terutama terkait kepatuhan terhadap regulasi dan etika kerja. Pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran disiplin masih belum sepenuhnya efektif dalam mencegah ketidakpatuhan ASN.

3. **Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah** pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 100%, dan berhasil direalisasikan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pelayanan administrasi perkantoran telah

dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi di lingkungan perangkat daerah. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari beberapa faktor utama, antara lain: adanya ASN yang bertugas dalam pelayanan administrasi memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik terhadap prosedur administrasi perkantoran. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam administrasi perkantoran memastikan kelancaran alur kerja dan kepatuhan terhadap regulasi. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti fasilitas perkantoran seperti perangkat komputer, jaringan internet, serta sistem informasi administrasi yang mendukung efisiensi kerja. Dan adanya Kolaborasi antar bidang dan unit kerja dalam perangkat daerah berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi hambatan dalam pengelolaan administrasi serta komunikasi yang efektif antara pegawai mendukung penyelesaian tugas administrasi dengan lebih cepat dan akurat.

Meskipun target telah tercapai 100%, terdapat beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan administrasi di masa mendatang, di antaranya karena Beban kerja yang fluktuatif seperti pada periode tertentu, volume pekerjaan administrasi meningkat secara signifikan, sehingga memerlukan strategi pengelolaan yang lebih baik agar tidak mengganggu kelancaran proses administrasi. Adanya perubahan kebijakan administratif yang terjadi secara berkala juga menjadi penghambat karena memerlukan penyesuaian dalam prosedur kerja, sehingga membutuhkan waktu adaptasi bagi ASN yang bertugas dalam pelayanan administrasi dan meskipun pelayanan telah berjalan optimal, sistem monitoring dan evaluasi berkala tetap perlu diperkuat untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan administrasi di masa mendatang.

4. **Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur** pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 100%, dan berhasil direalisasikan sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa seluruh kebutuhan sarana dan prasarana aparatur telah terpenuhi sesuai dengan standar dan kebutuhan operasional perangkat daerah, sehingga mendukung efektivitas dan efisiensi kerja ASN. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap pencapaian 100% dalam pemenuhan sarana dan prasarana aparatur adalah karena adanya Perencanaan Anggaran yang Tepat dan Terukur sehingga penyusunan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana memungkinkan pengadaan dilakukan secara optimal tanpa kendala finansial, sinkronisasi perencanaan dengan prioritas kerja perangkat daerah memastikan efisiensi dalam alokasi sumber daya, Sinergi antara unit perencanaan, keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah (BMD) dalam proses pengadaan serta pemeliharaan fasilitas kerja

Meskipun target telah tercapai 100%, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan sarana dan prasarana di masa mendatang, di antaranya seperti Kendala dalam Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana karena beberapa sarana dan prasarana membutuhkan perawatan berkala agar tetap berfungsi optimal. Jika tidak dikelola dengan baik, ada risiko penurunan kualitas dan efektivitas penggunaannya. Potensi ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan Sarana di masa depan karena dinamika kebutuhan aparatur dapat berubah seiring dengan perkembangan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga diperlukan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pelaksanaan capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun anggaran 2024 dilaksanakan dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 6.379.832.105,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.821.178.905,-

setara dengan 91,24%. Alokasi anggaran ini mengalami peningkatan sebesar 9,80% dari alokasi tahun anggaran 2023 yang berjumlah Rp. 5.696.110.241,-.

Guna mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan DPPKBPM Kab. Belitung sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Belitung maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan dan menggunakan kuesioner online pada aplikasi SKM lewat tautan <https://skm.belitung.go.id/>. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM DPPKBPM Kab. Belitung yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

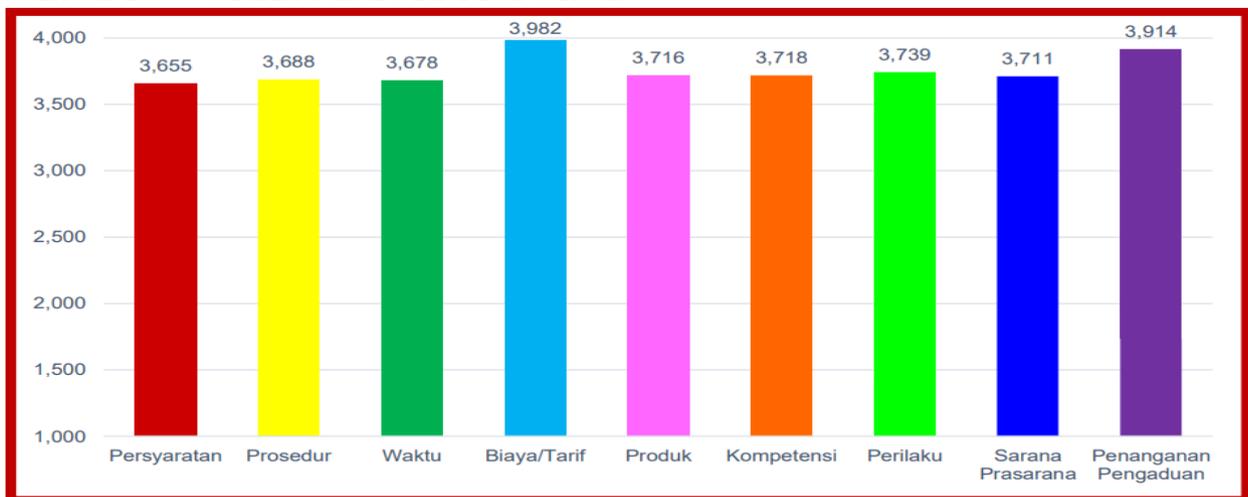
Melalui menggunakan aplikasi SKM untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada DPPKBPM Kab. Belitung diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.36 Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
<b>IKM per unsur</b>	3,655	3,688	3,678	3,982	3,716	3,718	3,739	3,711	3,914
<b>Kategori</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>(A atau SANGAT BAIK)</b>								

Sedangkan IKM per Unsur pada DPPKBPM Kab. Belitung Tahun 2024 terlihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.7 Grafik Nilai SKM Per Unsur



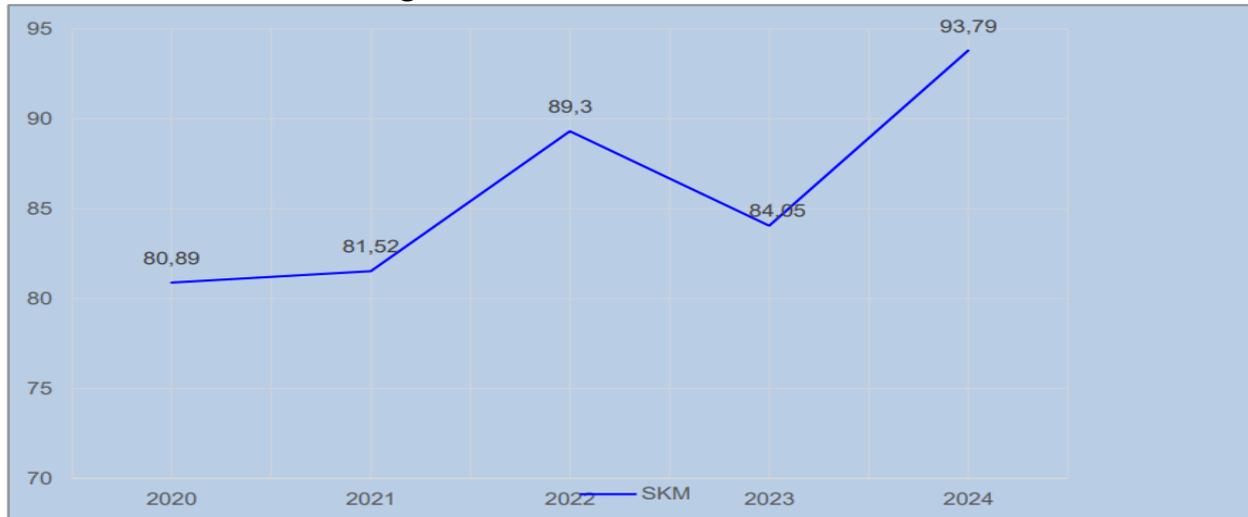
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa semua unsur pelayanan dalam kategori mutu pelayanan “A” dengan kinerja Sangat Baik; Hasil survei kepuasan masyarakat ini dengan nilai 93,79% atau Sangat Baik. Hasil survei ini menggambarkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung sudah memberikan kepuasan terhadap Masyarakat dengan semua unsur dengan kinerja Pelayanan *Sangat Baik*.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta

kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan DPPKBPMMD Kab. Belitung dapat dilihat melalui grafik berikut :

**Gambar 1.8 Grafik Tren Tingkat Kepuasan Penerima Layanan OPD DPPKBPMMD Kab. Belitung Tahun 2024**



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga bulan Oktober Tahun 2024 pada DPPKBPMMD Kab. Belitung dan hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya

### 3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

#### **Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada unsur penunjang urusan Pengendalian Penduduk adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.37 Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (GDPK)		
	Anggaran		211.680.200	104.732.500
	Realisasi		171.516.258	98.271.520
	%		81,03	93,83

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Kegiatan :</b> Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Output :</i> Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk <i>Outcome :</i> Terlaksananya kebijakan tentang pengendalian kuantitas penduduk		
	Anggaran		89.810.750	104.732.500
	Realisasi		82.755.518	98.271.520
	%		92,14	93,83
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal		
	Anggaran		40.767.000	42.457.500
	Realisasi		37.563.180	39.114.580
	%		92,14	92,13
	<b>Sub Kegiatan :</b> Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal		
	Anggaran		49.043.750	62.275.000
	Realisasi		45.192.338	59.156.940
	%		92,15	94,99
	<b>Kegiatan :</b> Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Output :</i> Dokumen program Bangga Kencana <i>Outcome :</i> Tersedianya data yang valid		
	Anggaran		121.869.450	-
	Realisasi		88.760.740	-
	%		72,83	-
	<b>Sub Kegiatan :</b> Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		
	Anggaran		121.869.450	-
	Realisasi		88.760.740	-
	%		72,83	-
<b>2</b>	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP)		
	Anggaran		1.027.539.160	985.567.050
	Realisasi		699.442.810	922.629.503
	%		68,07	93,61
	<b>Kegiatan :</b> Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<i>Output :</i> Penyuluh KB/PLKB <i>Outcome :</i> Meningkatnya Partisipasi dalam ber KB		
	Anggaran		768.353.010	747.817.450
	Realisasi		609.850.211	703.100.694
	%		79,37	94,02
	<b>Sub Kegiatan :</b>	Meningkatnya partisipasi dalam ber-KB)		

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
	Anggaran		393.899.010	397.680.450
	Realisasi		242.968.798	363.001.578
	%		61,68	91,28
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penggerakan Kader Intistusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Intistusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
	Anggaran		374.454.000	350.137.000
	Realisasi		366.881.413	340.099.116
	%		97,98	97,13
	<b>Kegiatan :</b> Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Output</i> : Laporan Pendistribusian alokon <i>Outcome</i> : Terpenuhinya kebutuhan alokon untuk penyuluhan KB		
	Anggaran		259.186.150	237.749.600
	Realisasi		89.592.599	219.528.809
	%		34,57	92,34
	<b>Sub Kegiatan :</b> Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan Penggunaan Metode Konstrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
	Anggaran		236.744.650	237.749.600
	Realisasi		67.393.499	219.528.809
	%		28,47	92,34
	<b>Sub Kegiatan :</b> Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan danKelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling esehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di FasilitasKesehatan dan Kelompok Kegiatan		
	Anggaran		22.441.500	-
	Realisasi		22.199.100	-
	%		98,92	-
3	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>	Persentase PUS Ber KB		
	Anggaran		2.837.826.450	2.875.716.000
	Realisasi		1.760.412.000	2.521.470.292
	%		62,03	87,68
	<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Output</i> : Laporan Pelaksanaan Orientasi Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga <i>Outcome</i> : Meningkatnya kualitas Kader Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
	Anggaran		373.456.450	405.158.000

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Realisasi		75.712.900	379.611.592
	%		20,27	93,69
	<b>Sub Kegiatan:</b> Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
	Anggaran		373.456.450	325.160.000
	Realisasi		75.712.900	301.364.928
	%		20,27	92,68
	<b>Sub Kegiatan:</b> Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
	Anggaran		-	79.998.000
	Realisasi		-	78.246.664
	%		-	97,81
	<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Output :</i> Laporan pembinaan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga <i>Outcome :</i> Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga -		
	Anggaran		2.464.370.000	2.470.558.000
	Realisasi		1.684.699.100	2.141.858.700
	%		68,36	86,70
	<b>Sub Kegiatan:</b> Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
	Anggaran		2.464.370.000	2.470.558.000
	Realisasi		1.684.699.100	2.141.858.700
	%		68,36	86,70
	Anggaran		4.077.045.810	3.966.015.550
	Realisasi		2.631.371.068	3.542.371.315
	%		64,54	89,32

## Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan *output* : Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk dan *outcome* : Terlaksananya kebijakan tentang pengendalian kuantitas penduduk

Faktor Pendorong tercapainya kinerja kegiatan adalah :

1. Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya dukungan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan serta pihak sekolah dalam pelaksanaan kegiatan.

Faktor Penghambat capaian kinerja adalah:

1. Kurangnya SDM Pengelola Program Pengendalian Penduduk di Tingkat Kabupaten. Hal ini dapat dilihat dari komposisi pegawai di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang terdiri dari 1 orang Kabid, 2 orang Penata Kependudukan dan KB, serta 1 orang staf pelaksana.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 104.732.500 dengan realisasi sebesar Rp. 98.271.520 atau 93,83% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah :

1. Adanya dukungan dari seksi pemberdayaan masyarakat kantor kecamatan, kasi pelayanan kantor kelurahan dan desa serta Pembina PIK R dari sekolah baik sekolah menengah pertama dan menengah atas
2. Kerjasama serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait (dalam hal ini adalah sekolah SMP dan SMA/Kejuruan sederajat Kab. Belitung yang menjadi sasaran kegiatan) sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan lancar

Faktor penghambat

1. Masih belum tersedianya anggaran pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan serta pihak sekolah dalam pelaksanaan kegiatan
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan sering mengalami perubahan dikarenakan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan sekolah (kalender pendidikan) yang bersangkutan.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- (1). Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal



Gambar 1.9 : Rapat Pengurus Genre 2024 dan kegiatan SK Non Formal di Balai Penyuluh Tg.pandan



Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan adalah:

1. Respon positif dari pihak sekolah terkait pelaksanaan sub kegiatan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan kerjasama dan koordinasi yang baik
2. Respon yang baik dari Pembina dan anggota PIK R sekolah baik Tingkat pertama atau Tingkat lanjutan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat:

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan mengalami perubahan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan sekolah yang bersangkutan (terbentur pelaksanaan ulangan/ libur sekolah)

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 42.457.500 dengan realisasi sebesar Rp. 39.114.580 atau 92,13% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah:

Faktor pendorong :

1. Pelaksanaan kegiatan diselenggarakan sesuai perencanaan kegiatan
2. Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala.

Faktor penghambat :

1. Waktu pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan kalender pendidikan.

Solusi/rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang adalah:

1. Melakukan koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan baik ke pihak kecamatan, kelurahan/desa, pihak sekolah serta PKB/ PLKB
2. Menyiapkan/membuat materi yang baik dan menarik untuk peserta
3. Narasumber lebih pro aktif/ dan menarik dalam penyampaian materi

- (1) Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal.

Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah:

1. Respon positif dari pihak kecamatan dan sekolah terkait pelaksanaan sub kegiatan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan kerjasama dan koordinasi yang baik
2. Adanya Narasumber kompeten di bidangnya dalam menyampaikan materi pada pelaksanaan kegiatan

Faktor penghambat :

1. Masih rendahnya antusias para peserta dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan
2. Masih rendahnya respon peserta terhadap muatan materi yang disampaikan oleh narasumber pelaksanaan kegiatan

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 62.275.000 dengan realisasi sebesar Rp. 59.156.940 atau 94,99% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah:

1. Adanya perencanaan sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat :

Keterbatasan SDM yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Solusi/rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang adalah:

1. Melakukan koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan baik ke pihak kecamatan, kelurahan/desa, pihak sekolah serta PKB/ PLKB.
2. Menyiapkan/ membuat materi yang baik dan menarik untuk peserta .



Gambar 1.10 . Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Selat Nasik

3. Narasumber lebih pro aktif/ dan menarik dalam penyampaian materi.

### Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- **Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB** dengan *output* : Jumlah Penyuluh KB/PLKB dan *outcome* : Meningkatnya partisipasi dalam ber-KB.

Faktor Pendorong tercapainya kinerja Kegiatan adalah :

1. Adanya dukungan anggaran serta sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, provinsi, daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.

Faktor Penghambat capaian kinerja Kegiatan adalah:

1. Kurangnya SDM Pengelola Program Keluarga Berencana di Tingkat Kabupaten. Hal ini dapat dilihat dari komposisi pegawai di bidang KB dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga yang terdiri dari 1 orang Kabid dan 1 orang Penata Kependudukan dan KB.
2. Belum idealnya rasio tenaga penyuluh Program Bangga Kencana, dimana di tahun 2024 jumlah PKB/PLKB sebanyak 16 orang dengan rincian : 7 orang PNS, 2 orang PPPK, dan 7 orang Non PNS dengan wilayah binaan 49 desa/kelurahan dengan rasio 1:4.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 747.817.450 dengan realisasi sebesar Rp. 703.100.694 atau 94,02% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah:

1. Adanya koordinasi yang baik antara pengelola program keluarga berencana di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dengan pengelola di tingkat kabupaten.
2. Adanya perencanaan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat:

1. Keterbatasan SDM yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.



Gambar 1.11 Kegiatan KIE bagi PUS Ber KB



Gambar 1.12 : Kegiatan Monev Pendataan Keluarga Kabupaten Belitung Th 2024 bersama Tim BKKBN Perwakilan Prov Babel

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

**(1) Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).**

Adapun faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja sub kegiatan adalah:  
Faktor pendorong adalah:

1. Tersedianya dukungan anggaran untuk honorarium PLKB Non PNS.
2. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa/kelurahan.
3. Adanya tambahan alokasi anggaran insentif daerah untuk pelaksanaan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

Faktor penghambat:

1. Belum idealnya besaran honorarium yang diterima dibandingkan dengan beban kerja serta resiko yang ditanggung PLKB Non PNS di lapangan.

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 397.680.450 dengan realisasi sebesar Rp. 363.001.578 atau 91,28% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran sub kegiatan adalah :

Faktor pendorong :

1. Telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran kas yang telah dibuat.
2. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat :

1. Keterbatasan SDM yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
2. Sarana kerja PKB/PLKB yang terbatas.

Solusi/rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang adalah

1. Mengusulkan pengadaan sarana kerja untuk mendukung kinerja PKB/PLKB.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kinerja PKB/PLKB.

## (2) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Insitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Adapun faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja sub kegiatan adalah:

1. Tersedianya anggaran untuk operasional dan pembinaan Kader IMP di Tingkat Kabupaten.
2. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan.

Faktor penghambat:

1. Belum tersedianya anggaran untuk operasional dan pembinaan Kader IMP di tingkat desa.
2. Minat masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan Program Bangga Kencana di Tingkat desa/kelurahan dengan menjadi kader IMP masih rendah dikarenakan pekerjaannya bersifat sosial dengan biaya operasional yang terbatas.

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 350.137.000 dengan realisasi sebesar Rp. 340.099.116 atau 97,13% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran sub kegiatan adalah:

1. Adanya perencanaan anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan
2. Adanya monitoring dan evaluasi berkala terkait realisasi kegiatan.

Faktor penghambat :

1. Keterbatasan SDM di bidang yang mengelola dan melaksanakan kegiatan.
- Solusi/rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang adalah :

1. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas Kader IMP.
2. Melakukan advokasi terus menerus kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan tentang pentingnya peran serta Kader IMP dalam pelaksanaan program Bangga Kencana di masyarakat.

- **Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** dengan *output* : Laporan Pendistribusian Alokon dan *outcome* : Terpenuhinya kebutuhan alokon untuk penyuluhan KB.

Faktor Pendorong tercapainya kinerja kegiatan adalah :

1. Adanya dukungan anggaran serta sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan.



Gambar 1.13 :Lomba IMP dan kb lestari tk provinsi kep babel

2. Koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, provinsi, daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.
3. Makin meningkatnya minat Masyarakat terhadap pemakaian kontrasepsi sebagai upaya mengatur jarak kelahiran.

Faktor Penghambat capaian kinerja Kegiatan adalah:

1. Kualitas pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB di Sistem Informasi Keluarga (SIGA) masih perlu ditingkatkan.
2. Rumor negatif di masyarakat terkait efek samping penggunaan kontrasepsi terutama kontrasepsi modern.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 237.749.600 dengan realisasi sebesar Rp. 219.528.809 atau 92,34% dari pagu anggaran yang ditetapkan.



Gambar 1.14 : Kegiatan dalam rangka kunjungan kunjungan Direktur Bina lini Lapangan BKKBN RI dan DPP IPKB sekaligus Distribusi GenRe kit bagi PIK remaja kec tgpandan terpilih

Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah:  
Faktor pendorong :

1. Adanya perencanaan anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya monitoring dan evaluasi berkala terkait realisasi kegiatan.
3. Adanya dukungan penyediaan alat kontrasepsi serta obat pendamping dari Gudang Alkon BKKBN Provinsi.

Faktor penghambat:

1. Keterbatasan SDM di lini lapangan terutama PKB/PLKB yang mengelola program Bangga Kencana di masyarakat.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

**(1) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**

Adapun faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja sub kegiatan adalah:

Faktor pendorong adalah:

1. Adanya dukungan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana untuk pelayanan KB untuk mengakomodir anggaran yang tidak tersedia melalui APBD.

2. Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan mitra kerja dan OPD terkait (misalnya Dinas Kesehatan dan Puskesmas) yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan KB di masyarakat.

Faktor penghambat:

1. Kemampuan Kader PKB/PLKB dan Kader IMP dalam KIE KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang masih perlu ditingkatkan.
2. Terbatasnya SDM di bidang yang mengelola dan melaksanakan sub kegiatan ini.

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 237.749.600 dengan realisasi sebesar Rp. 219.528.809 atau 92,34% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran sub kegiatan adalah :

Faktor pendorong :

1. Adanya perencanaan anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya monitoring dan evaluasi berkala terkait realisasi kegiatan.
3. Adanya dukungan penyediaan alat kontrasepsi serta obat pendamping dari Gudang Alkon BKKBN Provinsi.

Faktor penghambat :

1. Keterbatasan SDM yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Solusi/rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang adalah :

1. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas tentang pelaksanaan KIE KB MKJP kepada Kader IMP dan PKB/PLKB.
2. Meningkatkan promosi KB MKJP kepada masyarakat melalui berbagai media.
3. Meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB di SIGA dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

### **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

- **Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** dengan *output* : Laporan Pelaksanaan Orientasi Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan *outcome* : Meningkatnya kualitas kader Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Faktor Pendorong tercapainya kinerja Kegiatan adalah :

1. Koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, provinsi, daerah, kecamatan dan desa/kelurahan terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Faktor Penghambat capaian kinerja Kegiatan antara lain adalah

1. masih terbatasnya anggaran di Tingkat desa/kelurahan untuk operasional kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK Remaja)
2. Masih rendahnya minat Masyarakat untuk bergabung menjadi anggota kelompok kegiatan.
3. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 405.158.000 dengan realisasi sebesar Rp. 379.611.592 atau 93,69% dari pagu anggaran yang ditetapkan.



Gambar 1.15 : Pengiriman Duta Genre Tk. Kab. Belitung ke Tk Provinsi Babel dan meraih juara II Tk. Provinsi

Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah:

1. Adanya perencanaan anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya dukungan dari pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan terkait pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat yang dirasa sangat mengganggu adalah keterbatasan SDM yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- (1) Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**

Adapun faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja sub kegiatan adalah:

1. Adanya perencanaan anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya monitoring dan evaluasi berkala terkait realisasi kegiatan.
3. Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan.

Faktor penghambat:

1. Masih rendahnya kemampuan SDM pengelola kelompok kegiatan di desa/kelurahan.
2. Masih rendahnya porsi anggaran desa/kelurahan untuk operasional pengelolaan kelompok kegiatan.
3. Minat masyarakat yang rendah untuk ikut berpartisipasi menjadi pengelola kelompok kegiatan karena hal tersebut bersifat sosial.

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 325.160.000 dengan realisasi sebesar Rp. 301.364.928 atau 92,68% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran sub kegiatan adalah:

1. Adanya perencanaan anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya monitoring dan evaluasi berkala terkait realisasi kegiatan.

Faktor penghambatnya adalah karena keterbatasan SDM yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

**(2) Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**

Adapun faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja sub kegiatan adalah :

1. Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan
2. Adanya koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dan pihak lain yang terkait.

Faktor penghambat:

1. Masih rendahnya kemampuan SDM pengelola kelompok kegiatan di desa/kelurahan.
2. Masih rendahnya porsi anggaran desa/kelurahan untuk operasional pengelolaan kelompok kegiatan.

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 79.998.000 dengan realisasi sebesar Rp. 78.246.664 atau 97,81% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran sub kegiatan adalah :

1. Adanya perencanaan anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya monitoring dan evaluasi berkala terkait realisasi kegiatan.

Faktor penghambat adalah Keterbatasan SDM yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- **Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** dengan *output* : Laporan pembinaan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga dan *outcome* : Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga  
Faktor Pendorong tercapainya kinerja Kegiatan adalah :

1. Tersedianya dukungan anggaran dari DAK Non Fisik
2. Adanya komitmen dan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Faktor Penghambat capaian kinerja kegiatan adalah karena keterbatasan sumber daya terutama tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.470.558.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.141.858.700 atau 86,70% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah:

1. Tersedianya petunjuk teknis penggunaan anggaran DAK Non Fisik BOKB yang diterbitkan oleh BKKBN.
2. Komitmen dan koordinasi yang baik dengan semua pihak yang terkait dengan realisasi keuangan.
3. Monitoring dan evaluasi berkala terkait realisasi fisik maupun keuangan.

Faktor penghambat:

1. Keterbatasan SDM yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- (1) **Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan**

Adapun faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja sub kegiatan adalah:

1. Tersedianya anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)



Gambar 1.16 :  
Distribusi GenRe Kit dan sosialisasi penggunaan di SPM 3 dan SMPN 5 Tanjungpandan Hasil pengadaan dari DAK Non Fisik Sub Bidang KB

2. Monitoring dan evaluasi secara terus menerus oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terkait pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat:

1. Terbatasnya SDM yang mengelola pelaksanaan kegiatan.

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 2.470.558.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.141.858.700 atau 86,70% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran sub kegiatan adalah:

1. Adanya petunjuk teknis dari BKKBN terkait pelaksanaan kegiatan.
2. Koordinasi dengan mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan telah terjalin baik.

Faktor penghambat :

1. Keterbatasan SDM di bidang yang mengelola dan melaksanakan kegiatan BOKB.
2. Tidak tersedianya anggaran untuk BBM dan sewa transportasi laut.

### **Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Untuk mendukung tercapainya target kinerja sasaran staregis yang menunjang bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diupayakan melalui program-program sebagai pendukung pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan untuk mendukung tercapainya target kinerja program yang telah ditetapkan masing-masing program mengupayakannya melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sebagai berikut:

**Tabel 3.38 Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	1. Persentase Pengelolaan Administrasi dan Keuangan sesuai aturan yang berlaku 2. Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bumdes		
	Anggaran		1.039.694.044	953.617.600
	Realisasi		1.017.371.898	936.076.229
	%		97,85	98,16
	<b>Kegiatan :</b> Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Output :</i> Laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa <i>Outcome :</i> Administrasi pemerintahan desa yang sesuai regulasi		
	Anggaran		1.039.694.044	953.617.600
	Realisasi		1.017.371.898	936.076.229
	%		97,85	98,16
	<b>Sub Kegiatan :</b> Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	Anggaran		835.140.194	862.985.100
	Realisasi		826.227.898	853.742.048
	%		98,93	98,92
	<b>Sub Kegiatan :</b> Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	<i>Keluaran :</i> Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa		
	Anggaran		53.278.750	30.665.000
	Realisasi		42.958.712	29.992.000
	%		80,63	97,80
	<b>Sub Kegiatan :</b> Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	<i>Keluaran :</i> • Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
	Anggaran		49.192.350	59.967.500
	Realisasi		47.130.860	52.342.181
	%		95,81	87,28
	<b>Sub Kegiatan :</b> Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	<i>Keluaran :</i>		
	Anggaran		102.082.750	

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Realisasi		101.054.428	
	%		98,99	
<b>2</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif		
	Anggaran		1.155.621.045	911.601.850
	Realisasi		738.157.427	874.671.987
	%		63,88	95,94
	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Kabupaten/Kota	<i>Output</i> : Laporan kegiatan tahunan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat <i>Outcome</i> : Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat		
	Anggaran		1.155.621.045	911.601.850
	Realisasi		738.157.427	874.671.987
	%		63,88	95,94
	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<i>Keluaran</i> : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
	Anggaran		243.851.950	219.530.800
	Realisasi		168.950.830	191.296.000
	%		69,28	87,13
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya		
	Anggaran		36.753.850	33.810.000
	Realisasi		36.584.500	33.655.000
	%		99,54	99,54
	<b>Sub Kegiatan</b> : Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat	<i>Keluaran</i> :		
	Anggaran		230.000.000	
	Realisasi		-	
	%		-	
	<b>Sub Kegiatan</b> :	- <i>Keluaran</i> :		

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
	Anggaran		66.054.600	
	Realisasi		62.842.981	
	%		95,14	
	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
	Anggaran		578.960.645	658.261.050
	Realisasi		469.779.116	649.720.987
	%		81,14	98,70
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				
	Anggaran		2.195.315.089	1.865.219.450
	Realisasi		1.755.529.325	1.810.748.216
	%		79,97	97,07

### Program Administrasi Pemerintah Desa

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan *output*: Laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan *outcome* : Administrasi pemerintahan desa yang sesuai regulasi

Faktor Pendorong tercapainya kinerja kegiatan adalah:

1. Tersedianya anggaran untuk melakukan pembinaan dan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
2. Peran pendamping profesional desa yang ikut membina penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
3. Ketersediaan data capaian realisasi keuangan per desa, melalui aplikasi Siskeudes online dan Omspan
4. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa secara berkala,
5. Tersedianya regulasi dari Pusat dan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Faktor Penghambat capaian kinerja adalah:

1. Regulasi yang berubah - ubah sehingga mengharuskan dilakukan penyesuaian Perbup atau perda
2. keterlambatan penetapan regulasi dari pusat (terutama regulasi yang menyangkut perencanaan di desa)
3. sering terjadinya mutasi perangkat desa, terutama perangkat yang membidangi keuangan dan perencanaan di desa.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.953.617.600 dengan realisasi sebesar Rp. 936.076.229 atau 98,16 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah :

Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah dibuat serta kerjasama dengan OPD terkait, Tenaga Ahli dari Program P3MD Kemendes dan BPJS Kesehatan Kabupaten Belitung

Faktor penghambat : Masih kurangnya anggaran kegiatan untuk mengakomodir jaminan Kesehatan Kepala desa dan Perangkat desa penganggaran masih diutamakan untuk 10 bulan dan 2 bulan harus dianggarkan di perubahan APBD serta anggaran untuk pembinaan dan pelatihan BUMDesa dan kegiatan evaluasi serta lomba desa yang tidak dapat dianggarkan.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.17 : Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Desa dan Ketua BPD Tahun 2024

(2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan adalah:

- Sudah tersusunnya jadwal kegiatan (siklus) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di desa sehingga pembinaan yang dilakukan mengikuti siklus/jadwal perencanaan di desa.
- Ketersediaan data capaian realisasi keuangan desa sehingga memungkinkan untuk melakukan monitoring dan pembinaan atas hambatan yang mungkin di lalui pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan.
- Pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa secara berkala,

Faktor penghambat :

- Kurangnya pemahaman aparat desa dalam penerapan pelaksanaan regulasi yang mengatur tentang desa
- Kurangnya anggaran untuk jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa



Gambar 1.18 Kegiatan sosialisasi peraturan bupati belitung nomor 26 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan bupati belitung nomor 71 tahun 2023 tentang penetapan alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten belitung kepada desa tahun anggaran 2024, peraturan bupati belitung nomor 27 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan bupati belitung nomor 72 tahun 2023 tentang penetapan alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten belitung kepada desa tahun anggaran 2024, peraturan bupati belitung nomor 28 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan transaksi non tunai pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.se-kecamatan membalong dan sijek

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 30.665.000 dengan realisasi sebesar Rp 29.992.000 atau 97,80% dari pagu anggaran yang ditetapkan dan faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat

(2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa. Hal yang menjadi faktor pendorong capaian sub kinerja kegiatan adalah:

- Partisipasi aktif pelaksana Operasional BUMDesa dalam kegiatan Pelatihan BUMDesa.

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 862.985.100 dengan realisasi sebesar Rp 853.742.048 atau 98,92% dari pagu anggaran yang ditetapkan Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat Solusi/rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang adalah .penganggaran penghargaan bagi desa yang berkinerja dan penyelenggaraan administrasi terbaik.

(1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan adalah adanya dukungan data dan informasi perangkat daerah opd tehnik terkait yang tergabung dalam Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati/Rancangan Peraturan Daerah.

Faktor penghambat tercapainya realisasi anggaran sub kegiatan adalah

- Tumpang tindih regulasi pusat yang mengatur tentang Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Poduk hokum melalui kanwil Kemenkumham yang memakan waktu.

- Koordinasi yang baik dengan stakeholder yang dapat membangun BUMdesa
- Tersedianya regulasi terkait BUMDesa yaitu PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menerangkan lebih rinci tentang penyusunan laporan Pertanggung jawaban keuangan BUMDesa dan Permendes 136 Tahun 2022.

Faktor penghambat capaian kinerja kegiatan adalah:

- Tidak adanya SDM di Bidang PMD yang mempunyai latar belakang pendidikan Ekonomi Akuntansi untuk melakukan pembinaan BUMDesa dalam penyusunan Laporan Keuangan BUMDes

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 59.967.500 dengan realisasi sebesar Rp 52.342.181 atau 87,28% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dan yang menjadi faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat.



Gambar 1.19: kegiatan pelatihan keuangan bumdesa tahun 2024

## Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Dalam Daerah Kabupaten / Kota

Faktor pendorong tercapainya kinerja kegiatan adalah:

1. Ketersediaan Anggaran untuk operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui APBDES di masing - masing desa.
2. Tersedianya dukungan anggaran untuk peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa

3. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa



Gambar: 1.20 Pembinaan kelembagaan pkk untuk desa-desa se-kec. membalong dan selat nasik

Faktor penghambat tercapainya kinerja kegiatan adalah:

- Kurangnya kesadaran dari Pemerintah Desa terkait pentingnya peran Lembaga kemasyarakatan Desa dalam proses pembangunan di desa meskipun telah dilakukan pembinaan.
- Kurangnya fasilitasi dari Pemerintah Desa terkait pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta pendayagunaannya.
- Banyaknya jenis lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, Posyandu), belum lagi adanya kelompok masyarakat lain seperti pokdarwis, gapoktan, satlinmas, kelompok nelayan, dan lain lain sesuai dengan kepentingannya, dimana secara keseluruhan lembaga2 tersebut membutuhkan fasilitasi dan perhatian dari Pemerintah Desa.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 911.601.850- dengan realisasi sebesar Rp. 874.671.987,- atau 95,94% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah

- Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah dibuat serta kerjasama dengan OPD tehnis terkait an pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
- Faktor penghambat : adanya beberapa sub kegiatan yang mendapatkan alokasi dana insentif daerah yang di anggarkan pada pertengahan tahun 2024 sehingga harus di realisasikan pada akhir tahun anggaran

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat

- Faktor penghambat capaian realisasi anggaran kegiatan adalah adanya tambahan alokasi anggaran insentif daerah yang masuk pada pertengahan tahun anggaran

Faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah:

- Faktor pendorong Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan Stakeholder dan OPD terkait
- Terbitnya peraturan yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga adat desa
- Terbitnya perda nomor 4 Tahun 2011 tentang Lembaga Adat Melayu Belitung
- Kerjasama yang baik Lembaga Adat Melayu Belitung

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 219.530.800- dengan realisasi sebesar Rp.,- 191.296.000 atau 87,13% dari pagu anggaran yang ditetapkan

- (2) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran sub kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat.

Faktor pendorong capaian kinerja adalah

- Tersedianya dukungan anggaran dari pemerintah Desa untuk kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Kerjasama yang baik dengan pemerintah desa dan Lembaga kemasyarakatan desa
- Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan stakeholder dan OPD terkait

Faktor penghambat capaian kinerja :

- Kurangnya kesadaran dari Pemerintah Desa terkait pentingnya peran Lembaga kemasyarakatan Desa dalam proses pembangunan di desa meskipun telah dilakukan pembinaan.

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 33.810.000- dengan realisasi sebesar Rp. 33.655.000 atau 99,54% dari pagu anggaran yang ditetapkan

### 3.2.7 Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja

Tujuan dari inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun sasaran inovasi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu OPD harus mampu menjawab berbagai masalah pemerintahan daerah melalui perencanaan program/kegiatan yang menghasilkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk Inovasi yang dilaksanakan DPPKBPM Kab. Belitung dalam rangka untuk pencapaian kinerja pada tahun 2024 adalah :

1. **Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dan Siskeudes Online.** Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dan Siskeudes Online terus dilaksanakan pada tahun 2024 pada semua desa di Kabupaten Belitung yang berjumlah 42 desa. Penerapan Transaksi Non Tunai di Desa di seluruh Kabupaten Belitung didukung oleh Peraturan

Bupati Belitung Nomor 51A Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pelaksanaan aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Sumbel Babel sebagai Mitra Desa terus meningkatkan implementasi penggunaan applikasi yang tersedia. Selain itu diupayakan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM perangkat desa yang mendukung dalam penyaluran dan penyimpanan keuangan berbasis internet banking. Penerapan transaksi non tunai diharapkan lebih dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan sumber-sumber pendapatan serta kekayaan desa dan transaksi non tunai memungkinkan proses pembayaran yang lebih cepat dan efisien. Dengan transaksi non tunai menggunakan teknologi keamanan yang canggih untuk melindungi data dan transaksi.

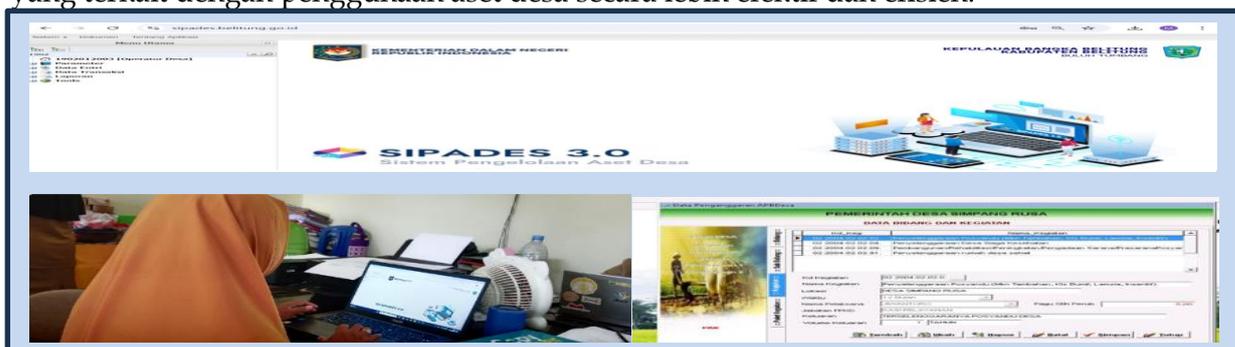


Gambar 1..21 Penggunaan aplikasi Siskeudes

Selain penggunaan sistem Transaksi Non Tunai di Desa, inovasi yang terus ditingkatkan pelaksanaannya pada tahun 2023 adalah lebih meningkatkan Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes di seluruh desa Kabupaten Belitung. **Siskeudes Online** yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa adalah perencanaan yang baik, pelaksanaan yang profesional, penatausahaan yang tertib, pelaporan dan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel.

Upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menggunakan sistem Siskeudes telah diterapkan penggunaan versi aplikasi Siskeudes Online V.2.0.5 menggantikan versi sebelumnya V.2.0.4. Aplikasi terbaru ini diharapkan dapat mempercepat serta mempermudah dalam pelaksanaan program desa mulai dari tingkat perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan sistem yang tersusun secara sistematis.

2. **Sistem aplikasi pengelolaan aset desa (Sipades)**, yang dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja pemerintahan desa diupayakan peningkatannya melalui penerapan atau aplikasi perencanaan administrasi aset desa berbasis sistem informasi mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan yang berbasis web sehingga memudahkan dalam proses pencatatan inventarisasi penatausahaan dan pelaporan aset Desa karena dilengkapi dengan kodifikasi dan labelisasi aset desa sesuai dengan pedomaan umum kodifikasi aset desa, pelaksanaan di kabupaten belitung sudah di mulai sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini terus diupayakan penyempurnaan penggunaannya. Sipades membantu pemerintah desa dalam mengelola aset desa, seperti tanah, bangunan, dan peralatan, secara lebih efektif dan efisien dan memungkinkan pemerintah desa untuk memantau dan melaporkan penggunaan aset desa secara lebih transparan dan akuntabel serta Sipades membantu pemerintah desa dalam mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan aset desa secara lebih efektif dan efisien.



Gambar 1,22: Penggunaan aplikasi Sipades di desa yang ada di kab. Belitung

3. **Kelas Calon Pengantin (Catin)**, merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh PD DPPKBPMD Kab. Belitung sejak tahun 2021 dan terus dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Seperti materi yang loebih variratif dan nara sumber yang kompeten. Hal ini dilakukan dlaam rangka mendukung dan menjalankan program Bangga Kencana.Kelas Calon Pengantin (Catin) dirancang untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada calon pengantin tentang kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan kehidupan berkeluarga yang sehat dan harmonis. Kelas Konseling Catin diisi pemateri dari berbagai unsur diantaranya Penyuluh KB, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Agama. Adapun materi yang disampaikan meliputi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, kehidupan berkeluarga yang sehat dan harmonis, komunikasi dan konflik dalam keluargaserta perencanaan keuangan dan ekonomi keluarga serta pembekalan untuk para catin diantaranya meliputi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, kesiapan dan proses kehamilan, penyakit menular seksual, ketahanan rumah tangga, keluarga sakinah serta stunting dan pola asuh 1000 HPK dan 8 Fungsi Keluarga.



Gambar: 1.23: Pelaksanaan Bimbingan Bagi Calon Pengantin pada Kelas Catin yang bekerjasama dengan KUA dan Departemen Agama Tanjungpandan

3. **KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Program Bangga Kencana) melalui media KIE tradisional.**

Pelaksanaan KIE dan promosi Program Bangga Kencana yang disesuaikan dengan kearifan lokal budaya khas Belitung yaitu melalui kesenian tradisional Campak Belitung. Seni Campak Belitung adalah seni berbalas pantun yang dalam hal ini dalam bahasa daerah Belitung dengan iringan musik dan gerakan tarian sederhana. Adapun KIE yang dilakukan melalui pantun-pantun berisikan tentang promosi program Bangga Kencana diantaranya perencanaan berkeluarga, penggunaan alat kontrasepsi hingga edukasi tentang stunting.



Gambar: 1.24: Campak Belitung di acara-acara seremoial

### 3.3 KINERJA LAINNYA TAHUN 2024

#### 1. Penghargaan/ Apresiasi

Tabel 3.39 Penghargaan Yang Diraih Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tingkat	PD Penerima Penghargaan	Dokumentasi																											
1	Desa Mandiri Tahun 2024 (Desa Simpang Rusa)	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Nasional	DPPKBPMD Kab. Belitung	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KABUPATEN/ KOTA</th> <th>KECAMATAN</th> <th>KODE DESA (BERI 100.1.1- 4117-2023)</th> <th>DESA</th> <th>IKS 2024</th> <th>IKK 2024</th> <th>IKL 2024</th> <th>NILAI DM 2024</th> <th>STATUS DM 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BEUTUNG</td> <td>MEBEHALONG</td> <td>190202004</td> <td>SIMPANG RUSA</td> <td>0,8857</td> <td>0,8667</td> <td>0,8000</td> <td>0,8508</td> <td>MANDIRI</td> </tr> <tr> <td>BEUTUNG</td> <td>MEBEHALONG</td> <td>190202005</td> <td>KEMEBIRI</td> <td>0,8857</td> <td>0,7000</td> <td>1,0000</td> <td>0,8352</td> <td>MANDIRI</td> </tr> </tbody> </table>	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KODE DESA (BERI 100.1.1- 4117-2023)	DESA	IKS 2024	IKK 2024	IKL 2024	NILAI DM 2024	STATUS DM 2024	BEUTUNG	MEBEHALONG	190202004	SIMPANG RUSA	0,8857	0,8667	0,8000	0,8508	MANDIRI	BEUTUNG	MEBEHALONG	190202005	KEMEBIRI	0,8857	0,7000	1,0000	0,8352	MANDIRI
KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KODE DESA (BERI 100.1.1- 4117-2023)	DESA	IKS 2024	IKK 2024	IKL 2024	NILAI DM 2024	STATUS DM 2024																								
BEUTUNG	MEBEHALONG	190202004	SIMPANG RUSA	0,8857	0,8667	0,8000	0,8508	MANDIRI																								
BEUTUNG	MEBEHALONG	190202005	KEMEBIRI	0,8857	0,7000	1,0000	0,8352	MANDIRI																								
2	Desa Mandiri Tahun 2024 (Desa Kembiri)	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Nasional	DPPKBPMD Kab. Belitung	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KABUPATEN/ KOTA</th> <th>KECAMATAN</th> <th>KODE DESA (BERI 100.1.1- 4117-2023)</th> <th>DESA</th> <th>IKS 2024</th> <th>IKK 2024</th> <th>IKL 2024</th> <th>NILAI DM 2024</th> <th>STATUS DM 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BEUTUNG</td> <td>MEBEHALONG</td> <td>190202004</td> <td>SIMPANG RUSA</td> <td>0,8857</td> <td>0,8667</td> <td>0,8000</td> <td>0,8508</td> <td>MANDIRI</td> </tr> <tr> <td>BEUTUNG</td> <td>MEBEHALONG</td> <td>190202005</td> <td>KEMEBIRI</td> <td>0,8857</td> <td>0,7000</td> <td>1,0000</td> <td>0,8352</td> <td>MANDIRI</td> </tr> </tbody> </table>	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KODE DESA (BERI 100.1.1- 4117-2023)	DESA	IKS 2024	IKK 2024	IKL 2024	NILAI DM 2024	STATUS DM 2024	BEUTUNG	MEBEHALONG	190202004	SIMPANG RUSA	0,8857	0,8667	0,8000	0,8508	MANDIRI	BEUTUNG	MEBEHALONG	190202005	KEMEBIRI	0,8857	0,7000	1,0000	0,8352	MANDIRI
KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KODE DESA (BERI 100.1.1- 4117-2023)	DESA	IKS 2024	IKK 2024	IKL 2024	NILAI DM 2024	STATUS DM 2024																								
BEUTUNG	MEBEHALONG	190202004	SIMPANG RUSA	0,8857	0,8667	0,8000	0,8508	MANDIRI																								
BEUTUNG	MEBEHALONG	190202005	KEMEBIRI	0,8857	0,7000	1,0000	0,8352	MANDIRI																								
3	Desa Mandiri Tahun 2024 (Desa Petaling)	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Nasional	DPPKBPMD Kab. Belitung	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>BEUTUNG</td> <td>SELAT NASIK</td> <td>190201001</td> <td>SELAT NASIK</td> <td>0,9143</td> <td>0,7667</td> <td>0,9333</td> <td>0,8714</td> <td>MANDIRI</td> </tr> <tr> <td>BEUTUNG</td> <td>SELAT NASIK</td> <td>190201002</td> <td>PETALING</td> <td>0,9257</td> <td>0,7833</td> <td>0,9333</td> <td>0,8808</td> <td>MANDIRI</td> </tr> </tbody> </table>	BEUTUNG	SELAT NASIK	190201001	SELAT NASIK	0,9143	0,7667	0,9333	0,8714	MANDIRI	BEUTUNG	SELAT NASIK	190201002	PETALING	0,9257	0,7833	0,9333	0,8808	MANDIRI									
BEUTUNG	SELAT NASIK	190201001	SELAT NASIK	0,9143	0,7667	0,9333	0,8714	MANDIRI																								
BEUTUNG	SELAT NASIK	190201002	PETALING	0,9257	0,7833	0,9333	0,8808	MANDIRI																								
4	Desa Mandiri Tahun 2024 (Desa Terong)	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Nasional	DPPKBPMD Kab. Belitung	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KABUPATEN/ KOTA</th> <th>KECAMATAN</th> <th>KODE DESA (BERI 100.1.1- 4117-2023)</th> <th>DESA</th> <th>IKS 2024</th> <th>IKK 2024</th> <th>IKL 2024</th> <th>NILAI DM 2024</th> <th>STATUS DM 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BEUTUNG</td> <td>ISUK</td> <td>190204003</td> <td>TERONG</td> <td>0,9086</td> <td>0,8833</td> <td>0,6667</td> <td>0,8195</td> <td>MANDIRI</td> </tr> </tbody> </table>	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KODE DESA (BERI 100.1.1- 4117-2023)	DESA	IKS 2024	IKK 2024	IKL 2024	NILAI DM 2024	STATUS DM 2024	BEUTUNG	ISUK	190204003	TERONG	0,9086	0,8833	0,6667	0,8195	MANDIRI									
KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KODE DESA (BERI 100.1.1- 4117-2023)	DESA	IKS 2024	IKK 2024	IKL 2024	NILAI DM 2024	STATUS DM 2024																								
BEUTUNG	ISUK	190204003	TERONG	0,9086	0,8833	0,6667	0,8195	MANDIRI																								
5	Desa Mandiri Tahun 2024 (Desa Tanjung Binga)	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Nasional	DPPKBPMD Kab. Belitung	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>BEUTUNG</td> <td>ISUK</td> <td>190204004</td> <td>IR SEBUK</td> <td>0,8914</td> <td>0,7000</td> <td>0,8667</td> <td>0,8194</td> <td>MANDIRI</td> </tr> <tr> <td>BEUTUNG</td> <td>ISUK</td> <td>190204005</td> <td>TANJUNG BINGA</td> <td>0,9200</td> <td>0,8500</td> <td>0,8667</td> <td>0,8789</td> <td>MANDIRI</td> </tr> </tbody> </table>	BEUTUNG	ISUK	190204004	IR SEBUK	0,8914	0,7000	0,8667	0,8194	MANDIRI	BEUTUNG	ISUK	190204005	TANJUNG BINGA	0,9200	0,8500	0,8667	0,8789	MANDIRI									
BEUTUNG	ISUK	190204004	IR SEBUK	0,8914	0,7000	0,8667	0,8194	MANDIRI																								
BEUTUNG	ISUK	190204005	TANJUNG BINGA	0,9200	0,8500	0,8667	0,8789	MANDIRI																								
6	Desa Mandiri Tahun 2024 (Desa Cerucuk)	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Nasional	DPPKBPMD Kab. Belitung																												

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tingkat	PD Penerima Penghargaan	Dokumentasi
7	Peserta Terbaik Paralegal Justice award dalam kategori Penyelesaian Berbagai Konflik atau Permasalahan Hukum Non Litigasi yang dihadapi oleh Masyarakat di wilayahnya (Desa Keciput)	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Nasional	DPPKBPM Kab. Belitung	
8	Juara II Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2024 Tingkat Propinsi Kep Babel (Desa Sijuk)	Dinsos PMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	DPPKBPM Kab. Belitung	
9	Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2024 Tingkat Propinsi Kep Babel (Kelurahan Kampong Damai)	Dinsos PMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	DPPKBPM Kab. Belitung	
10	Peringkat 7 Desa Berkinerja Baik Regional I dalam Konvergensi Penurunan Stunting tahun 2024 (Desa Keciput)	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Nasional	DPPKBPM Kab. Belitung	
11	Juara 3 Kelompok Dasawisma (Desa badau)	Dinsos PMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	DPPKBPM Kab. Belitung	
12	Juara 3 Pemanfaatan Halaman Pekarangan (Desa Badau)	Dinsos PMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	DPPKBPM Kab. Belitung	
13	Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2024 / 50 Desa Wisata Terbaik (Desa Keciput)	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nasional	DPPKBPM Kab. Belitung	

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tingkat	PD Penerima Penghargaan	Dokumentasi
14	Juara III Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Kategori Umum (Mulyana)	Dinsos PMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	DPPKBPMD Kab. Belitung	
15	Desa Berkinerja Terbaik Penurunan Stunting (Desa Keciput)	Dinsos PMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	DPPKBPMD Kab. Belitung	
16	Desa Berkinerja Terbaik Penanganan Kemiskinan Ekstrem (Desa Ibul)	Dinsos PMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	DPPKBPMD Kab. Belitung	
17	Kabupaten dengan Kinerja Penyaluran Dana Desa Terbaik Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung	KPPN Pangkalpinang	Provinsi	DPPKBPMD Kab. Belitung	
17	Pemenang Penghargaan Pradipta Kencana Eka Kategori PLKB Non ASN (a.n. Malina Saputri, S.Keb) pada Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik	BKKBN RI	Nasional	DPPKBPMD Kab. Belitung	
18	Pencapaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi IMPLAN Terbaik Tahun 2023 (a.n. DPPKBPMD Kab. Belitung) pada Evaluasi Program Bangga Kencana	Perwakilan BKKBN Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi	DPPKBPMD Kab. Belitung	
19	Terbaik III Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mendukung Program Bangga Kencana Tahun 2024 (a.n. DPPKBPMD Kab. Belitung)	DP3ACSKB Provinsi Kep. Bangka Belitung	Provinsi	DPPKBPMD Kab. Belitung	

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tingkat	PD Penerima Penghargaan	Dokumentasi
20	Terbaik VI Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2024 (a.n. Desa Dukong Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung)	DP3ACSKB Provinsi Kep. Bangka Belitung	Provinsi	DPPKBPMD Kab. Belitung	
21	Pencapaian Peserta KB MKJP Terbaik pada Pelayanan KB Hari Kartini Tahun 2024 (a.n. PKB/PLKB Wilayah Kerja Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung)	Perwakilan BKKBN Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi	DPPKBPMD Kab. Belitung	
22	Pemenang I PLKB Non ASN Terbaik pada Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik (a.n. Malina Saputri, S.Keb)	Perwakilan BKKBN Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi	DPPKBPMD Kab. Belitung	

## 2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Belitung menetapkan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, memperkuat transparansi keuangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini terutama berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kebijakan strategis ini merupakan kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran sebagai berikut:

**Tabel 3.40 Kebijakan Strategis Pada Tahun 2024**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			
1.	Terbitnya Perbup No 3A Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)	Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa yang merupakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa
2.	Terbitnya Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 8) dan Peraturan Bupati Nomor 25	Untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

	Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2024.	Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 25).	
3	Terbitnya Peraturan Bupati Belitung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2024.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 8) dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 25).	Untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024.
4	Terbitnya Perbup No 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)	Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi non tunai pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
5	Terbitnya Perbup No 30A Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum di Desa.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)	Untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta guna mewujudkan keseragaman, kebakuan besaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.
6	Terbitnya Perbup No 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)	Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa yang merupakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.
7	Terbitnya Peraturan Bupati Belitung Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 14) dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran	Untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

		2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 46).	
8	Terbitnya Peraturan Bupati Belitung Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 14) dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 46).	Untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.
9	Terbitnya Peraturan Bupati Belitung Nomor 48 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2028 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).	Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta dan prakarsa masyarakat dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
1.	Terbitnya Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting	Untuk mewujudkan konvergensi di daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi untuk mendukung pencapaian target nasional hingga 14% pada tahun 2024

### 3.4 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI DAN IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Bupati Belitung Nomor: 700.1.2.1/202/TL/INSPEK/2024 tanggal 21 Oktober 2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung atas hasil Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi : SAKIP Tahun 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung, Nomor: 700.1.2.1/102/RLKin/INSPEK/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung dan, ini disampaikan hal-hal yang berkenaan dengan tindak lanjut atas LHE tersebut :

#### 1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

- Bahwa DPPKBPMK Kab. Belitung telah dan akan mempublikasikan dokumen perencanaan tepat waktu pada website OPD
- Bahwa atas hasil evaluasi pada komponen Evaluasi Perencanaan Kinerja poin b. Kondisi Kualitas Perencanaan Kinerja, angka 3. Terdapat perbedaan sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Renstra, kami sampaikan bahwa sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja Eselon II *telah sesuai* dengan Renstra dan tidak terdapat perbedaan di antara 2 dokumen tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan lampiran yang kami sampaikan berupa halaman 45

Dokumen Perubahan ketiga Renstra PD DPPKBPMMD Tahun 2018-2023- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD yang memuat Tujuan dan Sasaran OPD yang dirumuskan menjadi Sasaran Strategis OPD pada Dokumen Indikator Utama OPD sesuai Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II. Atas bukti dukung tersebut dapat dilihat pada link di bawah ini:

[https://drive.google.com/file/d/1bF1tpqIozyzGfyE8xr5-s9ZNH8MvY5a3/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1bF1tpqIozyzGfyE8xr5-s9ZNH8MvY5a3/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1O4zKHk0eIijxgfn9hIBhPrjhP3mOcU-/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1O4zKHk0eIijxgfn9hIBhPrjhP3mOcU-/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1Tkw1egt3yQcm2fuQiqOOmeF7wqm6PZ3I/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1Tkw1egt3yQcm2fuQiqOOmeF7wqm6PZ3I/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1tmKdy8fRUmM3tokd1gRb5SD\\_tNJYbFAO/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1tmKdy8fRUmM3tokd1gRb5SD_tNJYbFAO/view?usp=drive_link)

- Bahwa atas hasil evaluasi pada komponen Evaluasi Perencanaan Kinerja poin c. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja, angka 3. Rencana aksi kinerja belum sepenuhnya berjalan dinamis dan dipantau secara berkala, DPPKBPMMD Kabupaten Belitung akan memantau secara berkala Rencana Aksi Kinerja sehingga rencana aksi dapat berjalan dengan dinamis.

## 2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

- Bahwa atas hasil evaluasi pada komponen Evaluasi Pengukuran Kinerja poin a Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran, angka 1. Belum ada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, yang ada hanya SOP Pengumpulan Data Kinerja, DPPKBPMMD Kabupaten Belitung telah menyusun Pedoman Pengukuran Kinerja di lingkungan DPPKBPMMD Kab. Belitung.
- Bahwa atas hasil evaluasi pada komponen Evaluasi Pengukuran Kinerja poin a Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran, angka 2. Belum sepenuhnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan belum sepenuhnya terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja, dapat disampaikan bahwa Definisi Operasional atas kinerja yang akan diukur telah tercantum pada Dokumen IKU PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung sesuai Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Dokumen IKU DPPKBPMMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 sebagaimana terlampir memuat Sasaran Startegis OPD, Indikator Kinerja Utama, Penjelasan Formulasi Penghitungan dan Sumber Data atau dapat dilihat pada link dibawah ini:  
[https://drive.google.com/file/d/1Tkw1egt3yQcm2fuQiqOOmeF7wqm6PZ3I/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1Tkw1egt3yQcm2fuQiqOOmeF7wqm6PZ3I/view?usp=drive_link)
- Bahwa atas hasil evaluasi pada komponen Evaluasi Pengukuran Kinerja poin b. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja, angka 1. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mengukur capaian kinerja yang diharapkan, karena belum adanya Kertas Kerja Perhitungan Caparan Kinerja, DPPKBPMMD kedepannya akan menyusun Kertas Kerja Perhitungan Caparan Kinerja dimaksud.
- Bahwa atas hasil evaluasi pada komponen Evaluasi Pengukuran Kinerja poin b. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja, angka 4. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), disampaikan bahwa DPPKBPMMD *telah sepenuhnya memanfaatkan*

*teknologi informasi (aplikasi)* dalam pengumpulan dan pengukuran data capaian kinerja sasaran strategis OPD. Pengumpulan data capaian kinerja dengan output status Desa Maju, Desa Mandiri Desa Berkembang, Desa Tertinggal di Kabupaten Belitung menggunakan website aplikasi Indeks Desa Membangun yang dikelola oleh Kemendesa PDTT dan transmigrasi RI yang dapat diakses melalui alamat <https://idm.kemendesa.go.id/> dan data dukung lainnya seperti serapan Dana Desa, ADD dan BHPRP yang berhubungan dengan kuesioner IDM terkait Indeks ketahanan Ekonomi, memakai aplikasi siskeudes. Sedangkan Pengumpulan data capaian kinerja dengan output Total Fertility Rate (TFR), Persentase PUS ber-KB dan Tingkat Partisipasi Peserta KB MJKP, OPD DPPKBPMMD melalui akun user OPD menggunakan aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) yang dikelola oleh BKKBN yang dapat diakses melalui laman <https://siga.bkkbn.go.id/> dan untuk data Laju Pertumbuhan Penduduk diperoleh melalui laman Belitung Dalam Angka yang dapat diakses melalui laman <https://belitungkab.bps.go.id> yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung.

- Bahwa atas hasil evaluasi pada komponen Evaluasi Pengukuran Kinerja poin c. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja, angka 2. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja penghasilan, DPPKBPMMD Kab. Belitung berkomitmen bahwa Pengukuran Kinerja akan dijadikan dasar dalam penyesuaian pemberian/pengurangan tunjangan penghasilan

### 3. Evaluasi Pelaporan Kinerja

- Bahwa atas hasil evaluasi pada komponen Evaluasi Pelaporan Kinerja poin a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja, angka 1. Dokumen laporan kinerja telah disusun, namun belum disusun secara berkala dan dokumen laporan kinerja telah direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu, DPPKBPMMD Kab. Belitung pada tahun 2023 telah menyusun dokumen pelaporan dan menyampaikan secara berkala dan tepat waktu sesuai format yang berlaku dan berpedoman pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Atas evidence tersebut dapat dilihat pada link di bawah ini:

[https://drive.google.com/file/d/191kPNskMBSY1eMK7Jj3SvcsBQgKhCIKq/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/191kPNskMBSY1eMK7Jj3SvcsBQgKhCIKq/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1U1596Fx3uPx0ta5\\_IiwPz1L1mJlo9WaU/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1U1596Fx3uPx0ta5_IiwPz1L1mJlo9WaU/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/10K5uytIR3\\_CVtdmnovJxNKZ590\\_6m3EI/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/10K5uytIR3_CVtdmnovJxNKZ590_6m3EI/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1KO2g7FZxxl7JDoccUXvyvuh7XovwRLle/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1KO2g7FZxxl7JDoccUXvyvuh7XovwRLle/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1eAXWR7JXjNHZRIVCWIB2xRhYNIwZV9Pj/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1eAXWR7JXjNHZRIVCWIB2xRhYNIwZV9Pj/view?usp=drive_link)

### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Bahwa atas hasil evaluasi pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal poin b. Kondisi Kualitas Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar namun belum menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi), DPPKBPMMD Kab. Belitung telah menggunakan aplikasi dalam implementasi akuntabilitas kinerja internal, salah satu contohnya menggunakan aplikasi SIPD yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan dapat diakses melalui laman: <https://sipd.kemendagri.go.id/landing> dan melalui akun user name OPD DPPKBPMMD rutin menyampaikan hasil kinerja pada aplikasi KKBN MORENA yang diakses melalui laman <https://morena.bkkbn.go.id/> dan pada Sistem Aplikasi

Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang diakses melalui laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>

## 5. Rekomendasi

Tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, pada OPD DPPKBPM Kab. Belitung adalah sebagai berikut:

- 1) bahwa DPPKBPM Kabupaten. Belitung pada tahun 2024 telah menyusun rencana aksi kinerja sampai ke level individu yang dilengkapi dengan rencana waktu pelaksanaan, bukti dukung dapat diakses melalui link [https://drive.google.com/file/d/1MKnmRADkPKSEvPg\\_rHGbITxzbepEb-qH/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1MKnmRADkPKSEvPg_rHGbITxzbepEb-qH/view?usp=drive_link) ;
- 2) bahwa DPPKBPM Kab. Belitung telah mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja di website OPD dan dapat diakses pada laman <https://dppkbpm.kab.belitung.go.id/> ;
- 3) bahwa pada tahun 2023 dan tahun 2024 DPPKBPM Kab. Belitung telah menyelaraskan sasaran strategi pada Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Renstra;
- 4) bahwa DPPKBPM Kab. Belitung telah menyusun Pedoman Petunjuk Teknis Pengumpulan Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja berupa SK Kepala DPPKBPM Kab. Belitung Nomor: 700.1.1.3/050.1/I/DPPKBPM/2024 dan dapat dilihat pada link berikut: [https://drive.google.com/file/d/1cT99JMzrNncjF40WEpdMHHnLXNoDqq6H/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1cT99JMzrNncjF40WEpdMHHnLXNoDqq6H/view?usp=drive_link) ;
- 5) bahwa DPPKBPM Kab. Belitung akan menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk pemberian *reward* dan *punishment*.

## 3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2024 pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ini dicapai PD DPPKBPM Kab. Belitung melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung sebesar Rp12.211.067.105,- dan realisasi anggaran mencapai Rp11.182.618.436,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,58% belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.43 berikut:

Tabel 3.41 Anggaran dan Realisasi Belanja pencapaian Sasaran Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Rasio Capaian	Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya Program Bangga kencana	iBangga (Indeks Pembangunan keluarga)	65,32%	64,90%	99,36%%	104.732.500	98.271.520	93,83
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2,41	2,12	112,03%	3.861.283.050	3.444.099.795	89,196
Meningkatkan Perkembangan Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	20 Desa	23 Desa	115%.	953.617.600	935.796.229	98,13
Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	20 Desa	23 Desa	115%.	911.601.850	883.271.987	96,89

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator					6.379.832.105	5.821.178.905	91,24
1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%				
2. Indeks Profesionalitas ASN	80%	73,50%	91,88%				
3. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur	100%	100%	100%				
4. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	100%				

Apabila dicermati secara lebih dalam pada realisasi belanja masing-masing program, maka dapat dirangkum ke dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.42 Realisasi Anggaran Program Utama dan Pendukung Sasaran Tahun 2024**

Sasaran (1)	Program (2)	Indikator Program (3)	Realisasi %
			Tahun 2024 (5)
Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	Program Pengendalian Penduduk	Unmet need	93,83
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	93,61
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase PUS Ber KB	87,68
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Persentase Pengelolaan Keuangan desa Sesuai dengan peraturan yang berlaku 4. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa	98,13
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	96,89
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 2. Indeks Profesionalitas ASN 3. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur	91,24

Sasaran	Program	Indikator Program	Realisasi %
			Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(5)
		4. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	

Pada tabel 3.42 menampilkan realisasi anggaran masing-masing program utama dan pendukung capaian kinerja. Seluruh program utama memiliki realisasi anggaran yang cukup baik. Meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Efisiensi anggaran pada Program Pengendalian Penduduk sebesar 6,17%, atau Rp.6.460.980,- efisiensi tersebut ada pada Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Kegiatan Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Efisiensi anggaran selanjutnya pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebesar 6,39% atau Rp62.937.547 ,- efisiensi tersebut terdapat pada 2 kegiatan yaitu Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.

Efisiensi pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sebesar 12,32%, atau Rp354.245.708,- efisiensi terdapat pada 2 kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Efisiensi Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar 1,87% atau Rp196.165.829,-terdapat pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Sedangkan efisiensi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebesar 3,11% atau Rp98.470.137,- yang terdapat pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Untuk efisiensi program pendukung yaitu program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 8,76% atau sebesar Rp432.953.200,- yang dialokasikan untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.43 Analisis Efisiensi

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi Tahun 2023
Terwujudnya program Bangga Kencana	iBangga (Indeks Pembangunan keluarga)	99,36	93,83	6,17
Program Pengendalian Penduduk	Unmet need	140,59	93,83	6,17
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	112,03	90,65	9,35
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	116,34	93,61	6,39
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase PUS Ber KB	116,34	87,68	12,32
Meningkatkan Perkembangan Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	115	98,13	1,87
Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Persentase Pengelolaan Keuangan desa Sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	96,06	3,14
	1. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa	111	87,28	12,72
Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	115	96,89	3,11
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	114,05	96,89	3,11
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	91,24	8,76
	2. Indeks Profesionalitas ASN	91,88		
	3. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur	100		
	4. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100		

Dari tabel analisis efisiensi keuangan yang dibandingkan dengan capaian indikator kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja program telah mencapai target yang baik, bahkan melebihi 100% dalam beberapa indikator. Namun, tingkat efisiensi keuangan masih menunjukkan adanya ruang perbaikan.

Program dengan tingkat capaian kinerja yang sangat tinggi seperti *Unmet Need* (140,59%) dan *Persentase PUS Ber-KB* (116,34%) menunjukkan efektivitas kebijakan, tetapi efisiensinya perlu dicermati lebih lanjut. Misalnya, program *Persentase PUS Ber-KB* memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah (12,32%) dibandingkan dengan program lain yang memiliki capaian tinggi namun efisiensinya lebih baik.

Sementara itu, program dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, seperti *Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri* (98,13%) menunjukkan bahwa alokasi dana telah terserap optimal, meskipun tingkat capaian kinerja 115% masih memberikan indikasi adanya kemungkinan ketidakseimbangan antara realisasi program dan kebutuhan dana.

Secara umum, program-program yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan penguatan kelembagaan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dibandingkan program-program yang bersifat teknis dan implementatif, seperti program pengendalian

penduduk dan pemberdayaan keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas program tidak selalu berbanding lurus dengan efisiensi anggaran, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai alokasi dana agar keseimbangan antara kinerja dan efisiensi tetap terjaga.

Sedangkan untuk melihat komposisi belanja atas alokasi APBD Tahun Anggaran 2024 dan tahun sebelumnya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.44 **Komposisi Belanja PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Sebelumnya**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2023 (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2024 (Rp)	%
Belanja Operasi	<b>12.059.507.105,00</b>	<b>9.545.995.380,00</b>	<b>11.032.718.436,00</b>	<b>91,49</b>
- Belanja Pegawai	5.078.623.465,00	4.363.554.150,00	4.601.421.936,00	90,60
- Belanja Barang Jasa	6.750.883.640,00	5.182.441.230,00	6.201.916.500,00	91,87
Belanja Modal	151.560.000,00	149.900.000,00	149.900.000,00	98,90
<b>Jumlah</b>	<b>12.211.067.105,00</b>	<b>9.786.405.380,00</b>	<b>11.182.618.436,00</b>	<b>91,58</b>

Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) Kabupaten Belitung per 31 Desember tahun anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Belitung merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2024.

Pencapaian target kinerja diukur berdasarkan efektifitas dan efisiensi yang dicapai dan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong seperti tingkat SDM yang cukup termasuk mental, pengawasan intern maupun dari masyarakat yang cukup baik dan perencanaan yang cukup matang.

Berdasarkan Pengukuran Perjanjian kinerja dan memperhatikan hasil-hasil perhitungan yang tergambar dalam format Pengukuran Perjanjian Kinerja dapat dijelaskan Realisasi Anggaran Belanja Langsung PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung Tahun 2023 dari Pagu Anggaran Setelah perubahan sebesar Rp. **12.211.067.105,00,-** dengan 6 Program dan 15 Kegiatan 36 Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **11.182.618.436,00,-** dan Persentase terhadap total Anggaran **91,58%**

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Keberhasilan dan Kegagalan

Pada tahun 2024 PD DPPKBPMD Kab. Belitung telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mencapai visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

4. Terwujudnya Program Bangga Kecana dengan indikator kinerja **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)** Capaian Indikator Kinerjanya pada tahun 2024 sebesar 164,90% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 65,32% dengan capaian kinerja 107,59%. iBangga dibentuk dari tiga dimensi yakni: Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Capaian iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: rentan (dibawah 40), berkembang (40-70) dan tangguh (diatas 70).
5. Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana dengan Indikator **Total Fertility Rate (TFR)** pada tahun 2024 sebesar 2,12% dari target yang ditetapkan sebesar 2.41 % . *Total Fertility Rate (TFR)* adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu).
6. Meningkatnya Perkembangan desa Mandiri dan Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa dengan indikator kinerja **Jumlah Desa dengan IDM Desa Mandiri** dengan definisi operasional : Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155. Berdasarkan keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024 pada tahun 2024 ada 23 Desa yang berstatus Desa Mandiri di kabupaten Belitung, meningkat dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 20 Desa yang berstatus Desa Mandiri

Dari hasil pengukuran terhadap capaian PD DPPKBPMD Kab. Belitung selama tahun 2024 menunjukkan peningkatan dan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2024-2026. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan kinerja PD DPPKBPMD Kab. Belitung dapat dinyatakan **sangat baik**. Pencapaian kinerja PD DPPKBPMD Kab. Belitung pada Tahun 2024 juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp12.211.067.105,00,- (Dua belas miliar dua ratus sebelas juta enam puluh tujuh ribu seratus lima rupiah) dan capaian realisasi kinerja keuangan Rp11.182.618.436,00,- (Sebelas miliar seratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 91,58%. Terhadap berbagai target capaian yang berhasil maupun yang tidak mencapai target capaian yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024 akan menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi PD DPPKBPMD Kab. Belitung untuk melaksanakan berbagai langkah kongkrit dalam perbaikan dan penanganan di masa yang akan datang.

## 4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis terdapat beberapa hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi PD DPPKBPM Kab. Belitung dalam pemenuhan target kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- 1. Ketidakseimbangan antara Capaian Kinerja dan Efisiensi Keuangan,**  
Beberapa program menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi (>100%), tetapi efisiensinya masih belum optimal. Misalnya, *Unmet Need* memiliki capaian 140,59% dengan efisiensi 6,17%, yang menunjukkan bahwa meskipun target kinerja terlampaui, alokasi dan pemanfaatan anggaran masih belum sebanding.
- 2. Penyerapan Anggaran yang Tidak Merata**  
Ada program dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah dibandingkan lainnya, seperti *Persentase PUS Ber KB* dengan penyerapan 87,68%. Hal ini dapat disebabkan oleh kendala administrasi, keterlambatan pencairan dana, atau kesulitan dalam implementasi di lapangan.
- 3. Variasi dalam Efisiensi Keuangan**  
Program yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan cenderung lebih efisien dibandingkan program teknis di lapangan. Misalnya, *Persentase Pengelolaan Keuangan Desa* memiliki efisiensi 3,14%, jauh lebih baik dibandingkan *Persentase PUS Ber KB* yang hanya 12,32%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan berbasis infrastruktur atau layanan langsung kepada masyarakat lebih sulit untuk dijalankan secara efisien.
- 7. Faktor Sosial dan Budaya**  
Implementasi program seperti *Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)* dan *Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan* dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya di masyarakat. Resistensi terhadap program pemerintah atau kurangnya partisipasi masyarakat dapat menjadi hambatan.
- 5. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur**  
Efektivitas program sering kali dipengaruhi oleh kapasitas SDM dan infrastruktur yang tersedia. Misalnya, indeks profesionalitas ASN yang hanya mencapai 91,88% menunjukkan masih adanya kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.
- 6. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan**  
Program yang memerlukan kerja sama antar instansi atau pemerintah daerah sering menghadapi tantangan dalam koordinasi, seperti program *Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)* yang memiliki tingkat efisiensi lebih rendah (12,32%), yang bisa disebabkan oleh kurangnya sinergi antara sektor kesehatan, sosial, dan pendidikan.

## 4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan pencapaian kinerja PD DPPKBPM Kab. Belitung sepanjang tahun 2024, dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Keseimbangan antara Capaian Kinerja dan Efisiensi Keuangan**
  - Melakukan evaluasi mendalam terhadap program dengan capaian kinerja tinggi tetapi efisiensi rendah untuk mengidentifikasi pemborosan anggaran atau area yang perlu perbaikan.
  - Menyusun strategi alokasi anggaran yang lebih berbasis kinerja agar dana digunakan secara lebih optimal.
  - Mengadopsi sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien.
- 2. Optimalisasi Penyerapan Anggaran**

- Meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait untuk mempercepat proses pencairan dan distribusi anggaran.
- Menerapkan sistem monitoring real-time terhadap penggunaan dana agar tidak terjadi keterlambatan atau kendala administratif.
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pemangku kepentingan agar mereka lebih memahami mekanisme pencairan dan pengelolaan dana.

### **3. Meningkatkan Efisiensi Program di Lapangan**

- Memanfaatkan teknologi digital dalam pelaksanaan program untuk mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efektivitas kerja.
- Mengembangkan mekanisme evaluasi berkala yang berbasis data untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan anggaran digunakan dengan baik.
- Melakukan benchmarking dengan daerah lain yang memiliki tingkat efisiensi lebih baik untuk mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan program.

### **4. Mengatasi Kendala Sosial dan Budaya**

- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan penerimaan terhadap program-program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan keluarga berencana dan pemberdayaan sosial.
- Melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam implementasi program agar pesan pemerintah lebih mudah diterima oleh masyarakat.
- Menyesuaikan pendekatan program dengan budaya lokal untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat.

### **5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur**

- Mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi ASN dan tenaga pelaksana di lapangan agar mereka lebih profesional dalam menjalankan program.
- Meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi untuk mempercepat layanan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
- Menyediakan insentif bagi tenaga pelaksana yang berprestasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas program.

### **6. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan**

- Membentuk tim kerja lintas sektor yang bertanggung jawab atas koordinasi program-program yang melibatkan berbagai instansi.
- Mengembangkan sistem komunikasi dan perencanaan terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
- Menerapkan mekanisme evaluasi bersama secara berkala untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam program bekerja secara sinergis.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan pencapaian kinerja dapat lebih optimal, efisiensi anggaran meningkat, dan hambatan-hambatan yang ada dapat diminimalkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

# LAMPIRAN

1	PERJANJIAN KINERJA 2024
2	IKU DPPKBPPMD
3	RENCANA KERJA TAHUNAN 2024
4	PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
5	PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
6	REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung

**10. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah.
- Fungsi : 1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat dan desa;  
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa;  
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat dan desa;  
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO. 1	SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA 3	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN 4	SUMBER DATA 5
1.	Terwujudnya Program Bangga Kencana	iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	iBangga dibentuk dari tiga dimensi yakni: Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Capaian iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: rentan (dibawah 40), berkembang (40-70) dan tangguh (diatas 70)	Pendataan Keluarga
1.1.	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	<p>Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu).</p> $TFR = 5 \sum_{i=1}^{i=7} ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times K$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total                      ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur</p> <p><math>b_i</math> = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur <math>i</math> pada tahun tertentu  <math>p_i</math> = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur <math>i</math> pada pertengahan tahun yang sama  <math>i</math> = kelompok umur <math>i=1</math> untuk kelompok umur 15-19, <math>i=2</math> untuk kelompok umur 20-24,....., <math>i=7</math> untuk kelompok umur 45-49  <math>K</math> = bilangan konstanta biasanya 1000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan pengendalian lapangan bulanan dan Pendataan Keluarga</li> <li>Data SIGA</li> </ul>
2	Meningkatnya Perkembangan Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155	Data Kemendes
2.1	Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155	Data Kemendes



							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	66.043.600,00	66.043.600,00	66.043.600,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM		72.383.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	111.340.140,00	111.340.140,00	111.340.140,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM		111.692.168,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	62.025.000,00	62.025.000,00	62.025.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM		62.025.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM		4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah	3 Jenis	3 Jenis	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	10.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	32.000.000,00	32.000.000,00	121.560.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM		10.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	237.479.000,00	238.370.000,00	238.370.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	239.079.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM		3.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70.879.000,00	70.879.000,00	70.879.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM		70.879.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	165.891.000,00	165.891.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM		165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Daerah Dalam Kondisi Baik	3 Jenis	3 Jenis	296.339.000,00	296.339.000,00	296.339.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	511.739.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM		168.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA





						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	40.600.900,00	0,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM		42.076.897,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	30 Orang	30 Orang	25.190.000,00	25.190.000,00	325.160.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Peningkatan Kualitas SDM		26.715.911,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	1 Laporan	79.998.000,00	79.998.000,00	79.998.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM		85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan pembinaan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga	1 Laporan	1 Laporan	2.139.500.000,00	2.470.558.000,00	2.470.558.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas Keluarga	2.140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	2.139.500.000,00	2.470.558.000,00	2.470.558.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM		2.140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
<b>J U M L A H</b>									<b>10.334.424.000,00</b>	<b>10.744.579.905,00</b>	<b>12.211.067.105,00</b>							<b>11.950.568.882,00</b>	

Tanjungpandan, 2025  
Kepala DPPKBPM



Febriansyah, S.STP  
Pembina  
NIP 198702132006021001

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2024**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG**

NO	NAMA PROGRAM/NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			SISA ANGGARAN	
			INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	RUPIAH	(%)
1	2	3	5	6	12	13	14	15	16
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan</b>	<b>6.254.132.105</b>	<b>6.379.832.105</b>	<b>5.821.178.905</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>	<b>558.653.200</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1.600.000	1.600.000	1.280.390	80%	100%	319.610	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	70.879.000	70.879.000	53.710.822	76%	100%	17.168.178	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	66.043.600	66.043.600	66.002.500	100%	100%	41.100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	62.025.000	62.025.000	62.022.000	100%	100%	3.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9.000.000	9.000.000	8.884.000	99%	100%	116.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	4.000.000	4.000.000	3.945.000	99%	100%	55.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	111.340.140	111.340.140	102.331.918	92%	100%	9.008.222	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120.000.000	220.000.000	219.864.809	100%	100%	135.191	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20.000.000	20.000.000	18.025.500	90%	100%	1.974.500	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	165.891.000	165.891.000	165.891.000	100%	100%	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44.600.000	44.600.000	43.950.000	99%	100%	650.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	83.739.000	83.739.000	83.670.700	100%	100%	68.300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	168.000.000	168.000.000	143.609.000	85%	100%	24.391.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	30.000.000	30.000.000	29.100.000	97%		900.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	32.000.000	121.560.000	120.800.000	99%	100%	760.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	15.500.000	15.500.000	13.000.000	84%	100%	2.500.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000	100.000.000	77.729.330	78%	100%	22.270.670	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2.439.800	2.439.800	1.860.000	76%	100%	579.800	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2.173.700	2.173.700	1.740.000	80%	100%	433.700	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5.142.483.465	5.078.623.465	4.601.421.936	91%	100%	477.201.529	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2.417.400	2.417.400	2.340.000	97%	100%	77.400	
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku</b>	<b>739.630.400</b>	<b>953.617.600</b>	<b>935.796.229</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>17.821.371</b>	

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	648.997.900	862.985.100	853.462.048	99%	100%	9.523.052
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	30.665.000	30.665.000	29.992.000	98%	100%	673.000
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	59.967.500	59.967.500	52.342.181	87%	100%	7.625.319
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	-	-	0%	0%	-
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Perdsentase Kelembagaan Desa Aktif</b>	<b>784.801.850</b>	<b>911.601.850</b>	<b>883.271.987</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>28.329.863</b>
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	219.530.800	219.530.800	199.896.000	91%	100%	19.634.800
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	33.810.000	33.810.000	33.655.000	100%	100%	155.000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	531.461.050	658.261.050	649.720.987	99%	100%	8.540.063
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Unmet need</b>	<b>104.732.500</b>	<b>104.732.500</b>	<b>98.271.520</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>	<b>3.342.920</b>
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	62.275.000	62.275.000	59.156.940	95%	100%	3.118.060

	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	42.457.500	42.457.500	39.114.580	92%	100%	3.342.920	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</b>	<b>985.567.050</b>	<b>985.567.050</b>	<b>922.629.503</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>	<b>62.937.547</b>	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah laporan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	-	-	0%	0%	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	397.680.450	397.680.450	363.001.578	91%	100%	34.678.872	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	350.137.000	350.137.000	340.099.116	97%	100%	10.037.884	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	237.749.600	237.749.600	219.528.809	92%	100%	18.220.791	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase PUS Ber KB</b>	<b>2.875.716.000</b>	<b>2.875.716.000</b>	<b>2.521.470.292</b>	<b>88%</b>	<b>3</b>	<b>354.245.708</b>	

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	-	-	-	0%	0%	-	
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi)	Jumlah laporan hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi)	325.160.000	325.160.000	301.364.928	93%	100%	23.795.072	
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi)	79.998.000	79.998.000	78.246.664	98%	100%	1.751.336	
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	2.470.558.000	2.470.558.000	2.141.858.700	87%	100%	328.699.300	
<b>Jumlah</b>		<b>11.744.579.905</b>	<b>12.211.067.105</b>	<b>11.182.618.436</b>	<b>91,58%</b>	<b>100%</b>	<b>1.025.330.609</b>	

TANJUNGPANDAN, JANUARI 2025  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BELITUNG



FEBRIANSYAH, S.STP  
PEMBINA

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2024  
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN BELITUNG

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi
1	2	3		4	5	6
1	1. Terwujudnya Program Bangga Kencana	1	iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	%	65,32	64,90
2	2. Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	1	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,41	2,12
3	1. Meningkatnya Perkembangan Desa Mandiri	1	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Desa	20	23
4	2. Meningkatkan Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa	2	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Desa	20	23

Tanjungpandan, Januari 2025  
 Kepala Dinas



FEBRIANSYAH, S.STP

Pembina

NIP. 19870213 200602 1 001

DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEGIATAN	SUMBER DANA	KEADAAN BULAN : DESEMBER 2024										SISA ANGGARAN (Rupiah)	LOKASI Desa/Kec	KET	
			PLAFOND ANGGARAN (Rp)		PELAKSANAAN KONTRAK/ SWAKELOLA	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA	JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH s/d BULAN INI	REALISASI						
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)						KEUANGAN (Rupiah)	KEU %	FISIK %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>															
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				SWAKELOLA											
	Belanja Penggandaan		878.000	878.000										878.000		
	Beban Makanan dan Minuman Rapat		1.864.800	1.864.800			1.860.000		1.860.000	1.860.000	99,74	100,00	4.800			
	Jumlah Sub Kegiatan		2.439.800	2.439.800			1.860.000	-	1.860.000	1.860.000	78,24	100,00	578.800			
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				SWAKELOLA											
	Belanja Penggandaan		425.000	425.000										425.000		
	Beban Makanan dan Minuman Rapat		1.748.700	1.748.700			1.740.000		1.740.000	1.740.000	99,50	100,00	8.700			
	Jumlah Sub Kegiatan		2.173.700	2.173.700			1.740.000	-	1.740.000	1.740.000	80,05	100,00	433.700			
	Jumlah Kegiatan		4.613.500	4.613.500			3.600.000	-	3.600.000	3.600.000	78,03	100,00	1.012.500			
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				SWAKELOLA											
	Belanja Gaji Pokok PNS		1.688.687.252	1.435.489.800			1.304.303.238	100.786.700	1.405.089.938	1.405.089.938	88,44	100,00	30.419.564			
	Belanja Gaji Pokok PPPK		41.323.348	41.323.348			28.727.200	2.860.800	28.588.000	28.588.000	98,18	100,00	12.735.348			
	Tunjangan Keluarga PNS		149.963.799	134.876.544			102.870.794	7.874.278	110.845.072	110.845.072	73,71	100,00	24.331.474			
	Tunjangan Keluarga PPPK		9.819.000	9.819.000			2.872.920	289.880	2.858.800	2.858.800	49,16	100,00	2.858.200			
	Tunjangan Jabatan PNS		183.083.250	123.270.000			94.968.000	7.305.000	102.273.000	102.270.000	35,88	100,00	21.900.000			
	Tunjangan Fungsional PNS		53.487.800	118.487.800			102.858.000	7.912.000	110.788.000	110.788.000	93,91	100,00	7.689.800			
	Tunjangan Fungsional PPPK		7.860.000	7.860.000			3.180.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	46,30	100,00	4.060.000			
	Tunjangan Fungsional Umum PNS		24.907.750	24.907.750			16.708.000	1.288.000	17.996.000	17.990.000	72,23	100,00	6.917.750			
	Tunjangan Beras PNS		87.193.880	87.193.880			61.701.840	4.779.720	66.481.560	66.481.560	78,25	100,00	20.712.120			
	Tunjangan Beras PPPK		4.056.000	4.056.000			1.303.580	144.840	1.448.400	1.448.400	35,71	100,00	2.607.600			
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		16.283.892	16.283.892			6.491.548	358.787	6.847.308	6.847.308	38,26	100,00	8.436.587			
	Pembulatan Gaji PNS		21.221	25.000			19.883	1.810	20.363	20.363	95,98	100,00	4.637			
	Pembulatan Gaji PPPK		1.400	1.400			1.180	29	1.209	1.209	86,38	100,00	181			
	Juran Jaminan Kesehatan PNS		80.785.534	180.000.000			112.828.290	16.834.418	129.259.708	129.259.708	71,81	100,00	50.745.292			
	Juran Jaminan Kesehatan PPPK		2.873.000	2.873.000			1.447.098	228.107	1.875.203	1.875.203	58,31	100,00	1.197.797			
	Juran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		3.858.489	3.858.489			2.848.248	241.841	2.891.087	2.891.087	74,93	100,00	967.402			
	Juran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		100.000	100.000			64.888	6.881	61.749	61.749	61,78	100,00	38.251			
	Juran Jaminan Kematian PNS		11.875.801	11.875.801			7.947.702	729.521	8.673.223	8.673.223	74,93	100,00	2.902.378			
	Juran Jaminan Kematian PPPK		299.000	299.000			184.884	20.583	185.247	185.247	61,98	100,00	113.753			
	Juran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		8.038.630	8.038.630									8.038.630			
	Juran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK		207.658	207.658									207.658			
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS		2.856.470.777	2.856.470.777			2.220.908.683	370.750.421	2.591.659.074	2.591.659.074	90,73	100,00	294.811.703			
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK		16.940.800	16.940.800			9.422.000	2.208.000	11.628.000	11.628.000	68,64	100,00	8.312.800			
	Jumlah Sub Kegiatan		8.142.483.488	6.078.823.468			4.076.886.870	624.738.268	4.601.421.838	4.601.421.838	89,48	100,00	477.201.529			
4	Penyusunan Pelemparan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				SWAKELOLA											
	Belanja Bahan/Aliat untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		87.400	87.400										87.400		
	Belanja Bahan/Aliat untuk Kegiatan Kantor - Bahan Penggandaan		800.000	800.000				800.000	800.000	800.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.850.000	1.850.000				1.840.000	1.840.000	1.840.000	99,48	100,00	10.000			
	Jumlah Sub Kegiatan		2.617.400	2.617.400				2.340.000	2.340.000	2.340.000	98,90	100,00	77.400			
	Jumlah Kegiatan		8.144.900.888	6.081.640.868			4.076.886.870	627.078.268	4.603.765.138	4.603.765.138	90,61	100,00	477.278.929			
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				SWAKELOLA											
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		15.500.000	15.500.000			13.000.000		13.000.000	13.000.000	83,87	100,00	2.500.000			
	Jumlah Sub Kegiatan		15.500.000	15.500.000			13.000.000	-	13.000.000	13.000.000	83,87	100,00	2.500.000			
	Jumlah dipindahkan		8.165.014.368	6.101.154.368			4.083.286.870	627.078.268	4.620.365.138	4.620.365.138	90,57	100,00	480.792.429			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Pindahan		5.185.014.365	5.101.154.365			4.093.286.670	527.075.266	4.620.361.936	4.620.361.936	80,57	100,00	480.792.429		
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				SWAKELOLA										
	Belanja Bimbingan Teknis		80.000.000	60.000.000			38.453.000		38.453.000	38.453.000	48,07	100,00	21.547.000		
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		20.000.000	40.000.000			34.503.249	4.773.081	39.276.330	39.276.330	98,19	100,00	723.670		
	Jumlah Sub Kegiatan		100.000.000	100.000.000			72.956.249	4.773.081	77.729.330	77.729.330	77,73	100,00	22.270.670		
	Jumlah Kegiatan		115.500.000	115.500.000			85.956.249	4.773.081	90.729.330	90.729.330	78,55	100,00	24.770.670		
4	Kegiatan Administratif Umum Perangkat Daerah														
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				SWAKELOLA										
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Listrik		9.000.000	9.000.000			8.884.000		8.884.000	8.884.000	98,71	100,00	116.000		
	Jumlah Sub Kegiatan		9.000.000	9.000.000			8.884.000		8.884.000	8.884.000	98,71	100,00	116.000		
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				SWAKELOLA										
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor		25.000.000	25.000.000			24.486.500	513.000	24.999.500	24.999.500	100,00	100,00	500		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover		30.316.800	30.316.800			28.291.000	1.992.000	30.283.000	30.283.000	99,89	100,00	33.800		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak (Spanduk,Umbul2,Bendera)		10.728.800	10.728.800				10.720.000	10.720.000	10.720.000	99,94	100,00	6.800		
	Jumlah Sub Kegiatan		66.043.800	66.043.800			52.777.500	13.225.000	66.002.500	66.002.500	99,94	100,00	47.100		
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				SWAKELOLA										
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rutin		20.000.000	20.000.000			11.295.500	6.730.000	18.025.500	18.025.500	90,13	100,00	1.974.500		
	Jumlah Sub Kegiatan		20.000.000	20.000.000			11.295.500	6.730.000	18.025.500	18.025.500	90,13	100,00	1.974.500		
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				SWAKELOLA										
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas		71.890.140	71.890.140			43.781.813	20.611.905	64.393.418	64.393.418	89,61	100,00	7.466.722		
	Belanja Makanan dan minuman Rapat		18.840.000	18.840.000			13.280.000	5.250.000	18.530.000	18.530.000	98,36	100,00	310.000		
	Belanja Makanan dan minuman Aktifitas Lapangan		20.840.000	20.840.000			10.018.500	9.390.000	19.408.500	19.408.500	94,03	100,00	1.231.500		
	Jumlah Sub Kegiatan		111.570.140	111.570.140			67.080.013	35.251.905	102.331.918	102.331.918	91,81	100,00	9.008.222		
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				SWAKELOLA										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor - Bahan Cetak		62.028.000	62.028.000			59.696.400	2.325.600	62.022.000	62.022.000	100,00	100,00	3.000		
	Jumlah Sub Kegiatan		62.028.000	62.028.000			59.696.400	2.325.600	62.022.000	62.022.000	100,00	100,00	3.000		
12	Penyediaan Bahan Baccan dan Peraturan Perundang-undangan				SWAKELOLA										
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		4.000.000	4.000.000			3.860.000	85.000	3.945.000	3.945.000	98,63	100,00	55.000		
	Jumlah Sub Kegiatan		4.000.000	4.000.000			3.860.000	85.000	3.945.000	3.945.000	98,63	100,00	55.000		
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				SWAKELOLA										
	Perjalanan Dinas Luar Daerah		120.000.000	220.000.000			202.736.135	17.128.874	219.864.809	219.864.809	99,94	100,00	135.191		
	Jumlah Sub Kegiatan		120.000.000	220.000.000			202.736.135	17.128.874	219.864.809	219.864.809	99,94	100,00	135.191		
	Jumlah Kegiatan		392.408.740	492.408.740			406.329.848	74.746.179	481.076.727	481.076.727	97,70	100,00	11.333.013		
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
14	Pengadaan Mebel				KONTRAK										
	Belanja Modal Mebel		30.000.000	30.000.000			29.100.000		29.100.000	29.100.000	97,00	100,00	800.000		
	Jumlah Sub Kegiatan		30.000.000	30.000.000			29.100.000		29.100.000	29.100.000	97,00	100,00	800.000		
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				KONTRAK										
	Belanja Modal Personal Computer		32.000.000	121.860.000			120.800.000		120.800.000	120.800.000	99,97	100,00	760.000		
	Jumlah Sub Kegiatan		32.000.000	121.860.000			120.800.000		120.800.000	120.800.000	99,97	100,00	760.000		
	Jumlah Kegiatan		62.000.000	151.860.000			149.900.000		149.900.000	149.900.000	98,90	100,00	1.660.000		
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				SWAKELOLA										
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos		1.000.000	1.000.000			920.000		920.000	920.000	92,00	100,00	80.000		
	Belanja Paket/Pengiriman		800.000	800.000			237.390	123.000	360.390	360.390	60,07	100,00	239.610		
	Jumlah Sub Kegiatan		1.800.000	1.800.000			1.157.390	123.000	1.280.390	1.280.390	60,02	100,00	319.610		
	Jumlah dipindahkan		5.721.023.105	5.846.723.105			4.723.629.857	606.717.526	5.330.347.383	5.330.347.383	93,17	100,00	516.375.722		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Pindahan		5.721.023.105	5.846.723.105			4.723.829.857	606.717.526	5.330.347.383	5.330.347.383	93,17	100,00	516.375.722		
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				SWAKELOLA										
	Belanja Telepon		12.000.000	12.000.000			6.827.916	1.771.975	8.599.891	8.599.891	71,67	100,00	3.400.109		
	Belanja Listrik		46.879.000	46.879.000			31.411.025	3.425.666	34.836.691	34.836.691	74,31	100,00	12.042.309		
	Belanja Internet		12.000.000	12.000.000			9.419.590	854.650	10.274.240	10.274.240	85,62	100,00	1.725.790		
	Jumlah Sub Kegiatan		70.879.000	70.879.000			47.656.531	6.052.291	53.710.822	53.710.822	75,78	100,00	17.168.178		
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				SWAKELOLA										
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		33.000.000	33.000.000			30.250.000	2.750.000	33.000.000	33.000.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		66.000.000	66.000.000			60.500.000	5.500.000	66.000.000	66.000.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		66.000.000	66.000.000			60.500.000	5.500.000	66.000.000	66.000.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		396.000	396.000			383.000	33.000	396.000	396.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		495.000	495.000			453.750	41.250	495.000	495.000	100,00	100,00	-		
	Jumlah Sub Kegiatan		165.891.000	165.891.000			152.066.750	13.824.250	165.891.000	165.891.000	100,00	100,00	-		
	Jumlah Kegiatan		238.370.000	238.370.000	-	-	200.882.671	18.998.541	220.882.212	220.882.212	92,66	100,00	17.487.789		
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				SWAKELOLA										
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		17.720.000	17.720.000			8.889.000	2.000.000	7.889.000	7.889.000	43,39	100,00	10.031.000		
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Mobil		81.250.000	81.280.000			74.830.000	6.370.000	81.200.000	81.200.000	99,84	100,00	80.000		
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Motor		89.030.000	89.030.000			42.050.000	12.870.000	54.720.000	54.720.000	79,27	100,00	14.370.000		
	Jumlah Sub Kegiatan		168.000.000	168.000.000			122.869.000	21.040.000	143.609.000	143.609.000	85,48	100,00	24.391.000		
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				SWAKELOLA										
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor lainnya		670.000	670.000											670.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin		16.390.000	16.390.000			12.440.000	2.900.000	15.340.000	15.340.000	99,66	100,00	80.000		
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Komputer		16.640.000	16.640.000			8.810.000	7.116.000	16.825.000	16.825.000	99,90	100,00	16.000		
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer		13.000.000	13.000.000			12.985.000		12.985.000	12.985.000	99,88	100,00	16.000		
	Jumlah Sub Kegiatan		44.600.000	44.600.000			33.835.000	10.016.000	43.850.000	43.850.000	98,54	100,00	80.000		
21	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				KONTRAK										
	Jumlah Sub Kegiatan		83.738.000	83.738.000			83.670.700	-	83.670.700	83.670.700	99,92	100,00	68.300		
	Jumlah Kegiatan		296.338.000	296.338.000			240.174.700	31.056.000	271.228.700	271.228.700	91,53	100,00	25.108.300		
	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6.269.337.105	6.379.831.105			5.183.838.826	897.848.987	6.021.178.808	6.021.178.808	97,29	100,00	258.852.300		
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa														
8	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
22	Facilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				SWAKELOLA										
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas		2.970.000	2.970.000			1.710.000	900.000	2.610.000	2.610.000	87,88	100,00	359.920		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		34.000.000	34.000.000			24.080.000	6.400.000	30.480.000	30.480.000	89,65	100,00	3.520.000		
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		688.000.000	798.987.200			727.178.400	66.750.400	793.928.800	793.928.800	99,37	100,00	5.058.400		
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk penumpang		1.000.000	1.000.000			900.000		900.000	900.000	90,00	100,00	100.000		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		26.027.900	26.027.900			25.843.168		25.843.168	25.843.168	99,14	100,00	484.732		
	Jumlah Sub Kegiatan		648.997.900	662.985.100			779.411.568	74.050.480	853.462.048	853.462.048	98,90	100,00	8.523.052		
23	Facilitas Penyusunan Produk Hukum Desa				SWAKELOLA										
	Belanja Bahan Cetak (Penggandaan/Fotocopy)		1.665.000	1.665.000			800.000	682.000	1.492.000	1.492.000	89,61	100,00	173.000		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		23.000.000	23.000.000			6.160.000	14.840.000	23.000.000	23.000.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		2.000.000	2.000.000			1.500.000		1.500.000	1.500.000	75,00	100,00	500.000		
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Fil, Pamotretan		4.000.000	4.000.000			4.000.000		4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	-		
	Jumlah Sub Kegiatan		30.665.000	30.665.000			12.860.000	17.032.000	29.992.000	29.992.000	97,81	100,00	673.000		
	Jumlah dipindahkan		6.933.796.005	7.273.482.205			5.955.801.408	748.731.547	6.704.632.953	6.704.632.953	92,18	100,00	568.849.252		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Pindahan		6.933.795.005	7.273.482.205			5.955.901.408	748.731.547	6.704.632.953	6.704.632.953	92,18	100,00	588.849.252		
24	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa				SWAKELOLA										
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		3.712.500	3.712.500			2.740.015	920.080	3.660.095	3.660.095	98,59	100,00	52.405		
	Belanja Bahan Cetak (Spanduk)		555.000	555.000			555.000		555.000	555.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		26.700.000	26.700.000			22.200.000	4.500.000	26.700.000	26.700.000	100,00	100,00	-		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		14.000.000	14.000.000			13.800.000		13.800.000	13.800.000	97,14	100,00	400.000		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		15.000.000	15.000.000			7.827.088		7.827.088	7.827.088	52,18	100,00	7.172.914		
	Jumlah Sub Kegiatan		59.987.500	59.987.500			46.822.101	5.420.080	52.342.181	52.342.181	87,28	100,00	7.625.319		
	Jumlah Kegiatan		739.630.400	853.617.600			639.283.689	98.602.560	835.796.229	835.796.229	96,13	100,00	17.821.371		
	Jumlah Program Administrasi Pemerintahan Desa		739.630.400	853.617.600			639.283.689	98.602.560	835.796.229	835.796.229	96,13	100,00	17.821.371		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														
9	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelekatnya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota														
25	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				SWAKELOLA										
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		7.410.150	7.410.150			3.855.000	2.000.000	5.855.000	5.855.000	79,01	100,00	1.555.150		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		3.600.000	3.600.000			3.427.000		3.427.000	3.427.000	97,91	100,00	73.000		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		6.099.000	6.099.000			2.845.000	2.599.000	5.744.000	5.744.000	94,18	100,00	355.000		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cinderamata		10.001.650	10.001.650			10.000.000		10.000.000	10.000.000	99,98	100,00	1.650		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		20.000.000	20.000.000			14.860.000		14.860.000	14.860.000	73,30	100,00	5.340.000		
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		23.840.000	23.840.000				22.880.000	22.880.000	22.880.000	96,94	100,00	860.000		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		10.000.000	10.000.000			8.000.000		8.000.000	8.000.000	80,00	100,00	4.000.000		
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		97.200.000	97.200.000			89.100.000	8.100.000	97.200.000	97.200.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		1.750.000	1.750.000				1.750.000	1.750.000	1.750.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		2.000.000	2.000.000			900.000	900.000	1.800.000	1.800.000	90,00	100,00	200.000		
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		16.250.000	16.250.000			12.300.000		12.300.000	12.300.000	75,69	100,00	3.950.000		
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		680.000	680.000			680.000		680.000	680.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota		21.000.000	21.000.000			17.800.000		17.800.000	17.800.000	84,75	100,00	3.200.000		
	Jumlah Sub Kegiatan		219.530.800	219.530.800			155.867.000	44.329.000	199.896.000	199.896.000	91,06	100,00	19.634.800		
26	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				SWAKELOLA										
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		2.970.000	2.970.000			2.415.000	500.000	2.915.000	2.915.000	98,18	100,00	55.000		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		29.840.000	29.840.000			25.840.000	4.000.000	29.840.000	29.840.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		1.000.000	1.000.000			900.000		900.000	900.000	90,00	100,00	100.000		
	Jumlah Sub Kegiatan		33.810.000	33.810.000			29.155.000	4.500.000	33.655.000	33.655.000	89,54	100,00	155.000		
	Jumlah dipindahkan		7.247.103.305	7.586.790.505			6.187.545.507	802.980.627	6.990.526.134	6.990.526.134	92,14	100,00	596.264.371		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Pindahan		7.247.103.305	7.586.790.505			6.187.545.507	602.980.627	6.990.526.134	6.990.526.134	92,14	100,00	594.264.371		
27	<b>Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</b>				SWAKELOLA										
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		19.305.000	19.305.000			19.251.733		19.251.733	19.251.733	99,72	100,00	53.267		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		4.095.000	4.095.000			2.998.000	1.050.000	4.048.000	4.048.000	98,85	100,00	47.000		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cinderamata		1.501.050	1.501.050				1.495.000	1.495.000	1.495.000	99,60	100,00	6.050		
	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat		230.000.000	230.000.000				228.160.000	228.160.000	228.160.000	99,20	100,00	1.840.000		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		51.100.000	72.100.000			25.650.000	46.300.000	71.950.000	71.950.000	99,79	100,00	150.000		
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		16.460.000	16.460.000				16.360.000	16.360.000	16.360.000	99,39	100,00	100.000		
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		10.500.000	10.500.000			10.500.000		10.500.000	10.500.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Pakaian Olahraga		54.000.000	54.000.000				54.000.000	54.000.000	54.000.000	100,00	100,00	-		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		10.000.000	10.000.000				6.000.000	6.000.000	6.000.000	60,00	100,00	4.000.000		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		25.000.000	25.000.000			25.000.000		25.000.000	25.000.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		21.000.000	21.000.000			17.500.000	3.500.000	21.000.000	21.000.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		21.000.000	21.000.000			17.800.000	3.500.000	21.000.000	21.000.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		7.500.000	7.500.000				7.000.000	7.000.000	7.000.000	93,33	100,00	500.000		
	Belanja Tagihan Telepon		1.000.000	1.000.000					7.000.000	7.000.000	100,00	100,00	1.000.000		
	Belanja Tagihan Listrik		1.000.000	1.000.000			203.000		408.000	408.000	40,80	100,00	594.000		
	Belanja Pembayaran Pajak, Bes, dan Perizinan		1.750.000	1.750.000				1.750.000	1.750.000	1.750.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		3.500.000	3.500.000			1.650.000	1.750.000	3.400.000	3.400.000	97,14	100,00	100.000		
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penum		16.250.000	16.250.000			16.250.000		16.250.000	16.250.000	100,00	100,00	-		
	Perjalanan Dinas Biasa		25.500.000	99.800.000			53.861.003	45.789.251	99.650.254	99.650.254	99,85	100,00	149.746		
	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota		18.900.000	18.500.000			18.500.000		18.500.000	18.500.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Madiah benefit pertobatan			24.000.000			24.000.000		24.000.000	24.000.000	100,00	100,00	-		
	Jumlah Sub Kegiatan		631.461.050	658.261.050			232.863.736	416.857.291	649.720.987	649.720.987	88,70	100,00	8.540.063		
	Jumlah Kegiatan		784.801.850	811.601.850			417.895.736	466.695.281	693.271.987	693.271.987	86,89	100,00	28.329.643		
	Jumlah Program Pengembangan Lembaga Masyarakat Desa Nelayan, Peternak, Asah dan Masyarakat Nelayan Adat		784.801.850	811.601.850			417.895.736	466.695.281	693.271.987	693.271.987	86,89	100,00	28.329.643		
4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>														
10	<b>Kegiatan Pemetaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>														
28	<b>Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan NonFormal</b>				SWAKELOLA										
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		2.722.500	2.722.500			1.418.500		1.418.500	1.418.500	81,99	100,00	1.307.000		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.250.000	2.250.000			2.250.000		2.250.000	2.250.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		16.000.000	16.000.000			16.000.000		16.000.000	16.000.000	100,00	100,00	-		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		9.000.000	9.000.000			9.000.000		9.000.000	9.000.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		1.500.000	1.500.000			1.500.000		1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		16.802.500	16.802.500			13.991.440		13.991.440	13.991.440	88,54	100,00	1.811.060		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		18.000.000	18.000.000			18.000.000		18.000.000	18.000.000	100,00	100,00	-		
	Jumlah Sub Kegiatan		62.275.000	62.275.000			59.156.940	-	59.156.940	59.156.940	84,89	100,00	3.118.060		
29	<b>Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal</b>														
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		2.178.000	2.178.000			1.862.500		1.862.500	1.862.500	85,51	100,00	316.500		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.250.000	2.250.000			2.250.000		2.250.000	2.250.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		16.000.000	16.000.000			15.800.000		15.800.000	15.800.000	98,75	100,00	200.000		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		9.000.000	9.000.000			9.000.000		9.000.000	9.000.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		1.500.000	1.500.000			750.000		750.000	750.000	50,00	100,00	750.000		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		11.529.500	11.529.500			5.037.180	4.414.900	9.452.080	9.452.080	81,98	100,00	2.077.420		
	Jumlah Sub Kegiatan		42.467.500	42.467.500			34.899.680	4.414.900	38.114.580	38.114.580	82,13	100,00	3.342.820		
	Jumlah Kegiatan		104.732.500	104.732.500			83.856.620	4.414.900	88.271.520	88.271.520	83,83	100,00	6.460.980		
	Jumlah Program Pengendalian Penduduk		104.732.500	104.732.500			83.856.620	4.414.900	88.271.520	88.271.520	83,83	100,00	6.460.980		
	Jumlah dipindahkan		7.883.296.855	8.349.784.055			6.514.265.863	1.224.252.778	7.738.518.641	7.738.518.641	82,88	100,00	611.295.414		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Pindaian		7.883.296.855	8.349.784.055			6.514.265.863	1.224.252.778	7.738.518.641	7.738.518.641	92,88	100,00	611.265.414		
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>														
11	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)														
30	Penggerakan Kader Inti/Asat Masyarakat Pedesaan (IMP)				SWAKELOLA										
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		3.539.250	3.539.250				1.040.000	1.040.000	1.040.000	29,38	100,00	2.499.250		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		22.500.000	22.500.000			18.428.500	18.428.500	18.428.500	81,90	100,00	4.071.500			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		9.585.000	9.585.000			9.585.000	9.585.000	9.585.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya (Piala Lomba IMP)		2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		11.360.000	11.360.000			11.360.000	11.360.000	11.360.000	100,00	100,00	-			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		258.800.000	258.800.000			192.600.000	84.200.000	258.800.000	258.800.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		1.600.000	1.500.000									1.500.000		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		21.027.780	21.027.780			9.483.960	9.598.656	19.062.616	19.062.616	90,68	100,00	1.965.164		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		17.325.000	17.325.000			17.325.000		17.325.000	17.325.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Penghargaan Atas Budy Prestasi / Hadiah Lomba IMP		4.800.000	4.800.000			4.800.000	4.500.000	4.800.000	4.800.000	100,00	100,00	-		
	Jumlah Sub Kegiatan		360.137.000	360.137.000			218.388.960	120.710.156	340.099.116	340.099.116	97,19	100,00	19.037.884		
31	Facilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan, dan Pengembangan Program Bangga Keneng untuk Petugas KB/ Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)				SWAKELOLA										
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		8.448.000	8.448.000				1.096.000	1.096.000	1.096.000	20,13	100,00	4.348.000		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		18.000.000	18.000.000			18.000.000	18.000.000	18.000.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		281.480	281.480			281.000	281.000	281.000	99,82	100,00	480			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cinderamata		18.000.000	18.000.000			10.000.000	10.000.000	10.000.000	88,67	100,00	8.000.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		49.780.000	49.780.000			49.748.000	49.748.000	49.748.000	99,99	100,00	3.000			
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		80.000.000	80.000.000			28.000.000	28.000.000	28.000.000	88,00	100,00	22.000.000			
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		3.800.000	3.800.000			3.500.000	3.800.000	3.800.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (PLKB) Non ASN		210.000.000	210.000.000			192.600.000	17.500.000	210.000.000	210.000.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		804.000	804.000									504.000		
	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		830.000	830.000									830.000		
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		1.800.000	1.800.000				750.000	750.000	750.000	50,00	100,00	750.000		
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Sewa Mebel		2.100.000	2.100.000			2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		20.000.000	20.000.000			18.809.878		18.809.878	18.809.878	84,08	100,00	1.190.122		
	Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan		19.000.000	19.000.000			8.350.000	13.500.000	18.750.000	18.750.000	98,68	100,00	350.000		
	Jumlah Sub Kegiatan		397.880.480	397.880.480			220.058.878	143.842.000	363.001.878	363.001.878	91,28	100,00	34.678.612		
	Jumlah Kegiatan		747.817.480	747.817.480			438.448.838	264.552.156	703.100.994	703.100.994	84,02	200,00	44.716.758		
12	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota														
22	Peningkatan Kesertan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		4.088.800	4.088.800				3.039.800	3.039.800	3.039.800	74,78	100,00	1.029.000		
	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		10.000.000	10.000.000				9.984.000	9.984.000	9.984.000	99,84	100,00	38.000		
	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat		183.750.000	183.750.000			148.182.000		148.182.000	148.182.000	90,48	100,00	15.568.000		
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		12.300.000	12.300.000			12.300.000		12.300.000	12.300.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		18.000.000	18.000.000			14.700.000		14.700.000	14.700.000	98,00	100,00	300.000		
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		3.000.000	3.000.000			3.000.000		3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Sewa Mebel		990.000	990.000			990.000		990.000	990.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Sound System)		750.000	750.000			750.000		750.000	750.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Sewa Alat Pelindung lainnya (Tenda)		3.800.000	3.800.000			3.800.000		3.800.000	3.800.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		24.394.000	24.394.000			18.978.201	4.147.008	23.123.209	23.123.209	84,79	100,00	1.270.791		
	Jumlah Sub Kegiatan		237.748.600	237.748.600			215.381.801	4.147.008	219.528.809	219.528.809	92,34	100,00	18.220.791		
	Jumlah Kegiatan		237.748.600	237.748.600			215.381.801	4.147.008	219.528.809	219.528.809	92,34	100,00	18.220.791		
	Jumlah Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		964.967.080	964.967.080			654.816.723	247.296.164	922.429.603	922.429.603	96,61	100,00	62.517.367		
	Jumlah dipindaikan		8.868.863.908	8.335.351.108			7.169.096.202	1.492.061.842	8.661.148.144	8.661.148.144	92,78	100,00	674.202.961		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Pindahan		8.868.863.805	9.335.351.105			7.169.096.202	1.492.051.842	8.661.148.144	8.991.148.144	92,78	100,00	674.202.961		
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>														
13	Registasi Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
33	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKB, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					SWAKELOLA									
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		5.940.000	5.940.000				3.978.300	3.978.300	3.978.300	66,97	100,00	1.981.750		
	Belanja Alet/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alet Tulis Kantor		9.000.000	9.000.000			1.435.000	1.435.000	1.435.000	15,94	100,00	7.565.000			
	Belanja Alet/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		4.450.000	4.450.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	44,94	100,00	2.450.000			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.090.000	4.090.000			4.090.000	4.090.000	4.090.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		22.830.000	22.830.000			22.830.000	22.830.000	22.830.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Pakain Olahraga		5.250.000	5.250.000			5.250.000	5.250.000	5.250.000	100,00	100,00	-			
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2.400.000	2.400.000			2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Sewa Alet Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		2.000.000	2.000.000			1.900.000	1.900.000	1.900.000	95,00	100,00	100.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		8.000.000	8.000.000			7.901.628	7.901.628	7.901.628	98,77	100,00	98.372			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		31.200.000	31.200.000			3.950.000	18.250.000	20.200.000	64,74	100,00	11.000.000			
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial		130.000.000	130.000.000			129.480.000	129.480.000	129.480.000	99,60	100,00	520.000			
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat sosial kemasyarakatan		100.000.000	100.000.000			99.900.000	99.900.000	99.900.000	99,90	100,00	100.000			
	Jumlah Sub Kegiatan		326.180.000	326.180.000			148.805.000	154.788.828	301.384.828	92,68	100,00	23.798.072			
34	Orientasi/Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKB, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
	Belanja Alet/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alet Tulis Kantor		8.800.000	8.800.000			6.150.000	6.150.000	6.150.000	69,82	100,00	260.000			
	Belanja Alet/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		2.800.000	2.800.000			2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Alet/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alet/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya		5.800.000	5.800.000			5.800.000	5.800.000	5.800.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		14.040.000	14.040.000			14.040.000	14.040.000	14.040.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Pakain Batik Tradisional		2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Pakain Olahraga		1.200.000	1.200.000			1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan		1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Sewa Alet Rumah Tangga lainnya		6.000.000	6.000.000			6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		20.888.000	20.888.000			10.991.883	8.465.101	19.456.984	93,28	100,00	1.401.338			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		8.050.000	8.050.000			8.050.000	8.050.000	8.050.000	100,00	100,00	-			
	Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan		13.050.000	13.050.000			13.050.000	13.050.000	13.050.000	100,00	100,00	-			
	Jumlah Sub Kegiatan		78.898.000	78.898.000			68.781.583	8.465.101	78.246.684	97,81	100,00	1.791.338			
	Jumlah Kegiatan		406.158.000	406.158.000			216.386.583	163.225.029	379.611.512	92,69	100,00	25.589.410			
	Jumlah dipindahkan		9.274.021.806	9.740.809.108			7.395.462.785	1.665.276.871	8.040.759.738	80,82	100,00	699.749.369			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Pindahan		9.274.021.905	9.740.509.105			7.385.482.765	1.655.276.971	9.040.759.736	9.040.759.736	92,82	100,00	699.749.369		
14	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
35	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		5.000.000	5.000.000			4.282.400		4.282.400	4.282.400	85,65	100,00	717.600		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		78.400.000	78.400.000			75.900.000	2.900.000	78.400.000	78.400.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Souvenir/Cinderamata		-	-											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		302.738.000	302.738.000			239.614.500		239.614.500	239.614.500	79,15	100,00	63.123.500		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		106.200.000	106.200.000			81.115.000	18.785.000	99.900.000	99.900.000	94,07	100,00	6.300.000		
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		119.440.000	119.440.000			90.640.000	28.280.000	118.920.000	118.920.000	99,56	100,00	520.000		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		66.000.000	66.000.000			13.600.000	9.000.000	22.500.000	22.500.000	40,18	100,00	33.500.000		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		740.200.000	740.200.000			624.030.000	132.180.000	656.210.000	656.210.000	88,65	100,00	83.990.000		
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		53.730.000	53.730.000			50.588.000		50.588.000	50.588.000	94,11	100,00	3.165.000		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		54.000.000	54.000.000			45.000.000	9.000.000	54.000.000	54.000.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		54.000.000	54.000.000			45.000.000	9.000.000	54.000.000	54.000.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan		25.000.000	25.000.000			25.000.000		25.000.000	25.000.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Tegihan Telepon		399.000.000	399.000.000			302.221.800	33.049.500	335.271.000	335.271.000	84,03	100,00	63.729.000		
	Belanja Tegihan Listrik		12.160.000	12.160.000			11.137.500	1.012.500	12.160.000	12.160.000	100,00	100,00	-		
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		24.050.000	24.050.000			18.029.900	1.165.900	19.195.800	19.195.800	79,82	100,00	4.854.200		
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		-	-											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		-	-											
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		438.400.000	438.400.000			327.800.000	43.600.000	371.400.000	371.400.000	84,72	100,00	67.000.000		
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat		2.250.000	2.250.000			450.000		450.000	450.000	20,00	100,00	1.800.000		
	Jumlah Sub Kegiatan		2.470.558.000	2.470.558.000			1.828.885.800	312.972.900	2.141.858.700	2.141.858.700	86,70	100,00	328.699.300		
	Jumlah Kegiatan		2.470.558.000	2.470.558.000			1.828.885.800	312.972.900	2.141.858.700	2.141.858.700	86,70	100,00	328.699.300		
	Jumlah Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		2.676.716.000	2.676.716.000			2.045.372.363	476.197.929	2.521.570.292	2.521.470.292	87,85	100,00	384.245.708		
	Jumlah		11.744.679.905	12.211.087.105			9.214.368.565	1.968.249.871	11.182.618.436	11.182.618.436	91,58	100,00	1.028.448.889		

Tanjungpandan, Desember 2024  
Kepala DPP KBPMD  
Kabupaten Belitung,

FEBRIANSYAH, S.STP  
Pembina  
NIP. 198702132006021001